



Katalog: 4401002

STATISTIK KRIMINAL 2019



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK KRIMINAL 2019



Statistik Kriminal 2019

ISSN : 2089-5291

No. Publikasi: 04330.1903

Katalog: 4401002

Ukuran Buku: 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman: xviii + 198 halaman/pages

Naskah:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Penyunting:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Desain Kover oleh:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik

Pencetak: Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

RINGKASAN EKSEKUTIF

Publikasi Statistik Kriminal 2019 ini menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2016–2018. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan.

Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (*administrative based data*) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (*survey based data*) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2016 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018.

Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2017–2018 mengalami peningkatan. Persentase penduduk korban kejahatan pada tahun 2017 sebesar 1,08 persen dan meningkat menjadi 1,11 persen pada 2018.

Berdasarkan data Podes, selama tahun 2011-2018 jumlah Desa/Kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 Desa/Kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 Desa/Kelurahan pada tahun 2018.

EXECUTIVE SUMMARY

The 2018 Criminal Statistics publication presents an overview of the level and trend of crime in Indonesia during the period 2016-2018. The information presented includes three main approaches to criminal statistics, namely the perpetrator's approach, the victim's approach, and the regional approach.

The data presented in this publication are obtained from two main sources of criminal statistics, (1) Administrative based data, namely criminal data collected by the Indonesian National Police (POLRI) and (2) Survey-based data, namely criminal data sourced from the National Socio-Economic Survey (Susenas) and Village Potential Data Collection (Podes) produced by the BPS-Statistics Indonesia.

Police registration data records that the crime rate for the period 2016-2018 has decreased. The number of people affected by crime in every 100,000 population in 2016 was around 140, to 129 in 2017, and decreased to 113 in 2018.

The National Socio-Economic Survey (Susenas) data that illustrates the percentage of the population being victims of crimes in Indonesia during the period 2017-2018 has increased. The percentage of victims of crime in 2017 was 1.08 percent and increased to 1,11 percent in 2018.

Based on the Village Potential Data Collection (Podes) data for the period 2011-2018 the number of villages / sub-district that became the scene of mass conflict tended to increase, from around 2,500 villages in 2011 to around 2,700 villages / kelurahan in 2014, and again increased to around 3,100 villages / sub-district in 2018.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal 2019 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum terkait data kriminalitas di Indonesia. Publikasi ini juga menyajikan data statistik di bidang kriminal antar waktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data yang berasal dari tiga sumber, yaitu data registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan BPS.

Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Data Susenas menggambarkan pengalaman menjadi korban kejahatan berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban kejahatan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah Desa/Kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala Desa/Lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Suharyanto

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	3
Maksud dan Tujuan	4
Ruang Lingkup	5
Sistematika Penyajian	5
BAB 2 KEJADIAN KEJAHATAN	7
Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)	9
Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)	10
Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	13
Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/ <i>Homicide</i>)	15
Kejahatan Terhadap Fisik/Badan (<i>Violence</i>)	17
Kejahatan Terhadap Kesusastraan	19
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.....	21
Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan	23
Kejahatan Terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan.....	25
Kejahatan Terkait Narkotika	27
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	29
Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahannya.....	32
Konflik Massal	40
BAB 3 KORBAN KEJAHATAN	47
Penduduk Korban Kejahatan	49
Tingkat Pelaporan (<i>Reporting Rate</i>)	555

BAB 4 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's) TERKAIT KEAMANAN.....	57
Pendahuluan	59
Target 16.1.1.(a). Jumlah kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.....	60
Target 16.1.3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.....	61
Target 16.1.4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.....	63
Target 16.3.1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.....	68
Target 16.5.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	69
DAFTAR PUSTAKA	75
CATATAN TEKNIS	79
Jenis dan Sumber Data	79
Konsep dan Definisi.....	82
Penjelasan Teknis	86
LAMPIRAN TABEL.....	87

DAFTAR GAMBAR

II. KEJADIAN KEJAHATAN

Gambar 2.1	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), Tahun 2016 - 2018	10
Gambar 2.2	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2018.....	11
Gambar 2.3	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), Menurut Polda, Tahun 2018.....	12
Gambar 2.4	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2014 - 2018	15
Gambar 2.5	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda, Tahun 2018.....	16
Gambar 2.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2014 - 2018.....	17
Gambar 2.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, Tahun 2018.....	18
Gambar 2.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Tahun 2014 - 2018.....	19
Gambar 2.9	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Polda, Tahun 2018.....	20
Gambar 2.10	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2014 - 2018.....	21
Gambar 2.11	Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, Tahun 2018.....	22
Gambar 2.12	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2014 - 2018	23
Gambar 2.13	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2018	24
Gambar 2.14	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2014 - 2018	25
Gambar 2.15	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2018	26
Gambar 2.16	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2014 – 2018.....	27
Gambar 2.17	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, Tahun 2018.....	28
Gambar 2.18	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2014 - 2018	30

Gambar 2.19	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, Tahun 2018	31
Gambar 2.20	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	32
Gambar 2.21	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018	34
Gambar 2.22	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018.....	35
Gambar 2.23	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018	36
Gambar 2.24	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018	37
Gambar 2.25	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018	38
Gambar 2.26	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018	39
Gambar 2.27	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, Tahun 2011 - 2018	42
Gambar 2.28	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipennya, Tahun 2014 dan 2018.....	43
Gambar 2.29.	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, Tahun 2014 dan 2018.....	45
Gambar 2.30.	Jumlah Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal	46

III. KORBAN KEJAHATAN

Gambar 3.1.	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2017–2018.....	49
Gambar 3.2.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017–2018	50
Gambar 3.3.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017–2018	52

Gambar 3.4.	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, Tahun 2017–2018	53
Gambar 3.5.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2018.....	54
Gambar 3.6.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia dan Provinsi, Tahun 2018.....	54
Gambar 3.7.	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, Tahun 2017–2018.....	55

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's) TERKAIT KEAMANAN

Gambar 4.1.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahanan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, Tahun 2015 - 2018.....	66
Gambar 4.2.	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017.....	64
Gambar 4.3.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	66
Gambar 4.4.	Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018	67
Gambar 4.5.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi, Tahun 2015 - 2018	67
Gambar 4.6.	Perkembangan IPAk, Tahun 2012 – 2019	67

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

II. KEJADIAN KEJAHATAN

Sumber Data : Kepolisian RI

Tabel 2.1.1.	Indikator Kriminalitas Nasional, Tahun 2016-2018.....	90
Tabel 2.1.2	Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), Tahun 2018	91
Tabel 2.1.3	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018	92
Tabel 2.1.4	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018	93
Tabel 2.1.5	Percentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018	94
Tabel 2.1.6	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018	95
Tabel 2.1.7	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018....	96
Tabel 2.1.8	Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2016-2018.....	97
Tabel 2.1.9	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan di Tahun 2018	98

Sumber Data : Potensi Daerah

Tabel 2. 2.1.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	122
Tabel 2. 2.2.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	123
Tabel 2. 2.3.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	124
Tabel 2. 2.4.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	125
Tabel 2. 2.5.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	126

Tabel 2. 2.6.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014 , dan 2018.....	127
Tabel 2. 2.7.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	128
Tabel 2. 2.8.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	129
Tabel 2. 2.9.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	130
Tabel 2. 2.10.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	131
Tabel 2. 2.11.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	132
Tabel 2. 2.12.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	133
Tabel 2. 2.13.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	134
Tabel 2. 2.14.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	135
Tabel 2. 2.15.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	136
Tabel 2. 2.16.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	137
Tabel 2. 2.17.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	138
Tabel 2. 2.18.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	139
Tabel 2. 2.19.	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	140

Tabel 2. 2.20.	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	141
Tabel 2. 2.21.	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	142
Tabel 2. 2.22.	Percentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	143

Sumber Data : Potensi Daerah

Tabel 2. 3.1.	Jumlah dan Percentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	146
Tabel 2. 3.2.	Jumlah dan Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	147
Tabel 2. 3.3.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011.....	148
Tabel 2. 3.4.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014.....	150
Tabel 2. 3.5.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018.....	152
Tabel 2. 3.6.	Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011.....	154
Tabel 2. 3.7.	Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014.....	156
Tabel 2. 3.8.	Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018.....	158
Tabel 2. 3.9.	Jumlah dan Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaiannya Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	160

III. KORBAN KEJAHATAN

Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 3.1.1	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami, Tahun 2017 dan 2018	162
Tabel 3.1.2	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018.....	163
Tabel 3.1.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017-2018.....	164
Tabel 3.1.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017-2018.....	165
Tabel 3.1.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018	166
Tabel 3.1.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018	167
Tabel 3.1.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018.....	168
Tabel 3.1.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018.....	169
Tabel 3.1.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018	170
Tabel 3.1.10	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018	171
Tabel 3.1.11	Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapat Penanganan Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018	172
Tabel 3.1.12	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, Tahun 2018.....	173

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's) TERKAIT KEAMANAN

Tabel 4. 1.1.	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017...176	
Tabel 4. 1.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, Tahun 2017	177
Tabel 4. 1.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, Tahun 2017	178

Tabel 4. 1.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, Tahun 2017	179
Tabel 4. 1.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, Tahun 2017	181

Sumber Data : Potensi Desa

Tabel 4 .2.1.	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018	184
Tabel 4. 2.2.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga keamanan, Tahun 2011	185
Tabel 4. 2.3.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2014	186
Tabel 4. 2.4.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2018	187
Tabel 4. 2.5.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011	188
Tabel 4. 2.6.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2014	189
Tabel 4. 2.7.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2018	190
Tabel 4. 2.8.	Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, Tahun 2011,2014, dan 2018	191
Tabel 4. 2.9.	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	192
Tabel 4. 2.10.	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	193
Tabel 4. 2.11.	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018.....	194
Tabel 4. 2.12.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014	195

Tabel 4. 2.13	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018	196
Tabel 4. 2.14.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014	197
Tabel 4. 2.15.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018	198

01

PENDAHULUAN



Bab I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (*Maslow, 1943*), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Maksud dan Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2019 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah/daerah Kepolisian (Polda) dan nasional.

Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian perkelahian massal disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2011, 2014, dan 2018.

Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes. Bab III akan menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi. Bab IV menyajikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) terkait keamanan. Catatan teknis

BAB I
PENDAHULUAN

menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan. Pada bagian terakhir terdapat daftar pustaka dan tabel lampiran.

https://www.bps.go.id

BAB 2

Kejadian Kejahatan

Kejadian terhadap nyawa

01

Kejadian terhadap fisik/badan

02

Kejadian terhadap kesusailaan

03

Kejadian terhadap kemerdekaan orang

04

Kejadian terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan

05

Kejadian terhadap hak milik/barang

06

Kejadian terkait narkoba

07

Kejadian terhadap ketertiban umum

09

Kejadian terkait penipuan, penggelapan dan korupsi

KLASIFIKASI KEJAHATAN

“ TERTINGGI ”

KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN, HAK MILIK/BARANG DENGAN DAN TANPA KEKERASAN

SUMATERA UTARA

“ TERENDAH ”

CRIME TOTAL, KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN DAN KEJAHATAN TERHADAP KESUSAILAAN

KALIMANTAN UTARA

“ TERENDAH ”

KEKERASAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN DAN TANPA PENGUNAAN KEKERASAN DAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN KORUPSI

MALUKU UTARA

“ TERTINGGI ”

CRIME TOTAL, KEJAHATAN TERKAIT NARKOBA, DAN PENIPUAN, PENGGELAPAN DAN KORUPSI

“ TERENDAH ”

KEJAHATAN TERKAIT NARKOBA

Bab 2

KEJADIAN KEJAHATAN

Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehatian-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Selama periode tahun 2016–2018, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2016 sebanyak 357.197 kejadian, menurun menjadi sebanyak 336.652 kejadian pada tahun 2017 dan menurun pada tahun 2018 menjadi 294.281 kejadian.

Pada 2018, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) sebesar 113

Sejalan dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 113. Angka ini menurun dari 140 pada tahun 2016 dan 129 pada tahun 2017. Sebagai perbandingan, *crime rate* malaysia (*Department of Statistics Malaysia*) pada tahun 2015 sebesar 370, tahun 2016 sebesar 355, dan tahun 2017 sebesar 309. *Crime rate* merupakan angka yang dapat-menunjukkan

tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2016 - 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

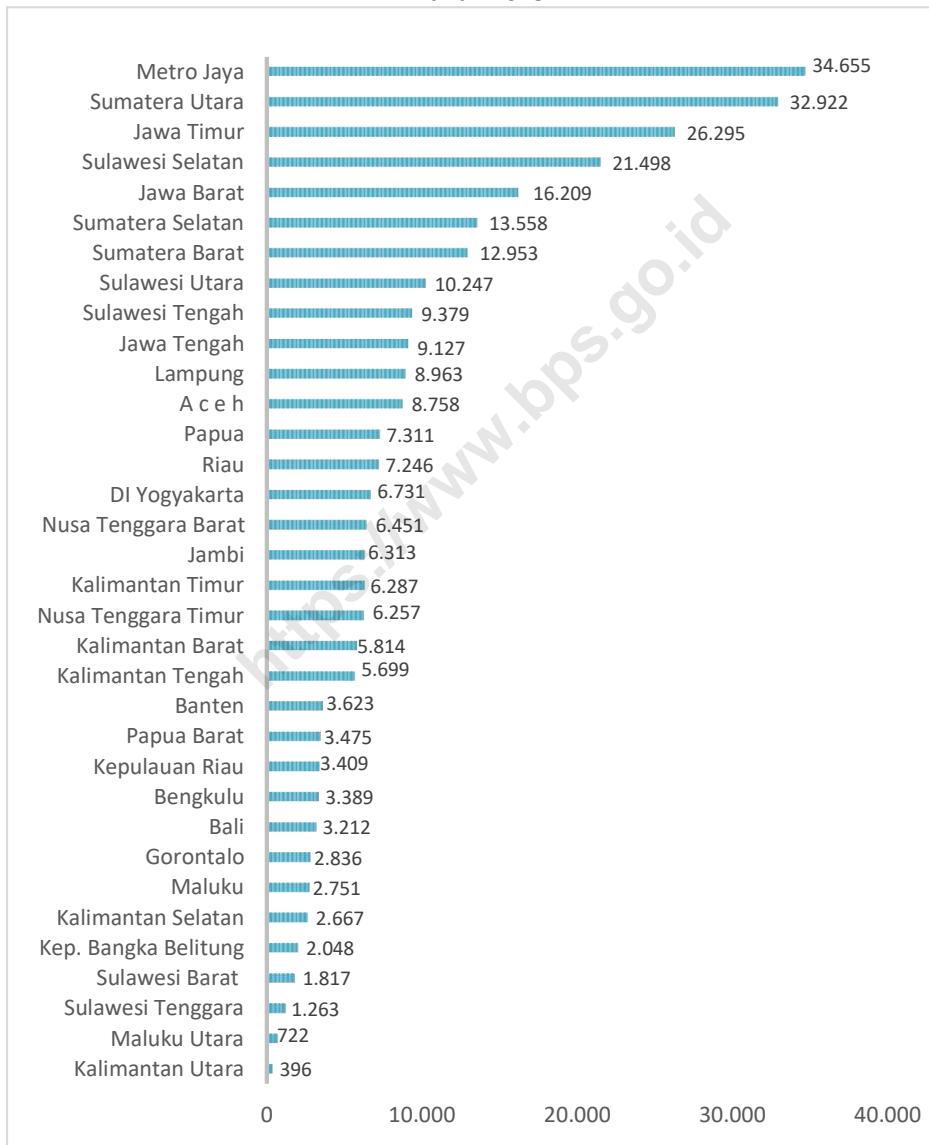
Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode 2016-2017 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) 00.01'28" (1 menit 28 detik) pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 00.01'33" (1 menit 33 detik) pada tahun 2017. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2018 menjadi sebesar 00.01'47" (1 menit 47 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)

Dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2018 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (34.655 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara (32.922 kejadian), dan Polda-Jawa Timur (26.295 kejadian). Sementara itu, Polda Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan,

Sulawesi Tenggara merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 396; 722; dan 1.263, (lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2018

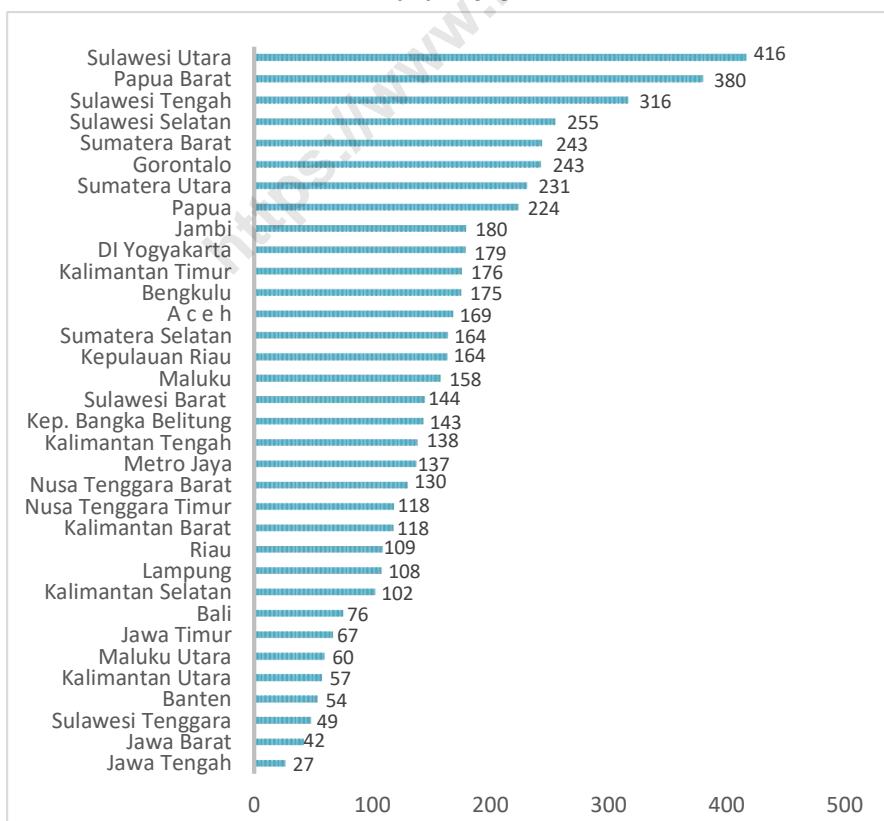


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Meskipun Jawa Barat dari sisi jumlah kejadian (*crime total*) termasuk kategori lima terbesar, tetapi dari sisi tingkat kejahatan (*crime rate*) termasuk kelompok lima terendah. Hal ini tentu karena pengaruh jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Terkait *crime rate*, Polda Sulawesi Utara mencatat tingkat kejahatan tertinggi yakni 416 (setiap 100.000 penduduk), disusul oleh Polda Papua Barat (380) dan Sulawesi Tengah (316).

Pada 2018, Dua wilayah Polda dengan tingkat resiko kejahatan (*crime rate*) tertinggi ada di Sulawesi Utara dan Papua Barat.

Gambar 2.3 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).

Jenis Kejahatan dapat dikelompokan berdasarkan tingkat keseriusan maupun targetnya (objek).

Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini :

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusastraan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

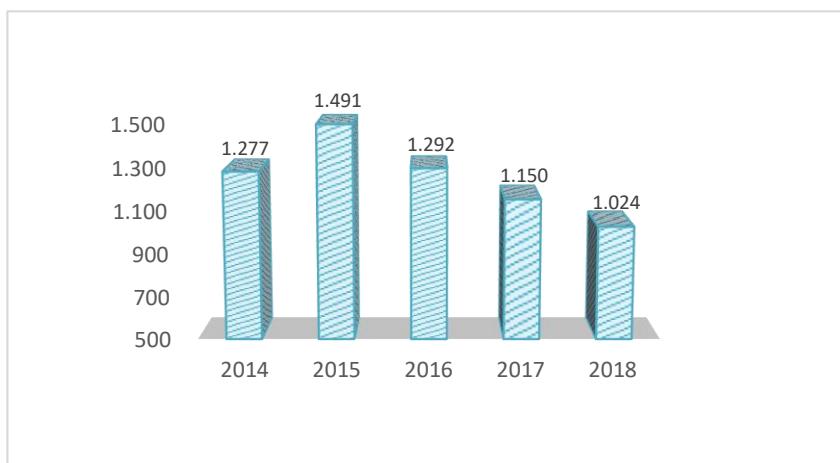
Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*)

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia.

Tahun 2018, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan /*homicide*) di Indonesia menurun.

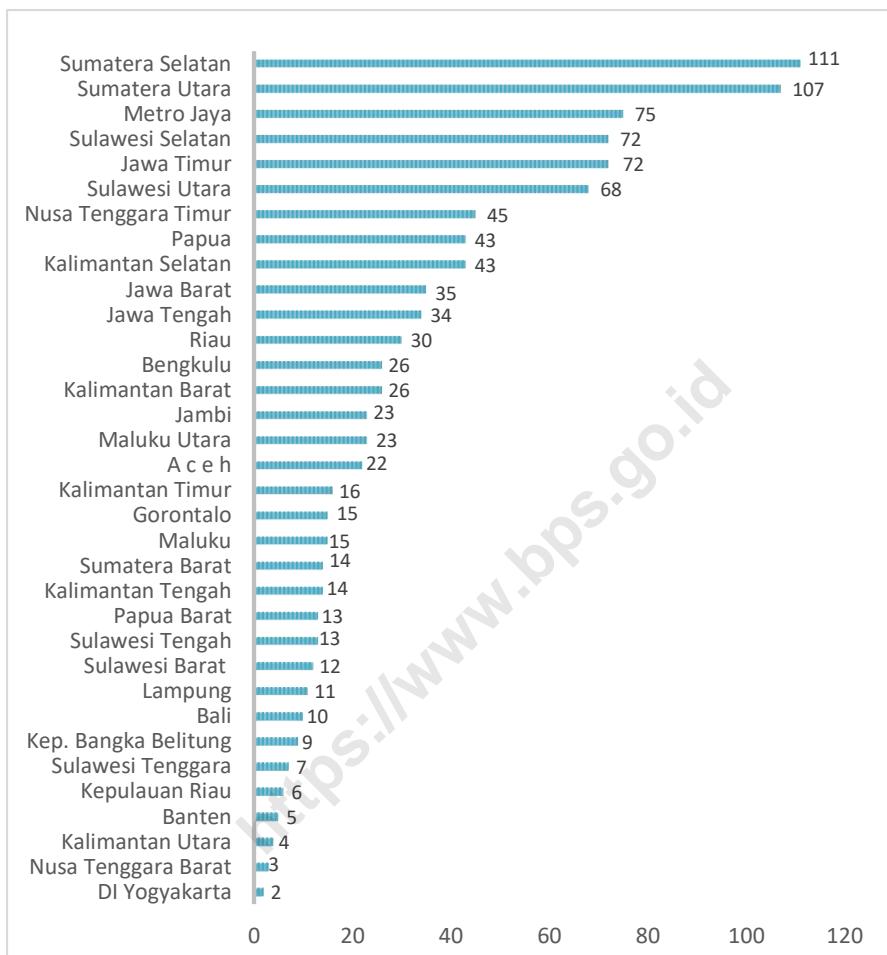
Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Gambar 2.4 memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tercatat ada 1.491 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kejadian, tahun 2017 menjadi 1.150 kejadian, dan turun kembali menjadi 1.024 kejadian pada tahun 2018 (jumlah kejadian kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2014 - 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

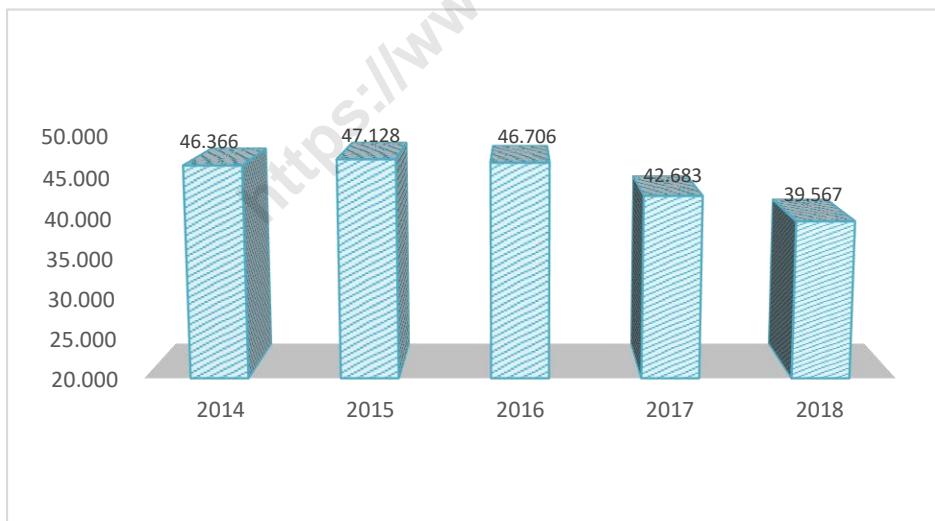
Berdasarkan Gambar 2.5 dapat dilihat bahwa tiga Polda yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar adalah Polda Sumatera Selatan (111 kejadian), Sumatera Utara (107 kejadian), dan Metro Jaya sebanyak 75 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara dengan jumlah kejadian masing-masing sebanyak dua, tiga dan empat kejadian.

Kejahatan Terhadap Fisik/Badan (*Violence*)

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2018 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.6 pada 2017 terjadi 42.683 kejadian, pada tahun 2018 menurun menjadi 39.567.

Pada 2018, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik (*violence*) di Indonesia cenderung menurun.

Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2014 - 2018

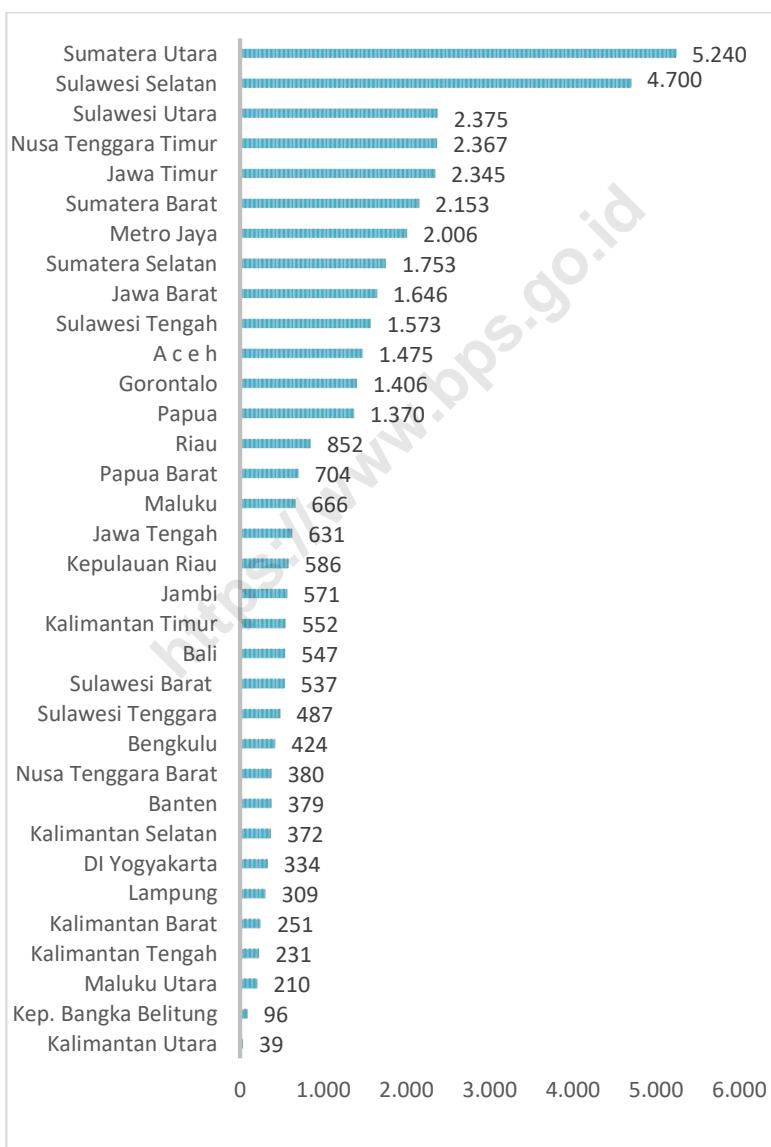


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Dari Gambar 2.7 dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 5.240 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi

Selatan, yaitu sebanyak 4.700 kejadian. Dua Polda yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah provinsi Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung, masing-masing sebanyak 39 dan 96 kejadian.

Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2014-2018 berfluktuasi. Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.247 kejadian kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.513 kejadian. Kemudian jumlah kejahanan menurun pada tahun 2018 menjadi 5.258 kejadian.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia selama lima tahun terakhir tertinggi pada 2017.

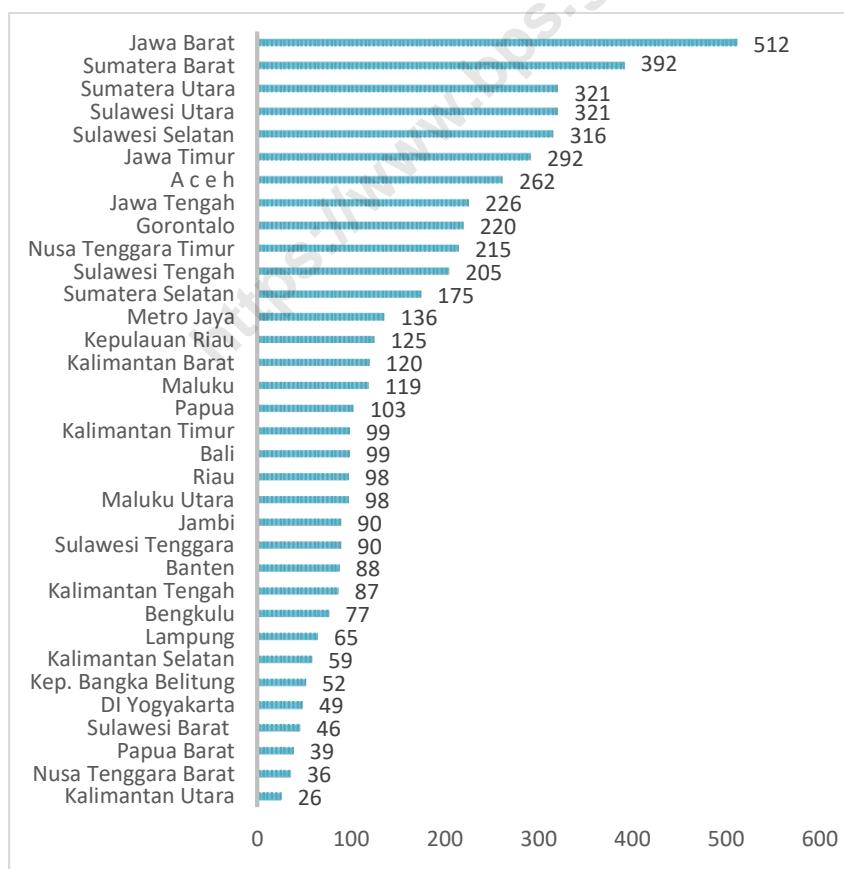
Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Tahun 2014 - 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Polda Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusailaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 512 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Polda Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, masing-masing sebanyak 392 kejadian dan 321 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat. Jumlah kejadian di ketiga Polda tersebut masing-masing 26 kejadian, 36 kejadian dan 39 kejadian.

Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusailaan Menurut Polda, Tahun 2018



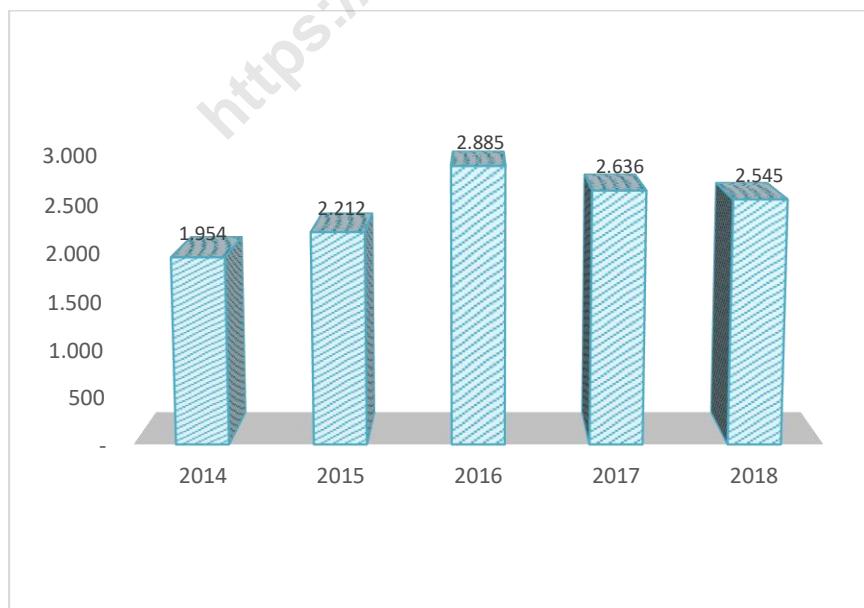
Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak dibawah umur. Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan dan mempekerjakan anak dibawah umur pada 2016-2018 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.10 pada 2016 terjadi 2.885 kejadian, dan menurun menjadi 2.636 kejadian pada 2017. Kemudian menurun lagi menjadi 2.545 kejadian pada tahun 2018.

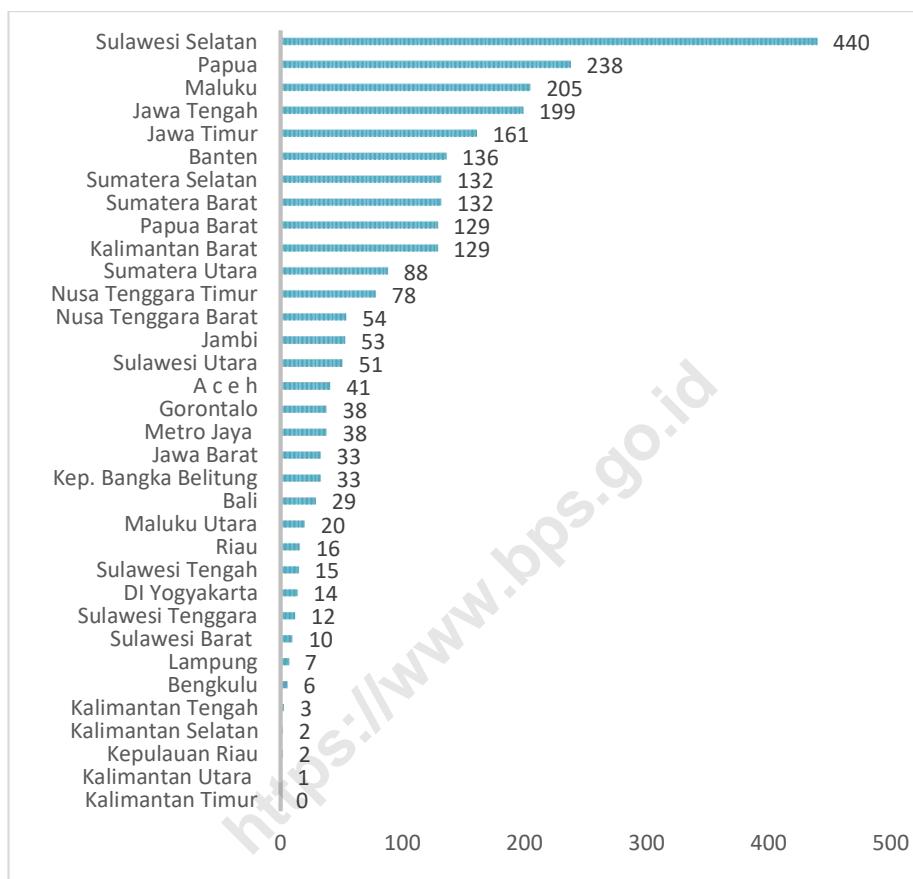
Pada 2016-2018, jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan (termasuk penculikan) di Indonesia cenderung menurun.

Gambar 2.10 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2014 - 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.11 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2018 berdasarkan polda/provinsi. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Sulawesi Selatan terdapat kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terbanyak yaitu sebanyak 440. Di posisi kedua terdapat Polda Papua, yaitu sebanyak 238 kejadian. Sementara Polda Maluku berada di posisi ketiga dengan kejadian sebanyak 205 kejadian. Kalimantan Timur merupakan Polda di posisi terakhir karena di wilayah tersebut tidak tercatat kejadian kejahatan ini di tahun 2018.

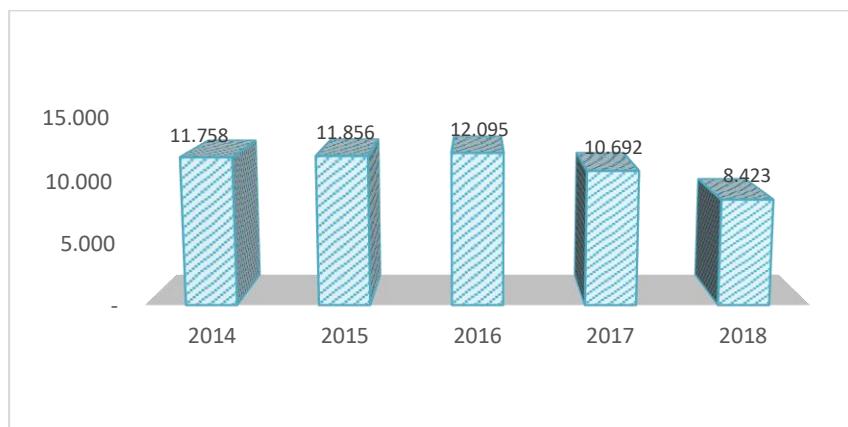
Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan adalah Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) dan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)

Pada tahun 2018 jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.12, jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan pada tahun 2018 sebanyak 8.423 kejadian, menurun dibanding tahun 2017 sebanyak 10.692 kejadian.

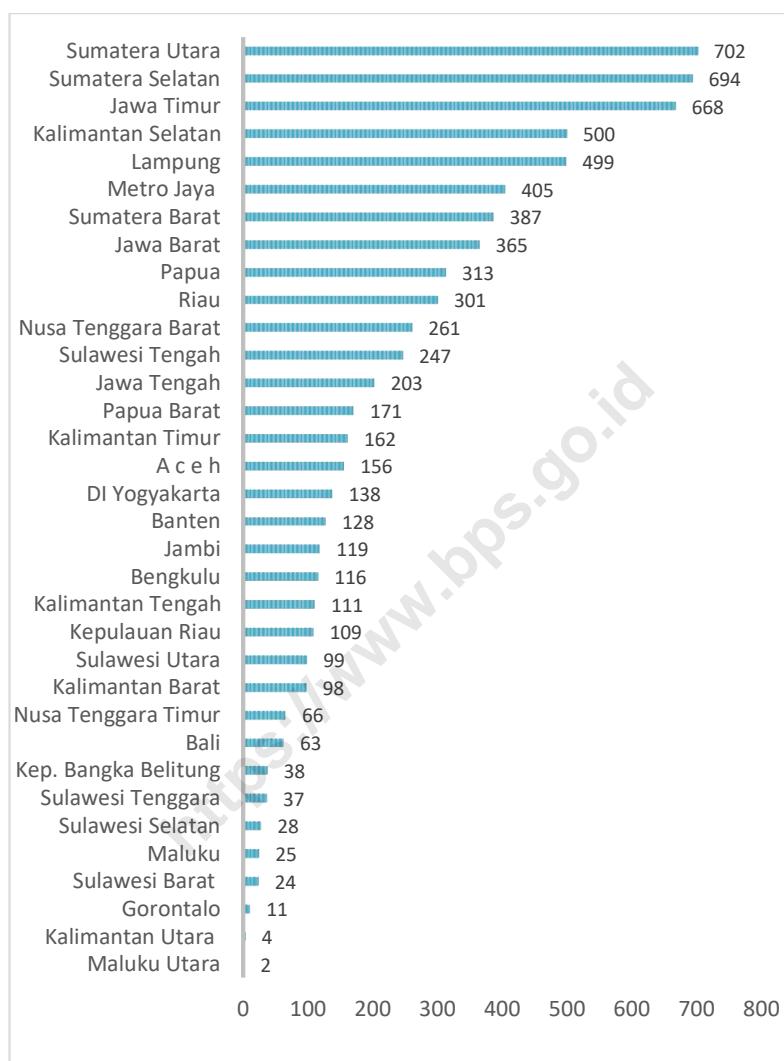
Terjadi 8.423
kejadian
pencurian
kekerasan
selama 2018
(Mabes Polri)

Gambar 2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2014 - 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

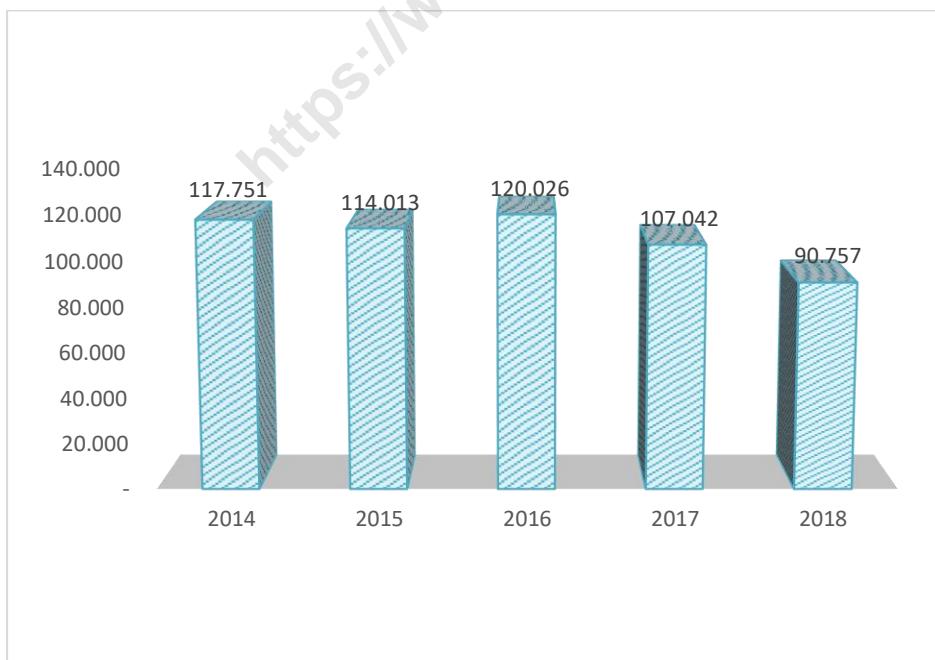
Jenis kejahatan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Gambar 2.13 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan di tahun 2018. Wilayah dengan jumlah kejadian

terbanyak adalah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 702 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Sumatera Selatan dengan 694 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Polda Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Masing-masing terjadi sebanyak 2 dan 4 kejadian.

Kejahatan Terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah Pencurian, Pencurian dengan pemberatan, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pengrusakan/Penghancuran Barang, Pembakaran dengan Sengaja, dan Penadahan

Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2014 - 2018

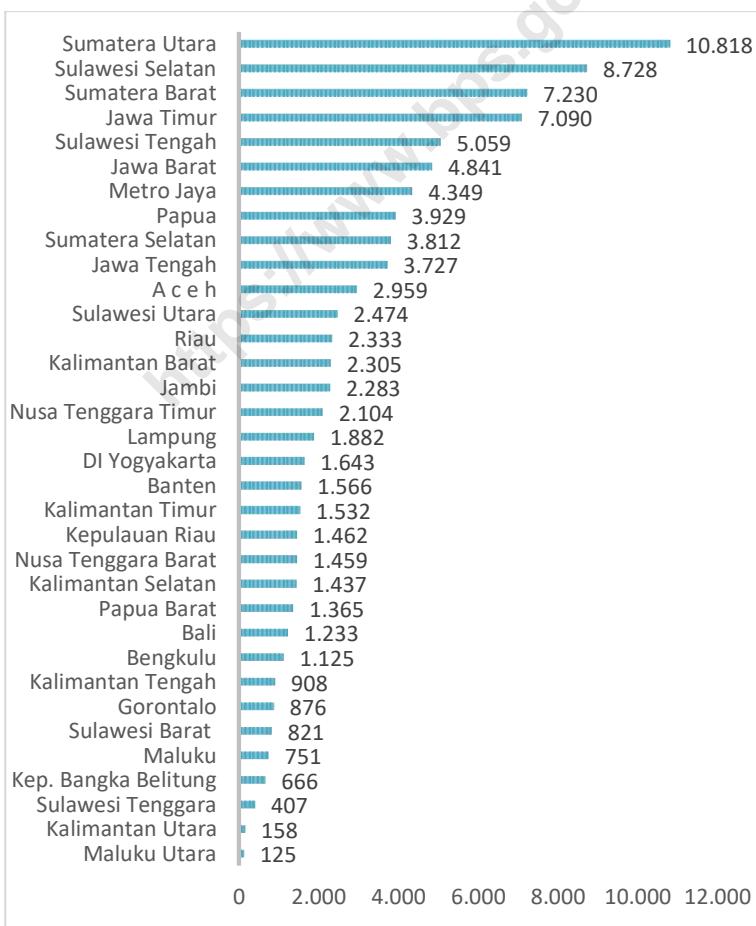


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik tanpa penggunaan kekerasan (*property crime without violence*) selama periode 2016–2018 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.14 pada 2016 terjadi 120.026 kejadian, menjadi 107.042 kejadian pada 2017, dan menurun menjadi 90.757 kejadian pada tahun 2018.

Pada 2018, Polri mencatat sekitar 90.757 kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa Kekerasan.

Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

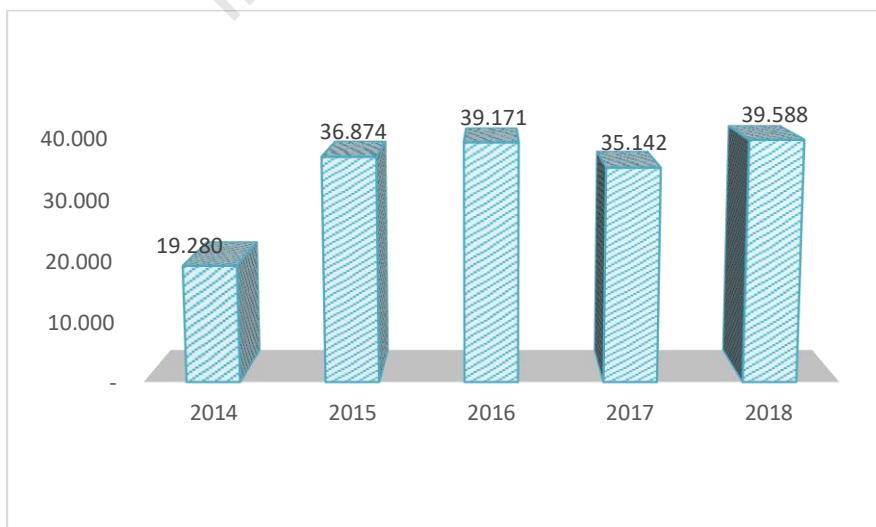
Kejadian Kejahatan Pencurian Tanpa Penggunaan Kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.

Gambar 2.15 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 10.818 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat wilayah Sulawesi Selatan dengan 8.728 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian dua paling sedikit adalah Polda Kalimantan Utara dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 158 dan 125 kejadian.

Kejahatan Terkait Narkotika

Pada 2018, jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini memiliki pola yang berbeda dengan kejahatan lain. Berdasarkan Gambar 2.16, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Indonesia pada 2014 – 2018 cenderung meningkat.

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2014 – 2018

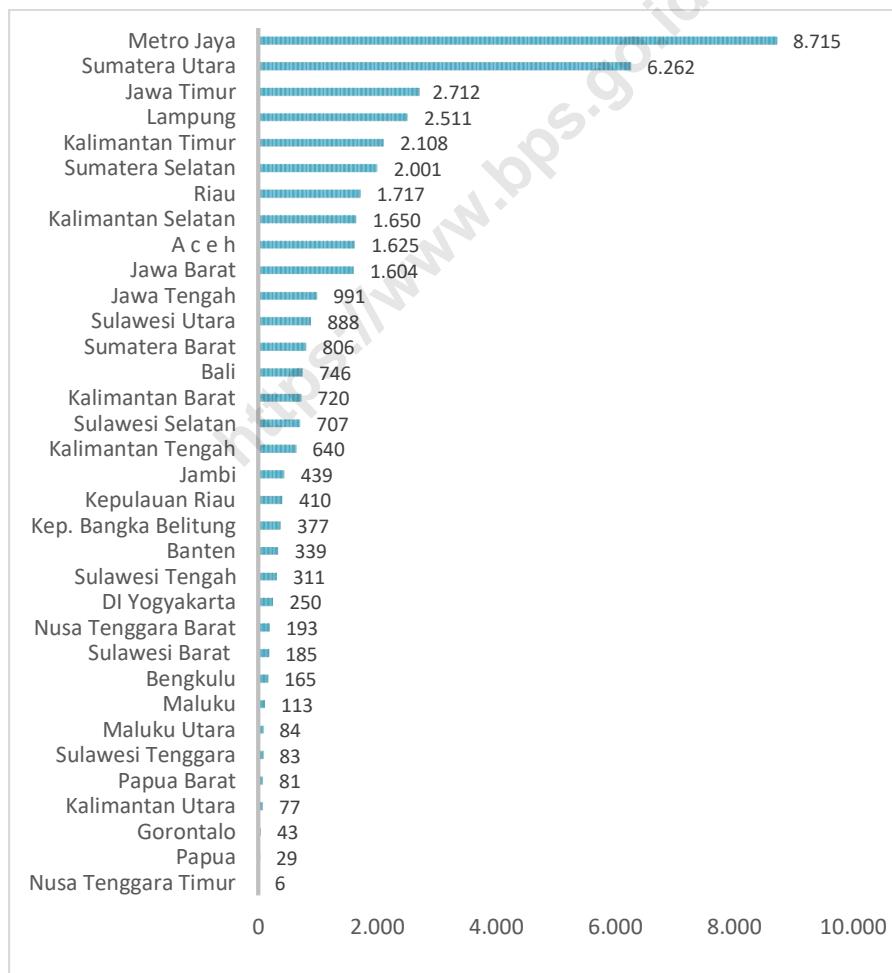


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar tersebut memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah kejadian sebanyak 35.142 kejadian.

Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (drugs) di Indonesia pada 2014 – 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

Gambar 2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.17 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tahun 2018 paling banyak terdapat di Polda Metro Jaya dengan jumlah 8.715 kejadian, kedua adalah di Polda Sumatera Utara dengan jumlah 6.262 kejadian dan ketiga terdapat di Polda Jawa Timur dengan jumlah 2.712 kejadian.

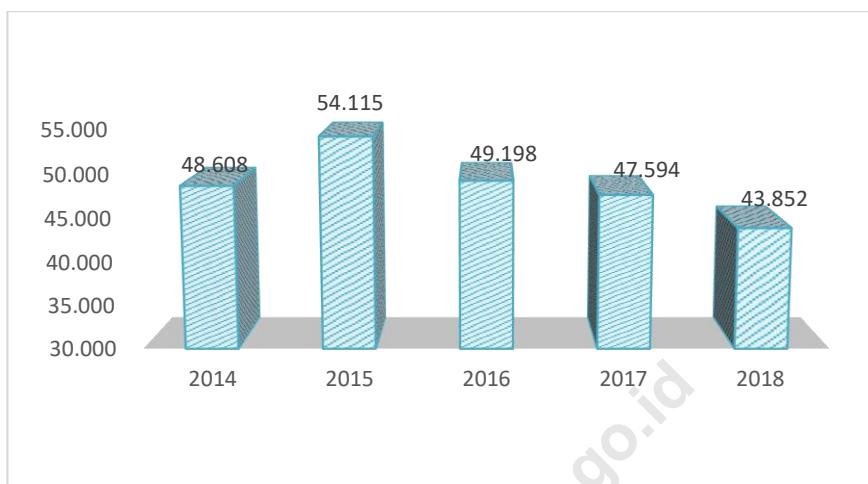
Wilayah dengan jumlah kejadian terendah ada Polda Gorontalo, Papua dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing dengan 43 kejadian, 29 kejadian dan 6 kejadian. Termasuk dalam kejahatan terkait narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika.

Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah penipuan, penggelapan, dan korupsi. Gambar 2.18 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri selama periode 2014–2018 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2015 terjadi 54.115 kejadian, pada 2016 tercatat 49.198 kejadian, sementara pada 2017 menjadi 47.594 kejadian. Kemudian pada 2018 angka ini menurun menjadi 43.852 kejadian.

Terjadi 43.852
kejadian terkait
penipuan,
penggelapan
dan korupsi
selama 2018
(Mabes Polri).

Gambar 2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2014 - 2018

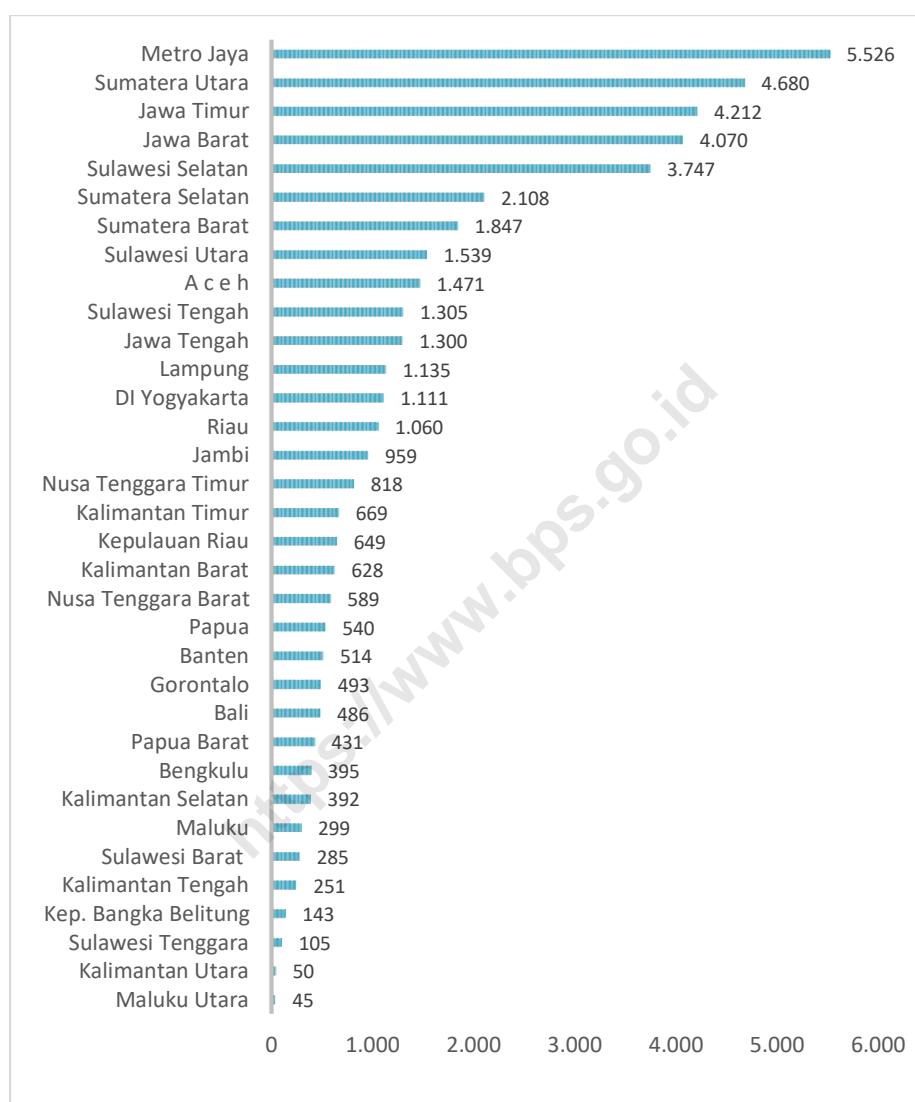


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Metro Jaya, sejumlah 5.526 kejadian. Di posisi kedua terbanyak terdapat Polda Sumatera Utara sebanyak 4.680 kejadian.

Polda Kalimantan Utara dan Maluku Utara adalah provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 50 dan 45 kejadian. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang paling banyak kejadiannya adalah penipuan.

Gambar 2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, Tahun 2018

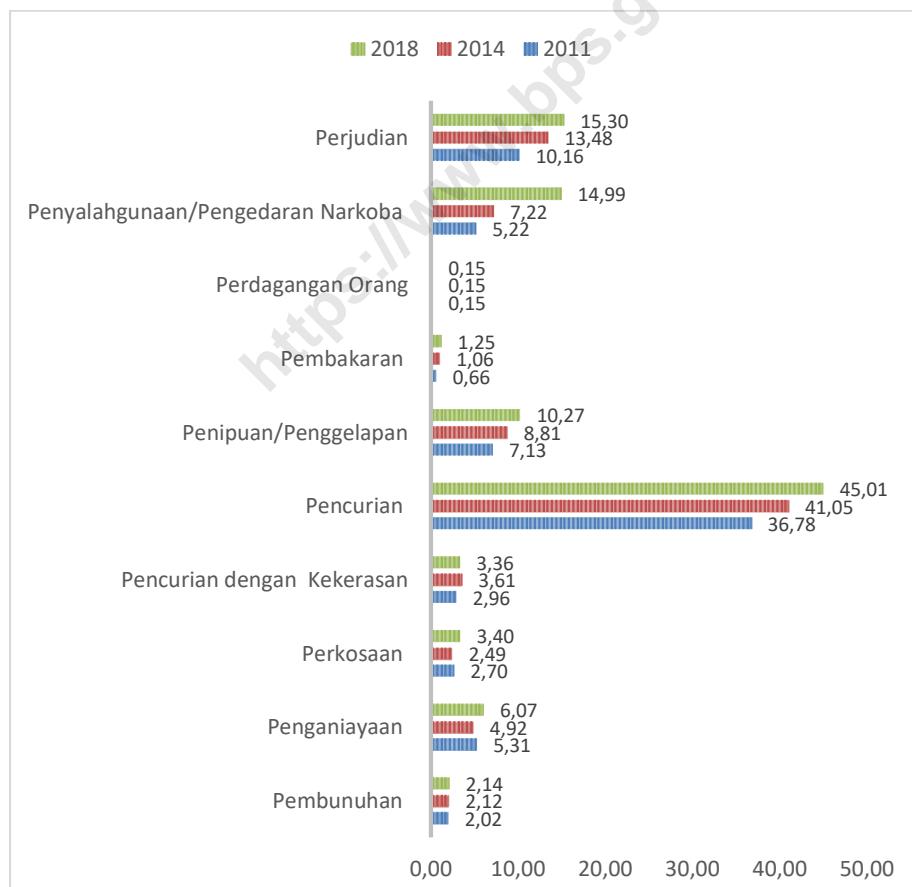


Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayah

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data Polri yang menggunakan pendekatan pelaku, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayah/regional (Desa/Kelurahan). Bagian ini akan memperlihatkan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS tiap tiga tahun.

Gambar 2.20 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

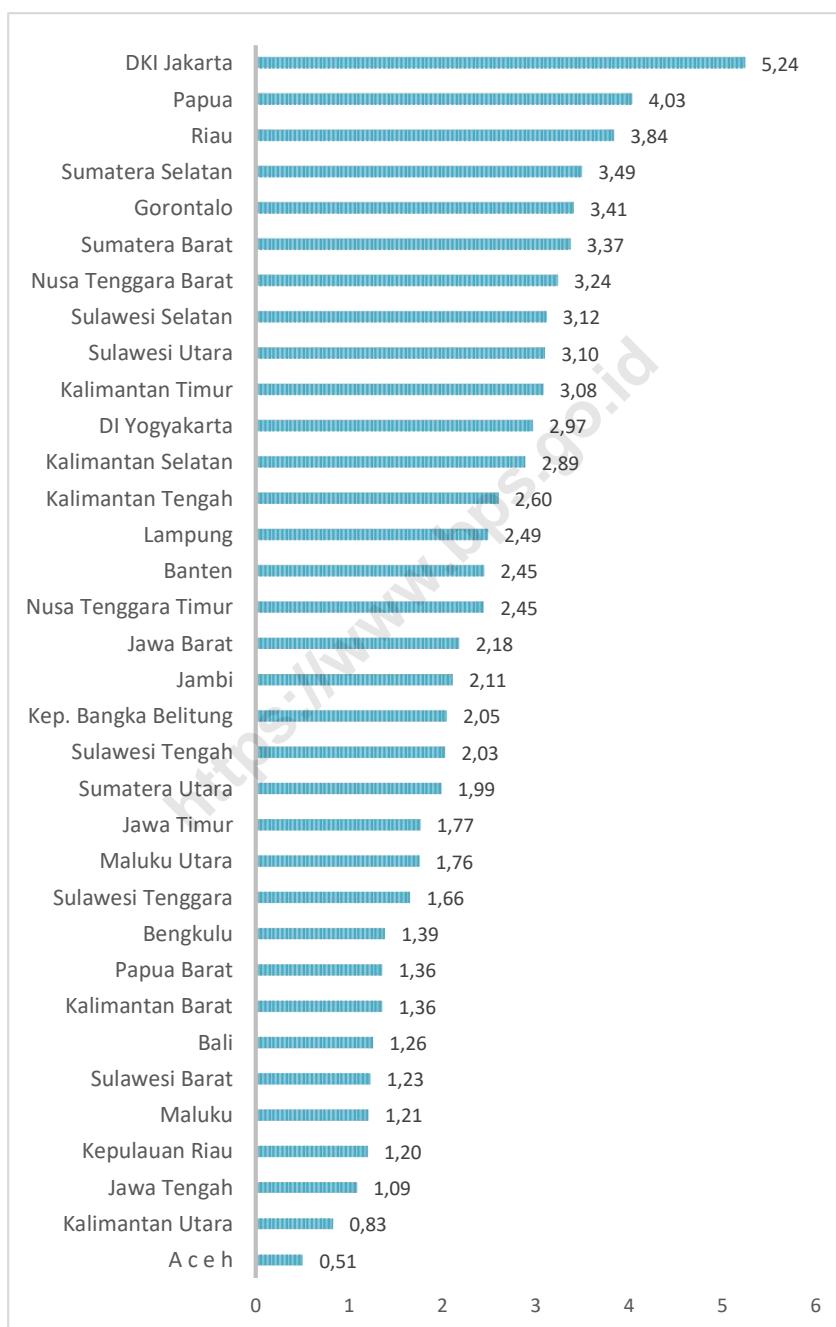
Selama periode 2011 – 2018, seperti yang disajikan pada Gambar 2.20, jenis kejadian kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada Desa/Kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa.

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada Desa/Kelurahan di Indonesia

Persentase desa yang mengalami kejadian pencurian meningkat dari 2011 yang 36,78 persen menjadi 41,05 persen pada 2014. Pada 2018 meningkat kembali menjadi 45,01 persen. Selama tahun 2018 dari beberapa jenis kejahatan yang diukur terdapat enam jenis kejahatan yang mengalami peningkatan, yakni jenis kejahatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, penipuan/penggelapan, pembakaran dengan sengaja, penyalahgunaan/pengedaran narkoba, dan perjudian.

Berdasarkan Gambar 2.21 nampak bahwa dari sisi jumlah, lima provinsi yang persentase Desa/Kelurahannya yang pernah terjadi kejahanan pembunuhan terbesar (perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah Desa/Kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah DKI Jakarta (5,24 persen), Papua (4,03 persen), Riau (3,84 persen), dan Sumatera Selatan (3,49 persen).

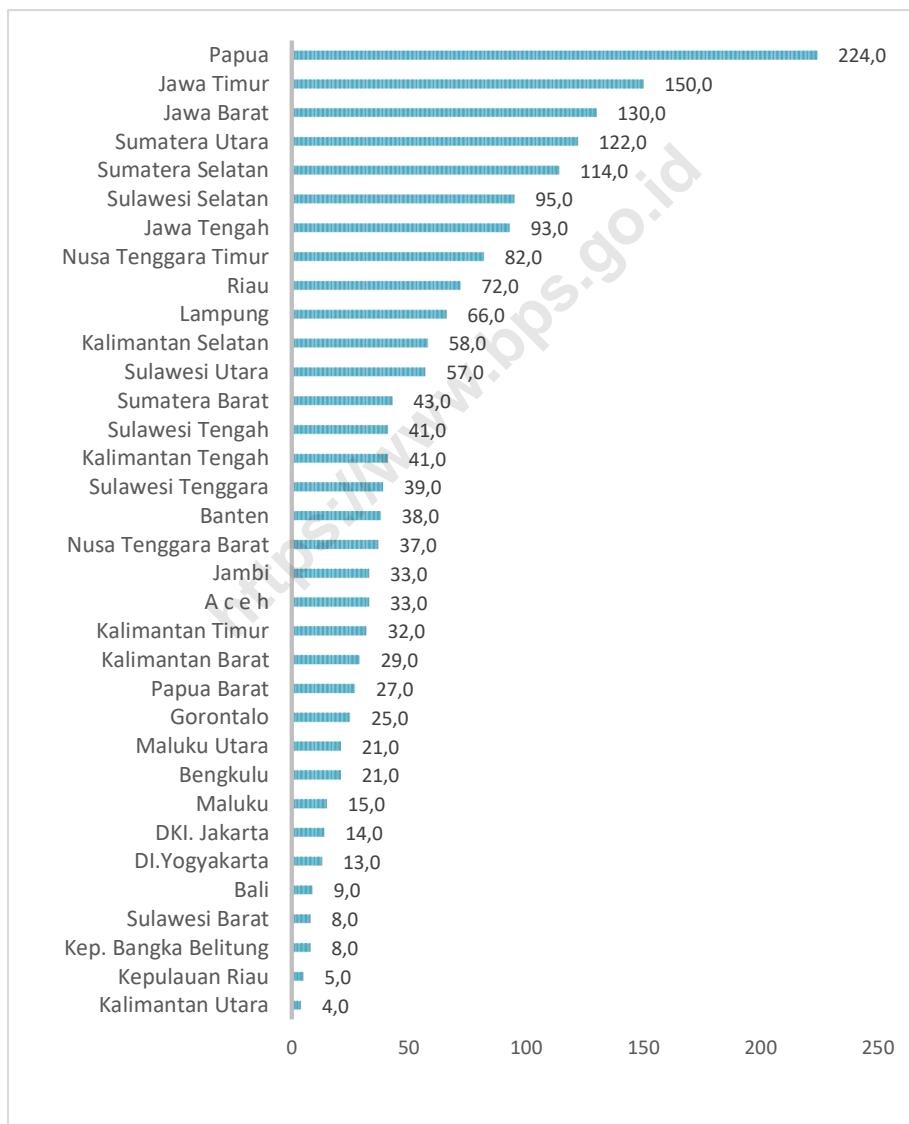
Gambar 2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Apabila dilihat dari jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan selama setahun terakhir (Gambar 2.22) maka Papua, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi yang paling besar.

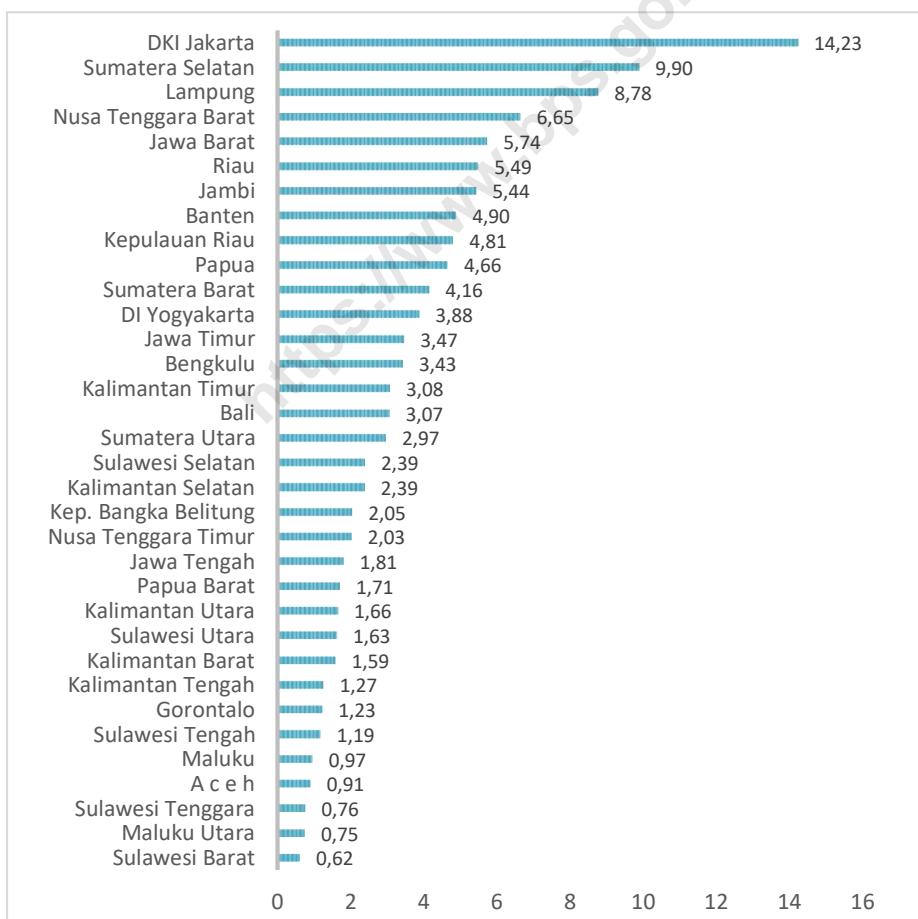
Gambar 2.22 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Berdasarkan Gambar 2.23, pada 2018 rentang persentase kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan pada 34 provinsi berkisar 0,62–14,23 persen. Tiga provinsi yang persentase Desa/Kelurahannya yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terbesar (perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah Desa/Kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah DKI Jakarta (14,23 persen), Sumatera Selatan (9,90 persen), dan Lampung (8,78 persen).

Gambar 2.23 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018

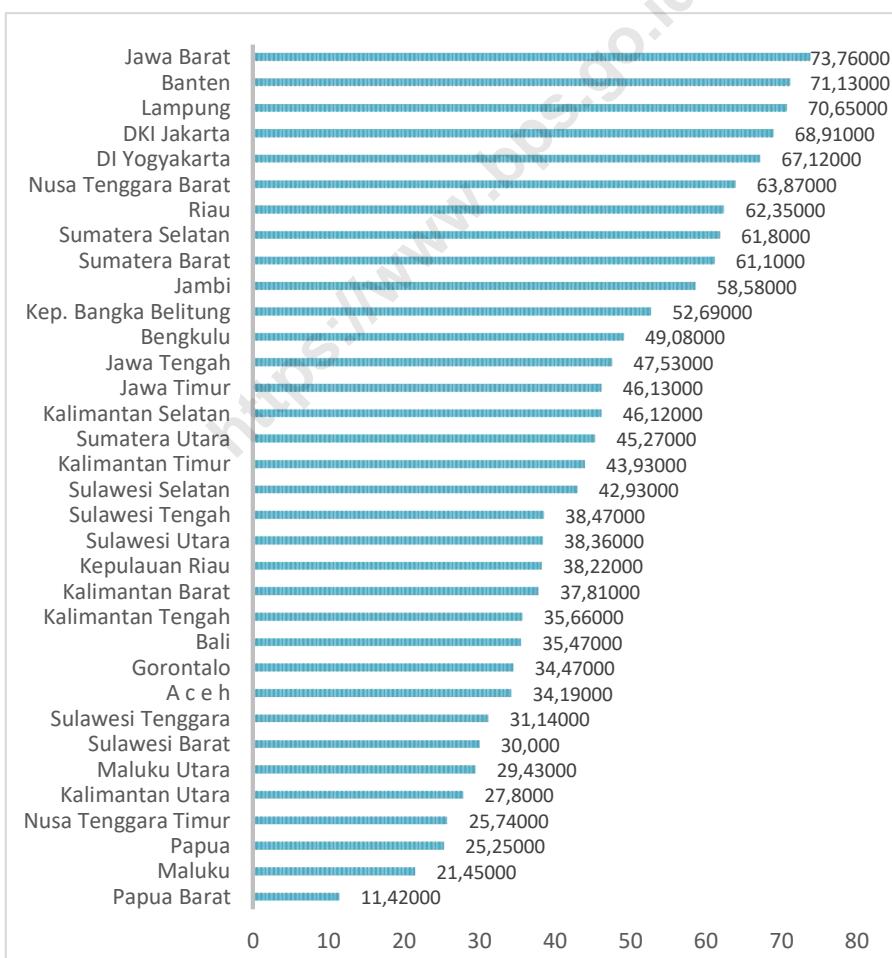


Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Untuk kejadian pencurian seperti yang disajikan pada Gambar 2.24, rentang persentase Desa/Kelurahan yang mengalami pencurian selama tahun 2018 berada pada kisaran 11,42 – 73,76 persen dari total Desa/Kelurahan di masing-masing provinsi.

Pada 2014 lebih dari 73 persen Desa/Kelurahan di Jawa Barat pernah mengalami kejadian pencurian (tanpa kekerasan).

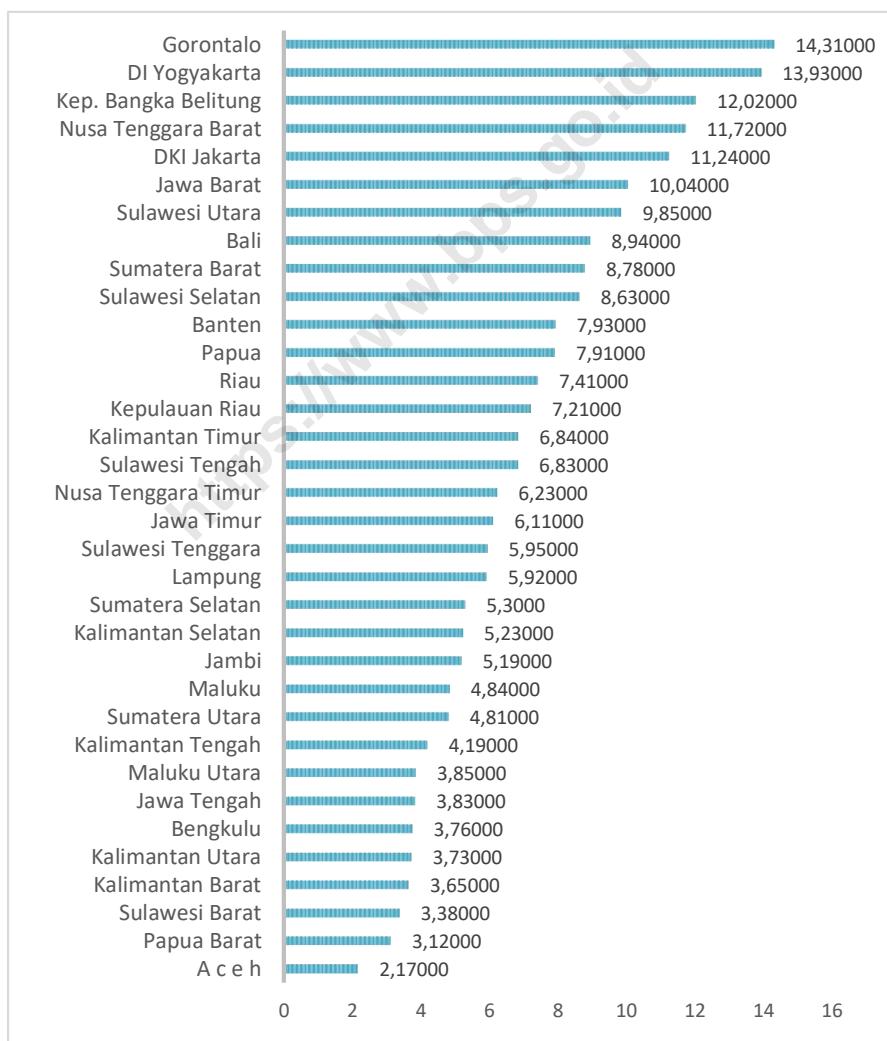
Gambar 2.24 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber Pendataan Potensi Desa, BPS

Tiga provinsi yang persentase Desa/Kelurahannya yang pernah terjadi kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) terbesar (perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah Desa/Kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Jawa Barat (73,76 persen), Banten (71,13 persen), dan Lampung (70,65 persen).

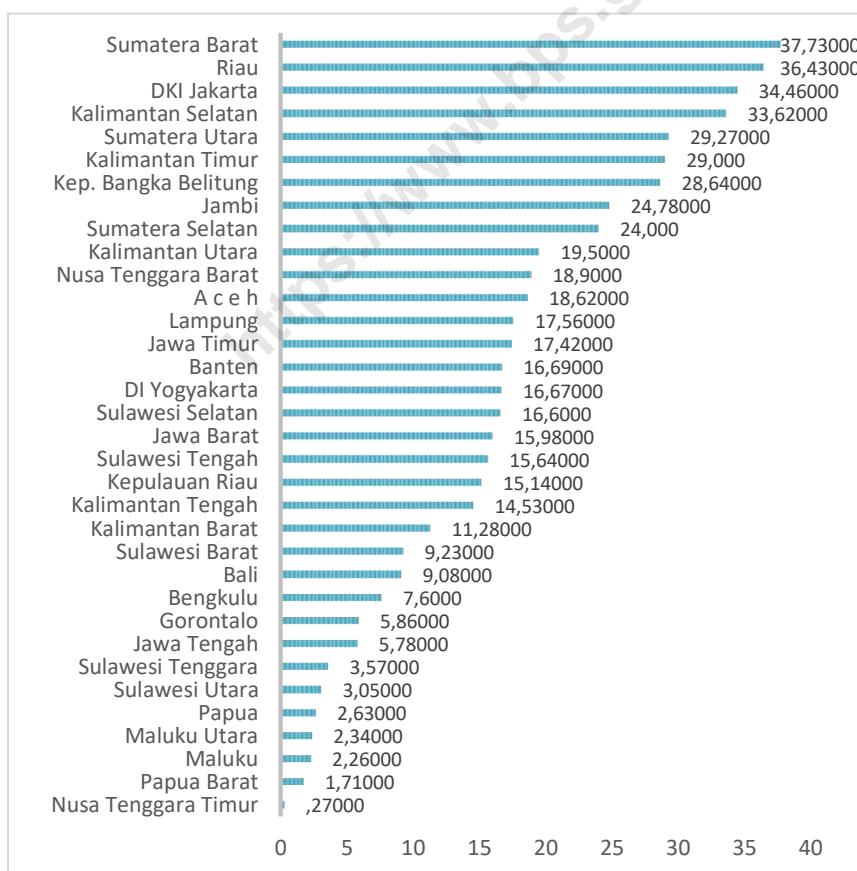
Gambar 2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Untuk kejadian penganiayaan seperti yang disajikan pada Gambar 2.25, rentang persentase Desa/Kelurahan yang mengalami penganiayaan selama tahun 2018 berada pada kisaran 2,17 – 14,31 persen dari total Desa/Kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi yang persentase Desa/Kelurahannya yang pernah terjadi kejadian penganiayaan terbesar (perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah Desa/Kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Gorontalo (14,31 persen), DI Yogyakarta (13,93 persen), dan Kep. Bangka Belitung (12,02 persen).

Gambar 2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Dari keseluruhan jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2018 di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu jenis peristiwa yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.26, kejadiannya telah merebak di sejumlah Desa/Kelurahan pada semua provinsi di Indonesia, seperti halnya kejadian kejahatan pencurian dan penganiayaan.

Cakupan kejadian kejahatan narkoba pada hampir keseluruhan provinsi selama periode tahun 2018 berada pada kisaran 0,27 – 37,73 persen dari total Desa/Kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi yang persentase Desa/Kelurahannya yang pernah terjadi kejahanan penyalahgunaan dan peredaran narkoba terbesar (perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian dibagi total jumlah Desa/Kelurahan di satu provinsi), berturut-turut adalah Sumatera Barat (37,73 persen), Riau (36,43 persen), dan DKI Jakarta (34,46 persen).

Konflik Massal

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir. Aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat menganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekohan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha

untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

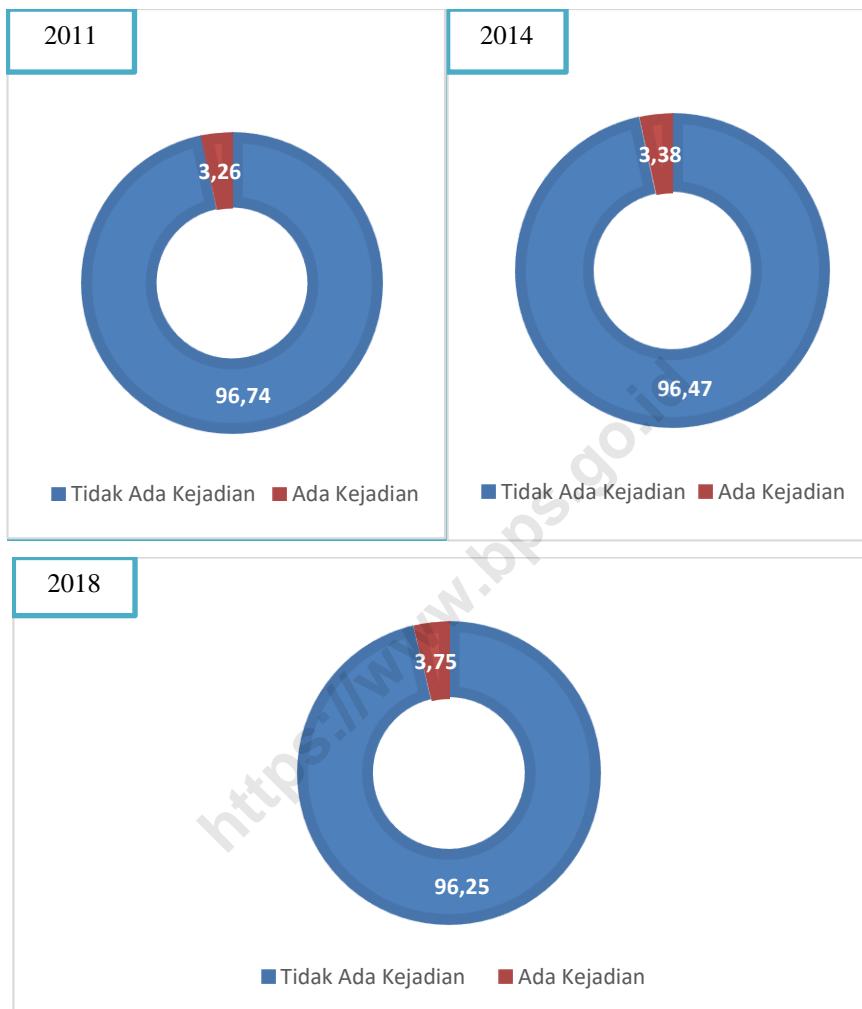
Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh Desa/Kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase Desa/Kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Gambar 2.27, hasil Podes 2011, 2014, dan 2018 memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase Desa/Kelurahan yang mengalami perkelahian massal.

Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir terus meningkat dari 3,26 persen Desa/Kelurahan pada tahun 2011 menjadi 3,38 persen Desa/Kelurahan pada tahun 2014, kemudian pada 2018 meningkat kembali menjadi 3,75 persen pada 2018.

Hasil Podes memperlihatkan kecenderungan peningkatan persentase Desa/Kelurahan yang mengalami perkelahian massal.

Gambar 2.27 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal. Tahun 2011 - 2018



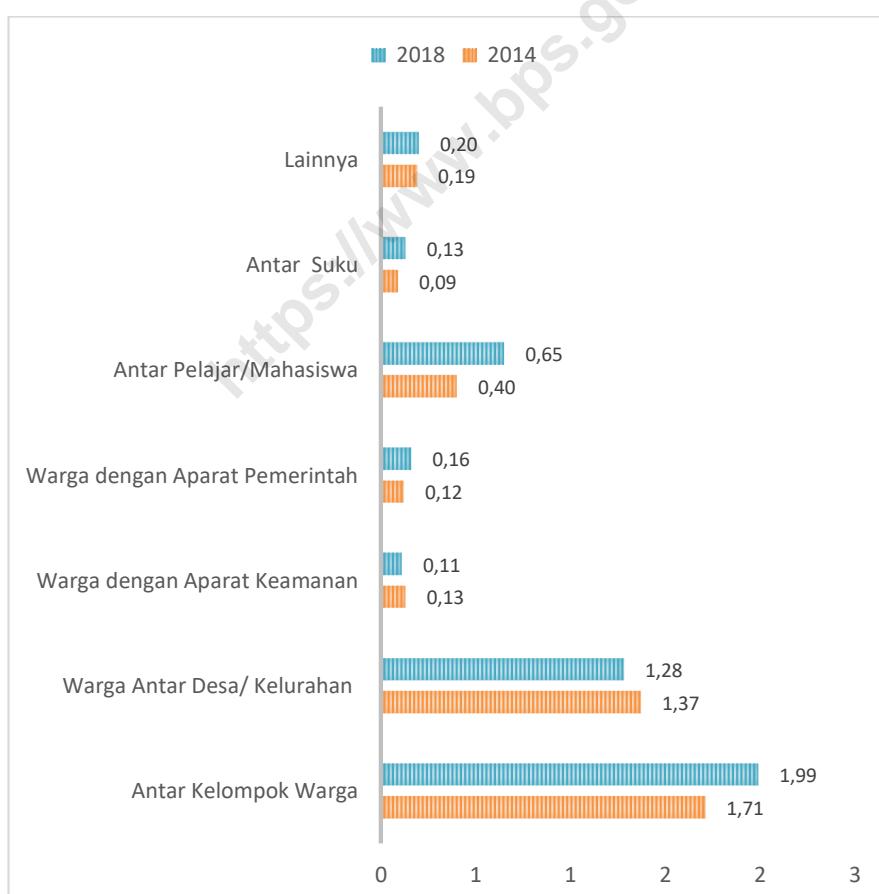
Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar Desa/Kelurahan.

Jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup dalam Podes 2018 meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar Desa/Kelurahan, perkelahian warga dengan aparat

keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar dan perkelahian antar suku. Dari Gambar 2.28 nampak bahwa dari hasil Podes 2018 perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar Desa/Kelurahan. Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga sebesar 1,71 persen di tahun 2014 meningkat menjadi 1,99 persen di tahun 2018.

Gambar 2.28 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipennya. Tahun 2014 dan 2018



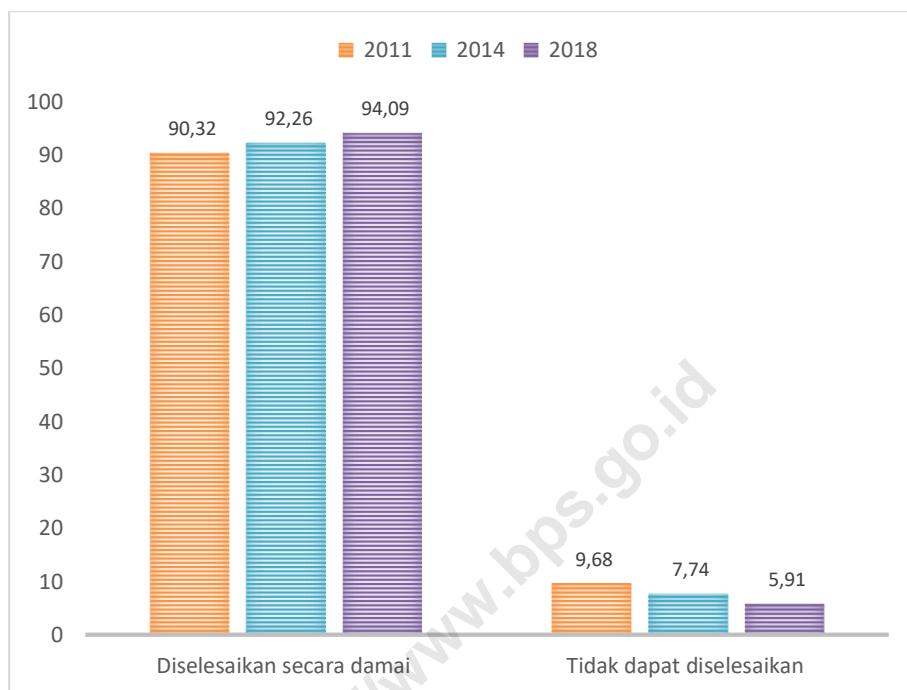
Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang menganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi (Gurr, dalam Soetopo, 2001): (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Data Podes 2011, 2014, dan 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 90 persen) dari insiden perkelahian massal yang sering terjadi sudah dapat diselesaikan (Gambar 2.29). Namun, masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik massal yang terjadi di wilayah Desa/Kelurahan tempat tinggalnya. Sehingga sekitar 5,91 persen konflik yang belum dapat diselesaikan segera menemukan solusinya.

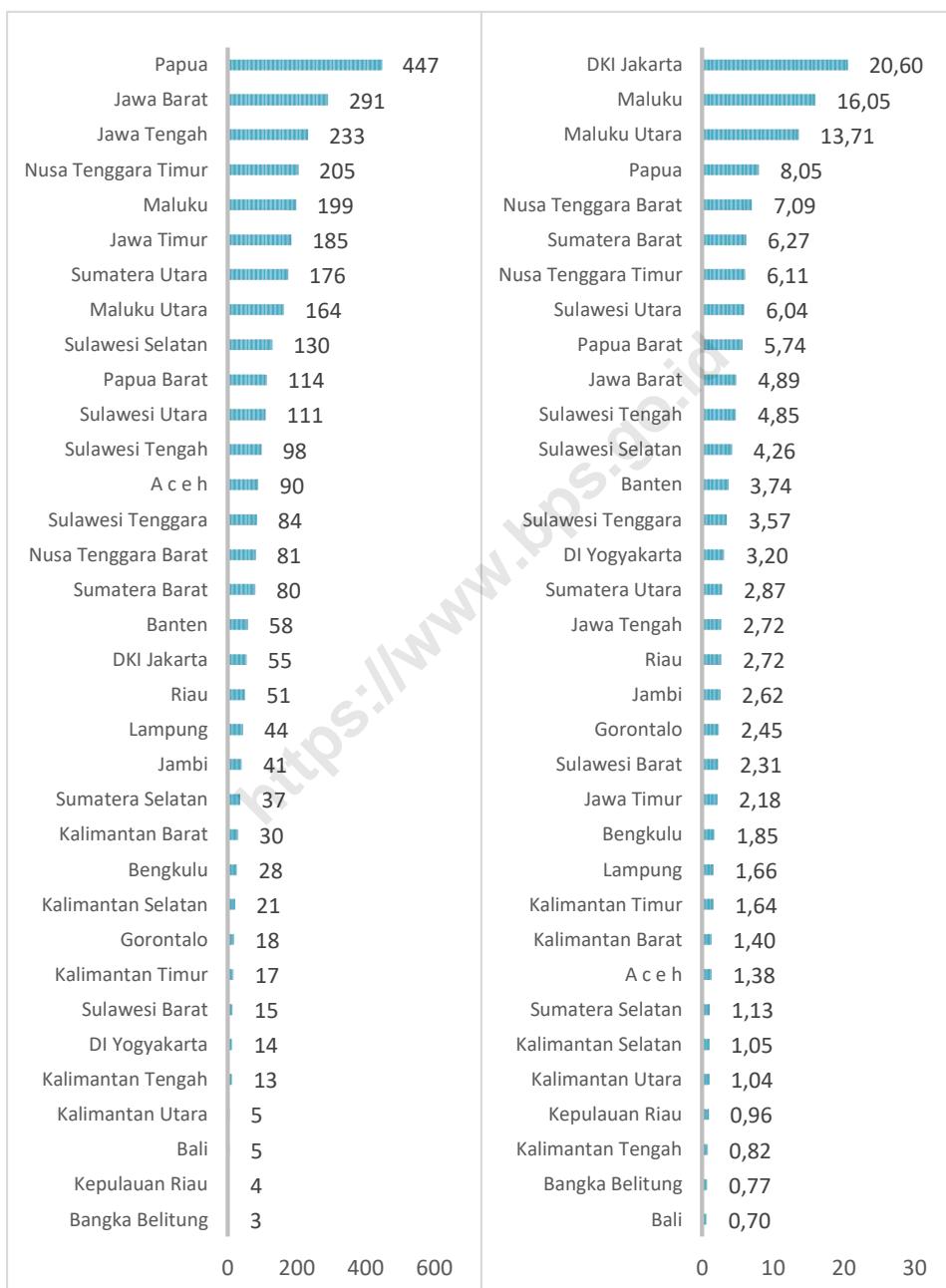
Gambar 2.29. Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya. Tahun 2014 dan 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam perkembangan kejadian perkelahian massal. Selama periode 2018, Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara merupakan provinsi dengan persentase terbesar Desa/Kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir. Sementara dari jumlahnya, provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian adalah Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Gambar 2.30. Jumlah Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

BAB 03

KORBAN KEJAHATAN



Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan **meningkat** dari 1,08% (2017) menjadi **1,11% (2018)**

Provinsi dengan korban kejahatan tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2018/2019



Tahun 2018, 63.07% korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki, persentase ini cenderung stabil dibanding 2017, yaitu 63.25%

Persentase **korban kejahatan** banyak terjadi pada kalangan dewasa dibanding anak-anak. Persentase meningkat dari 92.89 (2017) menjadi 93.43% (2018)



Bab 3

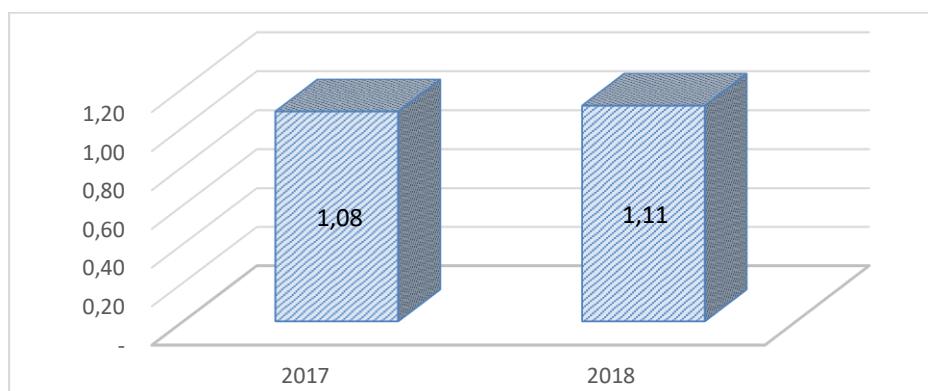
KORBAN KEJAHATAN

Penduduk Korban Kejahatan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan, kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode dua tahun terakhir. Data yang diperoleh berasal dari salah satu bagian Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni pada Blok IX Susenas Keterangan Korban kejahatan. Susenas 2018 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2017. Sedangkan Susenas 2019 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2018.

Survei Korban Kejahatan (*victimization survey's*) yang ideal dirancang khusus untuk mencatat perkiraan viktimsasi yang ditunjukkan oleh sampel representatif populasi (Hagan, 1989).

Gambar 3. 1. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2017–2018

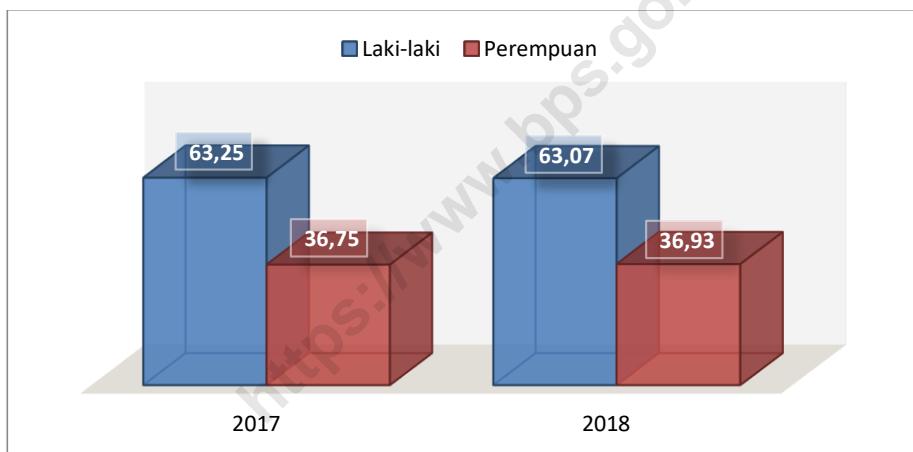


Sumber : Susenas Kor Blok IX

Gambar 3.1 menunjukkan pada kurun waktu tahun 2018, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,11 persen dari populasi penduduk Indonesia. Persentase tersebut meningkat dari pengalaman masyarakat pada kurun waktu 2017 sebesar 1,08 persen.

Selama periode 2017, sekitar 1,08 persen dari total penduduk Indonesia mengalami tindak kejahatan

Gambar 3.2. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017–2018



Sumber : Susenas Kor Blok IX

Keterangan: Populasi pada gambar ini adalah penduduk korban kejahatan

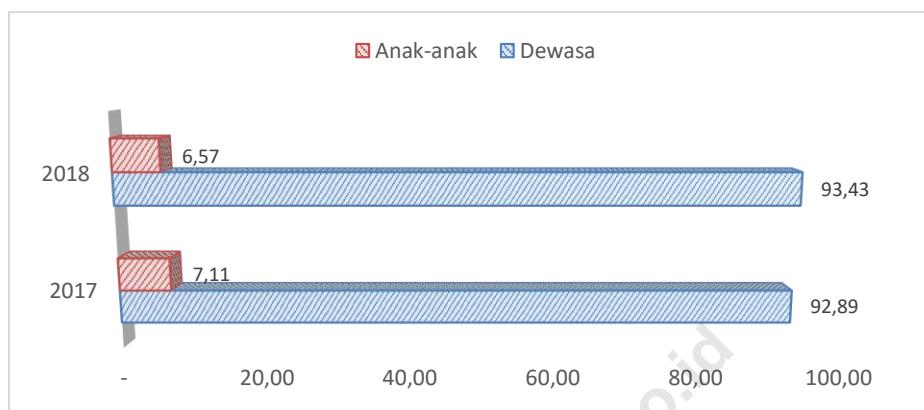
Dari 1,11 persen penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada Gambar 3.2, menunjukkan pada 2017 dan 2018 mayoritas penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Pada 2018, persentase perempuan yang mengalami kejahatan sedikit mengalami peningkatan.

Selama periode 2017-2018, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa.

Sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah laki-laki.

Selama periode 2017-2018, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa perkembangan persentase penduduk korban kejahatan dari kelompok umur dewasa cenderung stabil, yakni sebesar 92,89 persen pada 2017. Kemudian pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan menjadi 93,43 persen.

**Gambar 3.3. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia
Tahun 2017–2018**

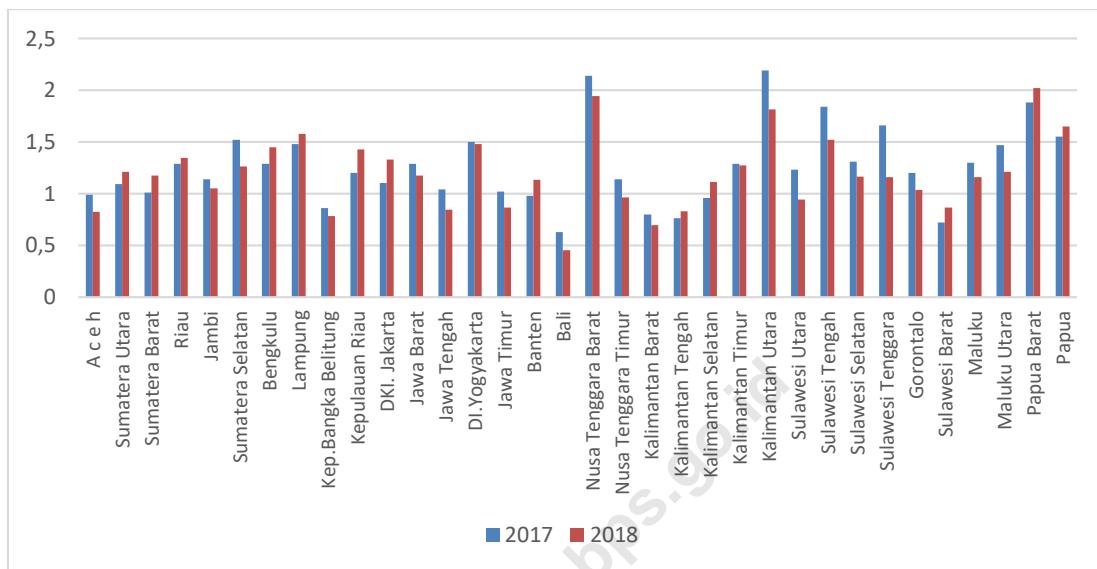


Sumber : Susenas Kor Blok IX

Keterangan: Populasi pada gambar ini adalah penduduk korban kejahatan

Pada periode tahun 2017-2018, penduduk yang menjadi korban kejahatan persentasenya menurun di 21 provinsi, yakni Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara (lihat gambar 3.4). Dari seluruh provinsi yang mengalami penurunan pada 2018, paling besar terjadi di provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, Tahun 2017–2018

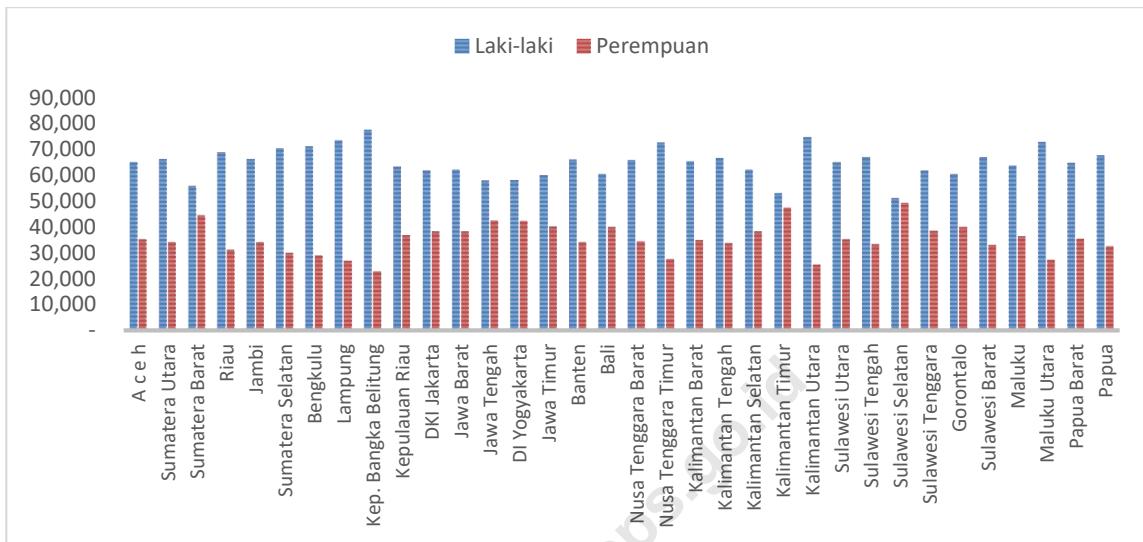


Sumber : Susenas Kor Blok IX

Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode tahun 2018 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di sebagian besar provinsi lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

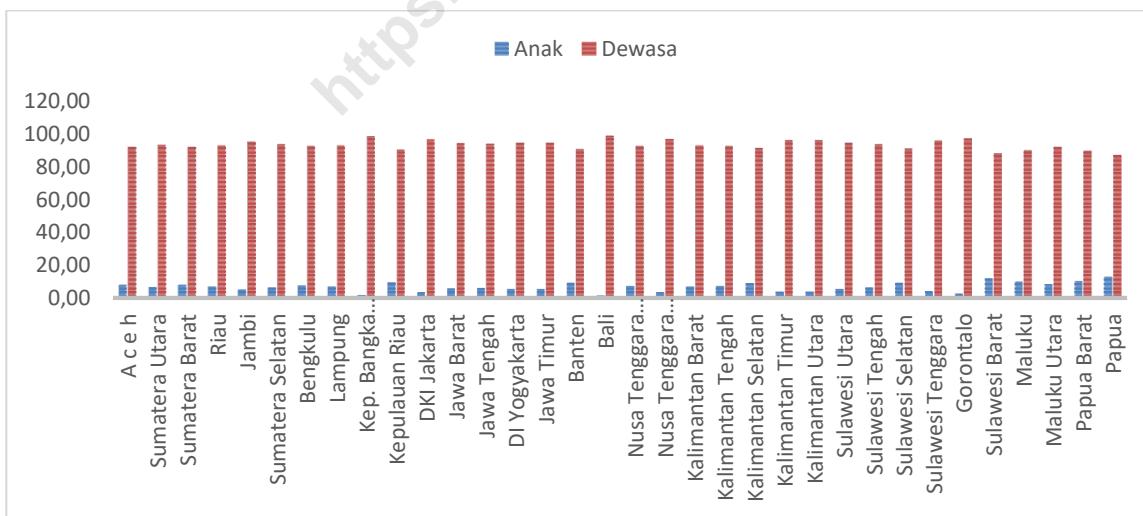
Pada tahun 2018, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah provinsi Sulawesi Selatan (48,94 persen), Kalimantan Timur (47,08 persen) dan Sumatera Barat (44,27 persen).

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Susenas Kor Blok IX

Gambar 3.6. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Usia dan Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Susenas Kor Blok IX

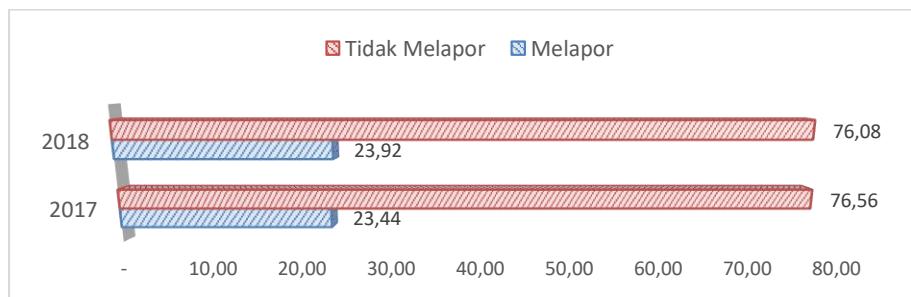
Sementara itu, komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dari penduduk dewasa (lihat Gambar 3.6). Pada tahun 2018, persentase penduduk korban kejahatan yang termasuk kelompok anak-anak terbesar berturut-turut adalah provinsi Papua (12,96), Sulawesi Barat (12,00), dan Papua Barat (10,45).

Tingkat Pelaporan (*Reporting Rate*)

Data Susenas menunjukkan tingkat persentase melapor ke Polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2017–2018, secara total (Gambar 3.7) persentase penduduk Indonesia yang pernah mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkan ke polisi kejadian yang dialaminya tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2017 sebesar 23,44 persen, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 23,92 persen. Jumlah masyarakat yang melapor ketika mengalami kejadian masih rendah. Dengan kata lain, data registrasi polisi masih belum menggambarkan keseluruhan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat. Data-data ini menunjukkan angka gelap kejahatan (*dark number*) masih relatif tinggi.

Pada 2018, kurang dari 25 persen masyarakat melaporkan ke Polisi kejadian kejahatan yang dialaminya.

Gambar 3.7. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Tahun 2017–2018



Sumber : Susenas Kor Blok IX

https://www.bps.go.id

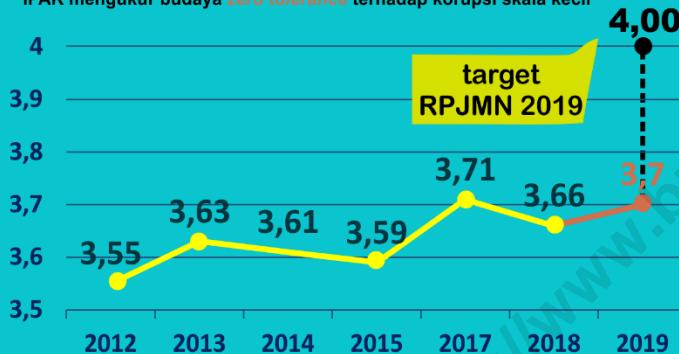
4

INDIKATOR SDGS

TERKAIT KEAMANAN

PERKEMBANGAN IPAK 2012-2019

IPAK mengukur budaya *zero tolerance* terhadap korupsi skala kecil



IPAK 2019 adalah **3,70**
masih terpaut 0,30
dari target RPJMN 2019



PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRI DI AREA TEMPAT



53,32

Tahun 2017, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya secara nasional adalah 53,32 persen

JUMLAH KEJAHATAN PEMBUNUHAN TAHUN 2018



1.024

Tahun 2018, jumlah kejadian kejahatan pembunuhan di Indonesia *menurun* menjadi 1.024 kejadian

PROPORSI KORBAN KEKERASAN MELAPOR POLISI



46,40

Tahun 2018, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan yang melapor polisi *meningkat* menjadi 46,40 persen

PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN

0,08

Tahun 2018, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan *menurun* menjadi 0,08 persen



Bab 4

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's) TERKAIT KEAMANAN

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/SDG's yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target.

Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Dari 169 target yang ada, terdapat beberapa indikator yang terkait keamanan, diantaranya sebagai berikut:

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian Republik Indonesia.	Tahunan.
16.1.3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejadian kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).	Tahunan.
16.1.4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik	Tiga Tahunan.

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
16.3.1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Susenas Badan Pusat Statistik (BPS).	Tahunan.
16.5.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).	Tahunan.

Target 16.1.1.(a). Jumlah kejadian pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Kasus kejadian pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejadian tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua-Kejahatan, Bab XIX tentang kejadian terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian. Jumlah kasus kejadian pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Pada tahun 2015 tercatat 1.491 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kejadian, pada 2017 menjadi 1.150 kejadian, dan pada tahun 2018 menjadi 1.024 kejadian.

Di tingkat nasional dan internasional, indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejadian kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

Target 16.1.3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampukan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, penggeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampukan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak

diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Gambar 4.1 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, Tahun 2015 - 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.1, pada tahun 2018 tercatat proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan menurun menjadi 0,08 persen, menurun dari 0,09 persen pada tahun 2017. Cara perhitungannya adalah jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100 persen.

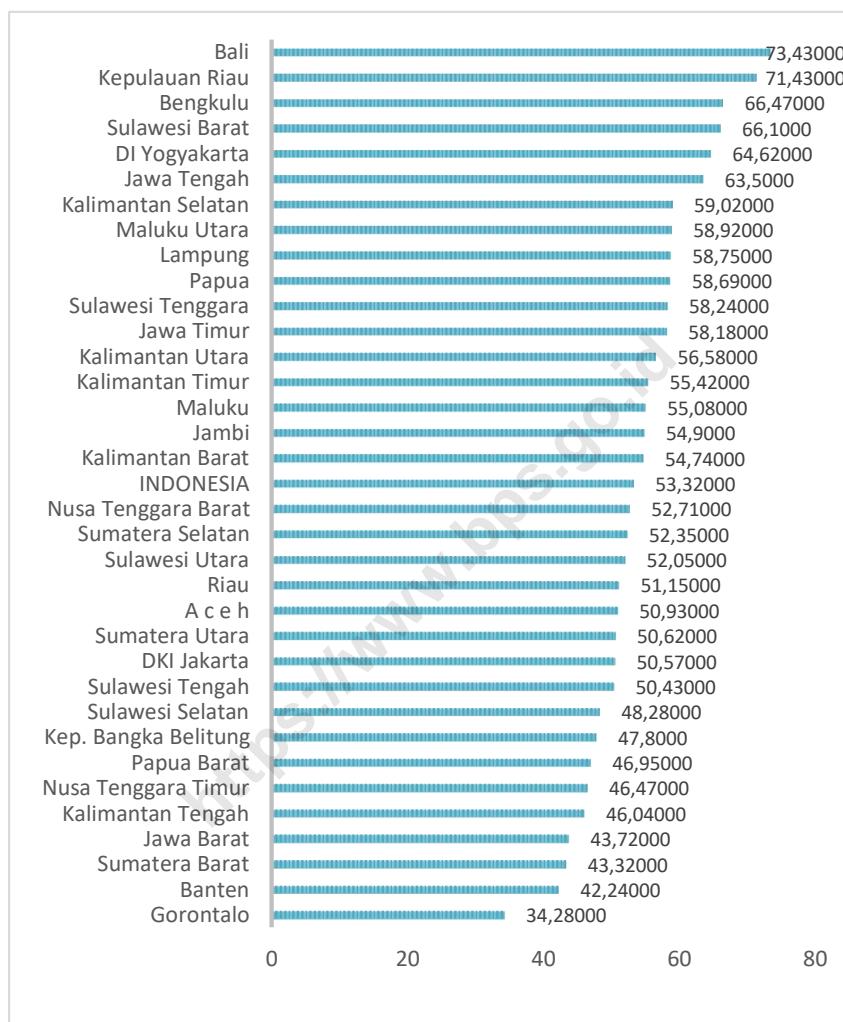
Target 16.1.4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Rasa aman adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak akan kemerdekaan dan keamanan badan.

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) khususnya pada target 16.1.4 yakni proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Tujuannya adalah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rasa aman diukur dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun.

Berdasarkan Gambar 4.2. pada tahun 2017 menunjukkan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya secara nasional sekitar 53,32 persen. Dengan kata lain, hampir separuh masyarakat masih merasa khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017



Sumber : Modul Hansos, Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam persentase Rumah Tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2017, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase terbesar masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Sementara provinsi dengan persentase terkecil adalah Provinsi Gorontalo.

Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan Desa/Kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Indonesia (pendataan Potensi Desa). Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

Pendataan Potensi Desa (Podes) menanyakan upaya warga desa untuk menjaga keamanan lingkungan dalam setahun terakhir, di antaranya dengan cara membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan (kamling), menambah jumlah anggota hansip/linmas, dan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.

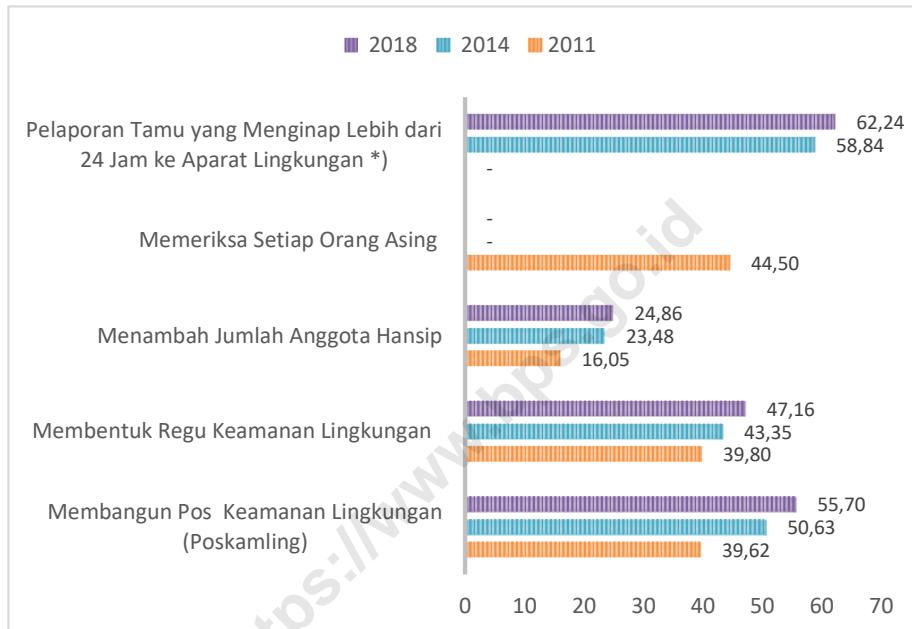
Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 dan 2014, terjadi peningkatan jumlah dan persentase Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada 2018.

Lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu (1x24 jam) dan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling).

Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2018 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, membangun pos keamanan lingkungan (poskamling), membentuk regu keamanan lingkungan, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Pada 2018 lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia

melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu dan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling).

Gambar 4. 3. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018



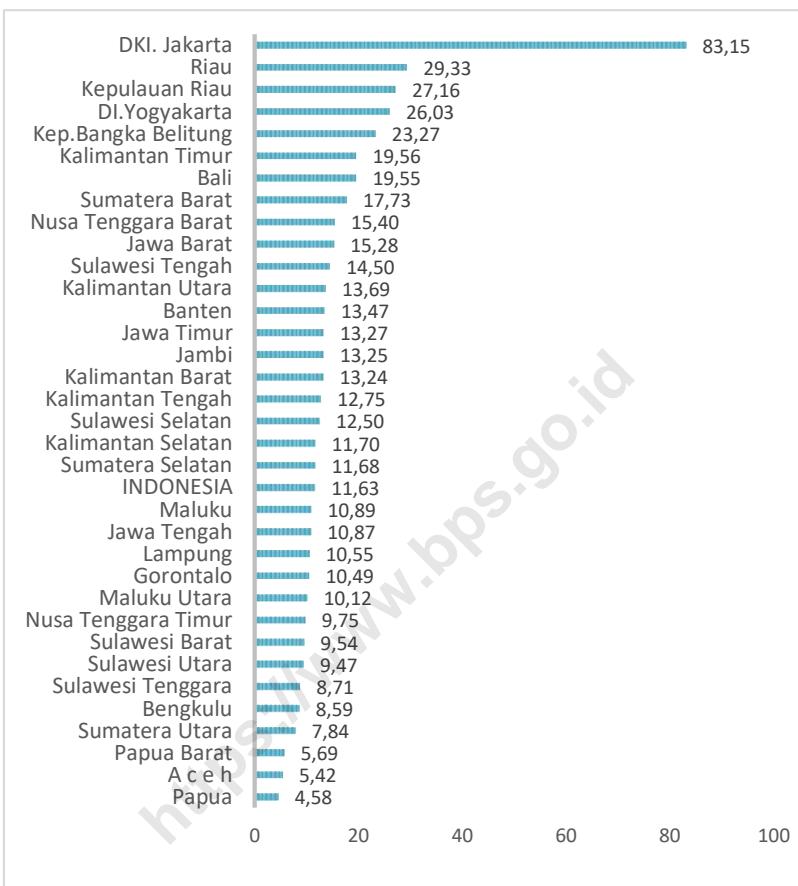
Sumber : Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Keterangan : *) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut provinsi selama periode 2011-2018 disajikan pada tabel lampiran. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) meningkat hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Pada 2018 hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda).

Gambar 4.4. Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018



Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Selain dari aspek warga, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat berwenang dalam hal ini adalah Polisi. Data Podes menyajikan Desa/Kelurahan yang pada wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi. Seperti yang disajikan pada Gambar 4.4. menunjukkan hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Namun, dari sekitar 88,37 persen Desa/Kelurahan yang tidak ada pos polisi sekitar 80,75 persen diantaranya menyatakan akses ke Pos Polisi terdekat cenderung mudah dan mudah sekali.

Target 16.3.1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Keterpilahan data berdasar jenis kelamin akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

Gambar 4.5 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi, Tahun 2015 - 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Seperti yang disajikan pada Gambar 4.5, pada tahun 2018 tercatat proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan meningkat menjadi 46,40 persen. Cara perhitungannya adalah Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100% (Sebagai catatan, tahun 2015 dan 2016 merupakan pelaporan kejahatan untuk semua jenis kejahatan).

Target 16.5.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi. Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2019, SPAK dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 9.952 rumah tangga. Oleh karena itu, analisis mengenai perilaku anti korupsi hanya dapat dilakukan sampai level nasional.

Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Gambar 4.6. Perkembangan IPAK Tahun 2012 – 2019



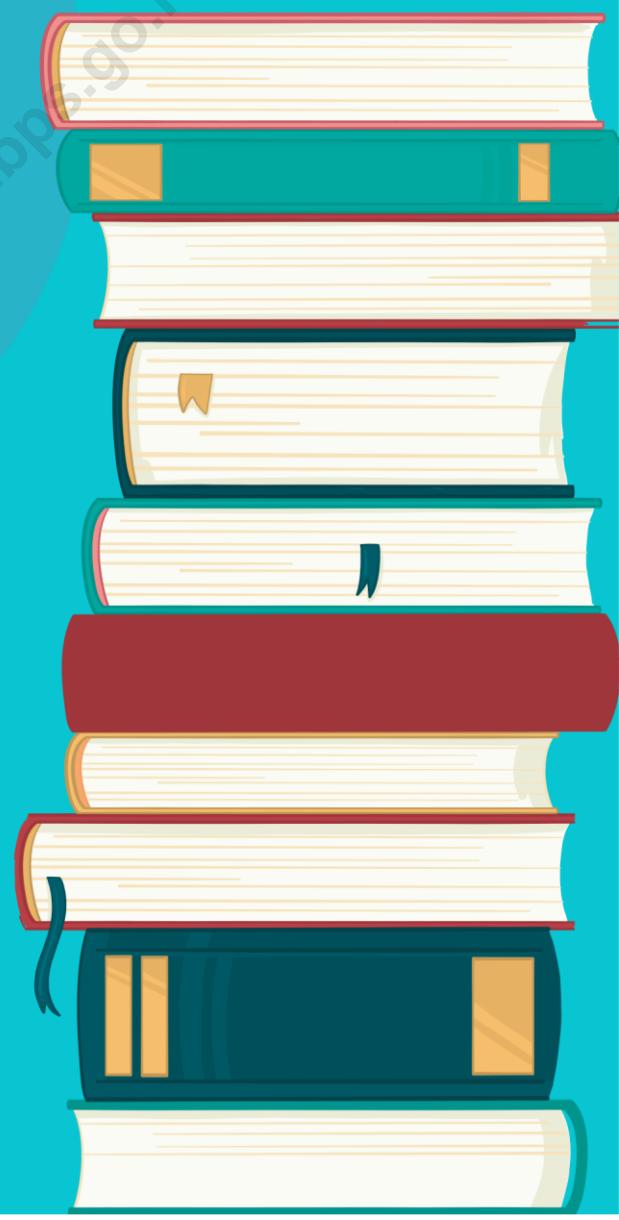
Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012–2015 dan 2017–2019

Terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2012 sampai dengan 2018, tetapi pada tahun 2019 Indeks Persepsi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan menurunnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Sebaliknya, pada indeks pengalaman, terjadi fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, hingga mencapai momen tertinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3,65. Sejalan dengan indeks

pengalaman, nilai IPAK juga menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2019, nilai IPAK sebesar 3,70. Angka ini lebih tinggi dibanding IPAK 2018 (3,66).

https://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta : BPS.
- Department of Statistics Malaysia. (2018). Crime Statistics, Malaysia, 2018. <https://www.dosm.gov.my>
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). *Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Hagan, Frank E. (1989). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2015). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2014. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2016). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2015. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2017). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2016. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2018). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2017. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2019). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2018. Jakarta: Mabes POLRI.

- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Mustofa, Muhammad. (2011). Kriminologi Edisi 2 (Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Sianturi, L.M. (1985). Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang : Universitas Negeri Malang.
- UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0*.

CATATAN TEKNIS



CATATAN TEKNIS

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2015, 2016, dan 2017.
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2017 dan 2018.
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2008, Podes 2011, dan Podes 2014.

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017 dan 2018

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demi penyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan instrumen dalam instrumen kor Susenas. Sebelumnya hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis

kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya.

Data Susenas 2018 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2017. Sedangkan Data Susenas 2019 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2018.

Statistik Podes (Potensi Desa) 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh Desa/Kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat Desa/Kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di Desa/Kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluhan pertanian (PPL), dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang Desa/Kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah Desa/Kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan

struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di Desa/Kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, Bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antar warga desa maupun antar desa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan Evaluasi Data Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

a.1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

- a.2. **Peristiwa yang dilaporkan** ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
- a.3. **Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah :
- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum).
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.

- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya

perampukan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi:

Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu Desa/Kelurahan/Nagari.

Perkelahian warga antar Desa/Kelurahan adalah perkelahian antara warga Desa /Kelurahan/Nagari dengan warga Desa/Kelurahan/Nagari lainnya.

Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga Desa/Kelurahan/Nagari dengan aparat keamanan.

Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga Desa/Kelurahan/Nagari dengan aparat pemerintah.

Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di Desa/Kelurahan/Nagari.

Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$



LAMPIRAN TABEL



stat



https://www.bps.go.id

DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2.1.1. Indikator Kriminalitas Nasional, Tahun 2016-2018

Jenis Indikator (1)	Tahun		
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	357 197	336 652	294 281
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	209 821	212 058	191 112
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	58,74	62,99	64,94
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	00.01'28"	0.01'33"	0.01'47"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	140	129	113

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Tahun 2018

No	Polda	Jumlah Kejahatan	No	Polda	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Metro Jaya ¹⁾	34 655	1	Sulawesi Utara	416
2	Sumatera Utara	32 922	2	Papua Barat	380
3	Jawa Timur	26 295	3	Sulawesi Tengah	316
4	Sulawesi Selatan	21 498	4	Sulawesi Selatan	255
5	Jawa Barat	16 209	5	Sumatera Barat	243
6	Sumatera Selatan	13 558	6	Gorontalo	243
7	Sumatera Barat	12 953	7	Sumatera Utara	231
8	Sulawesi Utara	10 247	8	Papua	224
9	Sulawesi Tengah	9 379	9	Jambi	180
10	Jawa Tengah	9 127	10	DI Yogyakarta	179
11	Lampung	8 963	11	Kalimantan Timur	176
12	Aceh	8 758	12	Bengkulu	175
13	Papua	7 311	13	Aceh	169
14	Riau	7 246	14	Sumatera Selatan	164
15	DI Yogyakarta	6 731	15	Kepulauan Riau	164
16	Nusa Tenggara Barat	6 451	16	Maluku	158
17	Jambi	6 313	17	Sulawesi Barat (2)	144
18	Kalimantan Timur	6 287	18	Kep. Bangka Belitung	143
19	Nusa Tenggara Timur	6 257	19	Kalimantan Selatan	138
20	Kalimantan Barat	5 814	20	Metro Jaya ¹⁾	137
21	Kalimantan Selatan	5 699	21	Nusa Tenggara Barat	130
22	Banten	3 623	22	Nusa Tenggara Timur	118
23	Papua Barat	3 475	23	Kalimantan Barat	118
24	Kepulauan Riau	3 409	24	Riau	109
25	Bengkulu	3 389	25	Lampung	108
26	Bali	3 212	26	Kalimantan Tengah	102
27	Gorontalo	2 836	27	Bali	76
28	Maluku	2 751	28	Jawa Timur	67
29	Kalimantan Tengah	2 667	29	Maluku Utara	60
30	Kep. Bangka Belitung	2 048	30	Kalimantan Utara (3)	57
31	Sulawesi Barat (2)	1 817	31	Banten	54
32	Sulawesi Tenggara	1 263	32	Sulawesi Tenggara	49
33	Maluku Utara	722	33	Jawa Barat	42
34	Kalimantan Utara (3)	396	34	Jawa Tengah	27
	INDONESIA	294 281		INDONESIA	113

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Tabel 2.1.3 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2016-2018

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (4)
A c e h	9 646	8 885	8 758
Sumatera Utara	37 102	39 867	32 922
Sumatera Barat	14 921	13 205	12 953
Riau	8 520	6 869	7 246
Jambi	5 904	9 531	6 313
Sumatera Selatan	9 124	15 728	13 558
Bengkulu	203 687	4 867	3 389
Lampung	10 485	11 089	8 963
Kep. Bangka Belitung	2 094	1 931	2 048
Kepulauan Riau	4 885	3 673	3 409
Metro Jaya ¹⁾	43 842	34 767	34 655
Jawa Barat	29 351	25 183	16 209
Jawa Tengah	14 353	12 033	9 127
DI Yogyakarta	8 348	7 251	6 731
Jawa Timur	28 902	34 598	26 295
Banten	4 570	3 692	3 623
Bali	4 764	3 589	3 212
Nusa Tenggara Barat	7 779	8 132	6 451
Nusa Tenggara Timur	8 713	6 729	6 257
Kalimantan Barat	7 311	6 020	5 814
Kalimantan Tengah	7 211	2 699	5 699
Kalimantan Selatan	3 712	6 578	2 667
Kalimantan Timur	8 896	9 149	6 287
Kalimantan Utara ³⁾	-	-	396
Sulawesi Utara	9 923	7 981	10 247
Sulawesi Tengah	9 602	10 240	9 379
Sulawesi Selatan ²⁾	15 071	21 616	21 498
Sulawesi Tenggara	3 756	2 866	1 263
Gorontalo	3 763	3 099	2 836
Sulawesi Barat	-	1 841	1 817
Maluku	2 559	3 086	2 751
Maluku Utara	1 096	789	722
Papua Barat	3 123	2 284	3 475
Papua	8 103	6 785	7 311
INDONESIA	357 197	336 652	294 281

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Tabel 2.1.4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2016-2018

Kepolisian Daerah (1)	2016 (2)	Tahun 2017 (3)	2018 (4)
A c e h	4 134	2 416	3 352
Sumatera Utara	23 167	26 829	22 443
Sumatera Barat	6 433	5 662	5 864
Riau	4 565	3 732	3 743
Jambi	2 869	6 214	4 347
Sumatera Selatan	5 051	10 514	10 144
Bengkulu	8 853	2 420	2 833
Lampung	7 261	7 638	6 439
Kep. Bangka Belitung	883	1 252	1 137
Kepulauan Riau	2 295	2 068	2 037
Metro Jaya ¹⁾	27 983	28 075	30 577
Jawa Barat	13 629	14 375	12 150
Jawa Tengah	12 994	11 291	6 980
DI Yogyakarta	3 427	2 873	2 486
Jawa Timur	18 466	18 915	15 446
Banten	2 715	2 264	2 223
Bali	3 036	2 850	2 407
Nusa Tenggara Barat	6 334	4 257	3 811
Nusa Tenggara Timur	4 302	4 776	4 400
Kalimantan Barat	4 413	4 345	4 478
Kalimantan Tengah	5 666	2 306	4 114
Kalimantan Selatan	2 060	5 005	2 025
Kalimantan Timur	5 522	6 387	4 763
Kalimantan Utara (3)	-	-	277
Sulawesi Utara	7 329	5 621	5 507
Sulawesi Tengah	3 885	4 787	5 289
Sulawesi Selatan	11 938	13 416	11 521
Sulawesi Tenggara	1 723	1 993	879
Gorontalo	1 391	2 830	1 829
Sulawesi Barat (2)	-	1 029	1 021
Maluku	540	686	667
Maluku Utara	506	352	405
Papua Barat	1 296	231	955
Papua	5 155	4 649	4 563
INDONESIA	209 821	212 058	191 112

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Tabel 2.1.5 Persentase Penyelesaian Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018

Kepolisian Daerah (1)	2016 (2)	Tahun	
		2017 (3)	2018 (4)
A c e h	42,86	27,19	38,27
Sumatera Utara	62,44	67,30	68,17
Sumatera Barat	43,11	42,88	45,27
Riau	53,58	54,33	51,66
Jambi	48,59	65,20	68,86
Sumatera Selatan	53,60	66,85	74,82
Bengkulu	43,47	49,72	83,59
Lampung	69,25	68,88	71,84
Kep. Bangka Belitung	42,17	64,84	55,52
Kepulauan Riau	46,98	56,30	59,75
Metro Jaya ¹⁾	63,83	80,75	88,23
Jawa Barat	46,43	57,08	74,96
Jawa Tengah	90,53	93,83	76,48
DI Yogyakarta	41,05	39,62	36,93
Jawa Timur	63,89	54,67	58,74
Banten	59,41	61,32	61,36
Bali	63,73	79,41	74,93
Nusa Tenggara Barat	81,42	52,35	59,08
Nusa Tenggara Timur	55,06	70,98	70,32
Kalimantan Barat	60,36	72,18	77,02
Kalimantan Tengah	78,57	85,44	72,19
Kalimantan Selatan	55,50	76,09	75,93
Kalimantan Timur	62,07	69,81	75,76
Kalimantan Utara ³⁾	-	-	69,95
Sulawesi Utara	73,86	70,43	53,74
Sulawesi Tengah	40,46	46,75	56,39
Sulawesi Selatan ²⁾	79,21	62,07	53,59
Sulawesi Tenggara	45,87	69,54	69,60
Gorontalo	36,97	91,32	64,49
Sulawesi Barat	-	55,89	56,19
Maluku	21,10	22,23	24,25
Maluku Utara	46,17	44,61	56,09
Papua Barat	41,50	10,11	27,48
Papua ²⁾	63,62	68,52	62,41
INDONESIA	58,74	62,99	64,94

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Tabel 2.1.6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2016-2018

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(3)	(4)	(5)
A c e h	00.54'29"	0.59'09"	01.00'00"
Sumatera Utara	00.14'09"	0.13'11"	00.15'57"
Sumatera Barat	00.35'13"	0.39'48"	00.40'34"
Riau	01.01'41"	1.16'31"	01.12'32"
Jambi	01.29'01"	0.55'08"	01.23'15"
Sumatera Selatan	00.55'46"	0.33'25"	00.38'46"
Bengkulu	00.25'48"	1.47'59"	02.35'05"
Lampung	00.50'07"	0.47'23"	00.58'38"
Kep. Bangka Belitung	04.11'00"	4.32'11"	04.16'38"
Kepulauan Riau	01.47'35"	2.23'05"	02.34'10"
Metro Jaya ¹⁾	00.11'59"	0.15'07"	00.15'09"
Jawa Barat	00.17'54"	0.20'52"	00.32'25"
Jawa Tengah	00.36'37"	0.43'40"	00.57'35"
DI Yogyakarta	01.02'57"	1.12'29"	01.18'05"
Jawa Timur	00.18'11"	0.15'11"	00.19'59"
Banten	01.55'00"	2.22'21"	02.25'04"
Bali	01.50'19"	2.26'26"	02.43'37"
Nusa Tenggara Barat	01.07'33"	1.04'38"	01.21'28"
Nusa Tenggara Timur	01.07'16"	1.18'06"	01.24'00"
Kalimantan Barat	01.11'53"	1.27'18"	01.30'24"
Kalimantan Tengah	01.12'53"	3.14'44"	01.32'13"
Kalimantan Selatan	02.21'35"	1.19'54"	03.17'04"
Kalimantan Timur	00.59'04"	0.57'26"	01.23'36"
Kalimantan Utara (3)	-	-	22.17'16"
Sulawesi Utara	00.52'58"	1.05'51"	00.51'17"
Sulawesi Tengah	00.54'44"	0.51'19"	00.56'02"
Sulawesi Selatan	00.34'52"	0.24'18"	00.24'26"
Sulawesi Tenggara	02.19'56"	3.03'23"	06.56'09"
Gorontalo	02.19'40"	2.49'36"	03.05'19"
Sulawesi Barat (2)	-	4.45'29"	04.49'16"
Maluku	03.25'23"	2.50'19"	03.11'03"
Maluku Utara	10.52'55"	11.06'09"	12.07'58"
Papua Barat	02.48'17"	3.50'07"	02.31'15"
Papua	01.04'51"	1.17'27"	01.11'53"
INDONESIA	00.01'28"	0.01'33"	00.01'47"

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

**Tabel 2.1.7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk
Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2016-2018**

Kepolisian Daerah (1)	Tahun		
	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)
A c e h	194	171	169
Sumatera Utara	258	280	231
Sumatera Barat	283	248	243
Riau	124	103	109
Jambi	298	271	180
Sumatera Selatan	274	190	164
Bengkulu	250	252	175
Lampung	131	134	108
Kep. Bangka Belitung	139	135	143
Kepulauan Riau	236	176	164
Metro Jaya ¹⁾	169	138	137
Jawa Barat	68	65	42
Jawa Tengah	39	35	27
DI Yogyakarta	211	193	179
Jawa Timur	52	88	67
Banten	87	55	54
Bali	106	85	76
Nusa Tenggara Barat	166	164	130
Nusa Tenggara Timur	146	127	118
Kalimantan Barat	147	122	118
Kalimantan Tengah	118	104	138
Kalimantan Selatan	166	160	102
Kalimantan Timur	252	214	176
Kalimantan Utara ³⁾	-	-	57
Sulawesi Utara	343	324	416
Sulawesi Tengah	326	345	316
Sulawesi Selatan ²⁾	166	256	255
Sulawesi Tenggara	135	110	49
Gorontalo	305	265	243
Sulawesi Barat	-	146	144
Maluku	122	177	158
Maluku Utara	69	65	60
Papua Barat	396	146	380
Papua	236	208	224
INDONESIA	140	129	113

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Tabel 2.1.8 Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2016-2018

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Tahun		
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	1 292	1 150	1 024
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	14 468	12 405	11 191
Penganiayaan Ringan	21 155	21 329	20 309
Kekerasan dalam Rumah Tangga	11 083	8 949	8 067
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	1 594	1 394	1 288
Pencabulan	3 653	4 119	3 970
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	374	241	222
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	2 511	2 395	2 323
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	10 726	9 459	7 410
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	272	211	151
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	1 097	1 022	862
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	26 636	28 313	25 269
Pencurian dengan Pemberatan	46 277	36 467	31 571
Pencurian Kendaraan Bermotor	37 871	35 226	27 731
Pengrusakan/Penghancuran Barang	7 926	5 954	4 910
Pembakaran dengan Sengaja	650	468	521
Penadahan	666	614	755
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	39 171	35 412	39 588
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	27 421	19 671	25 543
Penggelapan	20 459	27 418	17 813
Korupsi	1 318	505	496
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	4 297	4 084	3 600

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan di Tahun 2018

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2018)		
	Januari	Februari	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	94	74	73
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	1 016	818	977
Penganiayaan Ringan	1 538	1 629	1 766
Kekerasan dalam Rumah Tangga	711	552	715
Kejahatan terhadap Kesusastraan			
Perkosaan	117	104	116
Pencabulan	431	305	303
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	16	19	22
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	188	152	191
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	2 171	2 073	2 193
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	17	14	9
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	62	56	59
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	2 333	2 315	2 433
Pencurian dengan Pemberatan	2 907	2 923	2 888
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 504	2 445	2 331
Pengrusakan/Penghancuran Barang	457	427	464
Pembakaran dengan Sengaja	38	29	46
Penadahan	52	72	63
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	2 891	2 900	3 580
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 308	2 182	2 344
Penggelapan	1 639	1 470	1 615
Korupsi	43	74	45
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	342	235	325

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Tabel 2.1.9

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Bulan (2018)		
	April (5)	Mei (6)	Juni (7)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	68	76	75
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	1 110	944	881
Penganiayaan Ringan	1 658	1 618	1 779
Kekerasan dalam Rumah Tangga	727	674	657
Kejahatan terhadap Kesusailaan			
Perkosaan	113	109	83
Pencabulan	371	319	246
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	18	29	13
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	218	175	205
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	2 466	2 126	1 942
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	18	18	12
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	144	21	47
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	2 672	2 317	2 218
Pencurian dengan Pemberatan	2 925	2 521	2 263
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 322	2 273	2 042
Pengrusakan/Penghancuran Barang	468	372	382
Pembakaran dengan Sengaja	62	35	37
Penadahan	101	51	48
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	2 946	2 716	1 781
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 375	2 274	1 761
Penggelapan	1 557	1 499	1 133
Korupsi	44	45	25
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	398	345	265

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Tabel 2.1.9

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Bulan (2018)		
	Juli (8)	Agustus (9)	September (10)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	77	88	123
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	809	973	1 077
Penganiayaan Ringan	2 029	1 809	1 906
Kekerasan dalam Rumah Tangga	676	763	572
Kejahatan terhadap Kesusailaan			
Perkosaan	99	101	109
Pencabulan	325	347	333
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	13	24	20
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	198	203	195
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	2 018	2 177	2 149
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	9	14	10
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	90	92	75
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	2 200	2 329	2 402
Pencurian dengan Pemberatan	2 655	2 681	2 747
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 174	2 487	2 438
Pengrusakan/Penghancuran Barang	349	360	473
Pembakaran dengan Sengaja	34	94	49
Penadahan	51	36	52
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3882	4064	4668
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 994	2 337	2 259
Penggelapan	1475	1 633	1743
Korupsi	35	42	50
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	325	302	319

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Tabel 2.1.9

Kelompok/Jenis Kejahatan (1)	Bulan (2018)		
	Oktober (11)	November (12)	Desember (13)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	109	92	75
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	929	915	742
Penganiayaan Ringan	1 488	1 539	1 550
Kekerasan dalam Rumah Tangga	721	656	643
Kejahatan terhadap Kesusailaan			
Perkosaan	159	94	84
Pencabulan	389	346	255
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	19	17	12
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	246	133	219
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	2 088	2 053	1 813
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	12	6	12
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	64	79	73
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	2 346	2 421	1 983
Pencurian dengan Pemberatan	2 532	2 391	2 138
Pencurian Kendaraan Bermotor	2 329	2 206	2 180
Pengrusakan/Penghancuran Barang	370	453	335
Pembakaran dengan Sengaja	41	27	29
Penadahan	44	128	57
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	4 047	3 700	2 413
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	2 055	1 945	1 709
Penggelapan	1 520	1 304	1 225
Korupsi	34	42	17
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	267	269	208

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2016

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		KDRT
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	43	233	1 320	450	
Sumatera Utara	161	2 959	2 743	-	
Sumatera Barat	21	435	1 911	387	
Riau	20	172	661	366	
Jambi	27	387	519	237	
Sumatera Selatan	132	1 575	377	576	
Bengkulu	18	307	88	215	
Lampung	56	146	37	241	
Kep. Bangka Belitung	10	43	2	46	
Kepulauan Riau	8	243	371	196	
Metro Jaya ¹⁾	69	1 601	404	1 324	
Jawa Barat	113	753	1 032	686	
Jawa Tengah	33	310	513	258	
DI Yogyakarta	6	120	169	158	
Jawa Timur	49	688	496	491	
Banten	3	121	343	70	
Bali	13	5	398	186	
Nusa Tenggara Barat	22	33	-	454	
Nusa Tenggara Timur	44	959	1 250	456	
Kalimantan Barat	20	109	-	193	
Kalimantan Tengah	33	28	191	52	
Kalimantan Selatan	41	275	115	71	
Kalimantan Timur	23	470	319	341	
Sulawesi Utara	128	993	276	789	
Sulawesi Tengah	25	52	1 803	540	
Sulawesi Selatan ²⁾	81	211	2 725	1 019	
Sulawesi Tenggara	10	9	836	204	
Gorontalo	12	70	950	245	
Maluku	9	71	383	138	
Maluku Utara	23	167	-	52	
Papua ²⁾	25	670	512	492	
INDONESIA	1 292	14 468	21 155	11 083	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan			Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	40	251	18	42
Sumatera Utara	186	-	79	133
Sumatera Barat	54	286	2	146
Riau	173	-	2	1
Jambi	93	18	3	79
Sumatera Selatan	115	96	17	166
Bengkulu	27	92	1	-
Lampung	80	18	24	-
Kep. Bangka Belitung	10	46	1	34
Kepulauan Riau	10	122	1	-
Metro Jaya ¹⁾	70	210	67	99
Jawa Barat	89	233	44	126
Jawa Tengah	15	259	4	314
DI Yogyakarta	3	53	14	45
Jawa Timur	56	195	17	151
Banten	8	70	1	123
Bali	27	66	2	29
Nusa Tenggara Barat	39	-	7	78
Nusa Tenggara Timur	55	143	5	16
Kalimantan Barat	27	120	1	155
Kalimantan Tengah	7	96	-	3
Kalimantan Selatan	59	-	-	-
Kalimantan Timur	31	199	3	9
Sulawesi Utara	41	285	17	1
Sulawesi Tengah	54	162	6	37
Sulawesi Selatan ²⁾	60	243	10	182
Sulawesi Tenggara	40	94	-	93
Gorontalo	22	127	-	42
Maluku	15	48	17	96
Maluku Utara	18	64	2	15
Papua ²⁾	49	37	2	149
INDONESIA	1 594	3 653	374	2 511

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	179	3	9
Sumatera Utara	1 153	7	-
Sumatera Barat	512	1	19
Riau	348	33	10
Jambi	368	7	-
Sumatera Selatan	1 406	37	83
Bengkulu	214	4	13
Lampung	720	27	14
Kep. Bangka Belitung	31	1	3
Kepulauan Riau	166	1	3
Metro Jaya ¹⁾	743	53	188
Jawa Barat	1 107	59	23
Jawa Tengah	247	1	45
DI Yogyakarta	171	1	-
Jawa Timur	406	3	17
Banten	139	4	-
Bali	41	-	14
Nusa Tenggara Barat	393	6	-
Nusa Tenggara Timur	89	1	1
Kalimantan Barat	305	1	-
Kalimantan Tengah	38	1	75
Kalimantan Selatan	105	4	355
Kalimantan Timur	133	5	122
Sulawesi Utara	28	-	3
Sulawesi Tengah	336	5	1
Sulawesi Selatan ²⁾	646	1	85
Sulawesi Tenggara	43	1	11
Gorontalo	14	2	-
Maluku	16	-	-
Maluku Utara	4	-	1
Papua ²⁾	363	3	-
INDONESIA	10 726	272	1 097

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1 568	481	1 688	38
Sumatera Utara	2 145	5 630	4 726	56
Sumatera Barat	1 632	3 034	2 975	7
Riau	662	1 584	704	25
Jambi	755	1 750	1 156	-
Sumatera Selatan	566	3 742	1 348	18
Bengkulu	560	1 082	725	18
Lampung	400	1 805	101	6
Kep. Bangka Belitung	189	671	135	3
Kepulauan Riau	864	501	542	7
Metro Jaya ¹⁾	1 642	3 302	2 941	109
Jawa Barat	1 059	3 652	5 234	29
Jawa Tengah	867	2 713	1 796	25
DI Yogyakarta	628	795	563	6
Jawa Timur	854	3 971	1 897	102
Banten	200	757	836	10
Bali	501	557	479	5
Nusa Tenggara Barat	638	945	-	18
Nusa Tenggara Timur	908	524	329	60
Kalimantan Barat	997	992	957	11
Kalimantan Tengah	184	693	329	18
Kalimantan Selatan	299	685	447	4
Kalimantan Timur	627	1 179	1 402	10
Sulawesi Utara	765	418	218	27
Sulawesi Tengah	2 100	663	1 581	1
Sulawesi Selatan ²⁾	2 194	1 239	2 083	6
Sulawesi Tenggara	618	566	384	14
Gorontalo	697	287	161	-
Maluku	297	550	154	-
Maluku Utara	69	281	20	-
Papua ²⁾	745	989	1 730	22
INDONESIA	26 636	46 277	37 871	666

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	188	50	1 402
Sumatera Utara	804	165	5 591
Sumatera Barat	540	23	724
Riau	122	32	1 451
Jambi	163	15	462
Sumatera Selatan	1 724	34	1 640
Bengkulu	54	-	262
Lampung	131	-	949
Kep. Bangka Belitung	32	2	172
Kepulauan Riau	111	-	475
Metro Jaya ¹⁾	253	7	5 569
Jawa Barat	241	12	2 446
Jawa Tengah	92	9	1 774
DI Yogyakarta	116	4	427
Jawa Timur	151	19	7 523
Banten	28	2	399
Bali	71	10	856
Nusa Tenggara Barat	227	10	341
Nusa Tenggara Timur	334	50	32
Kalimantan Barat	87	3	529
Kalimantan Tengah	16	36	857
Kalimantan Selatan	25	-	1 916
Kalimantan Timur	88	14	1 457
Sulawesi Utara	427	31	1 344
Sulawesi Tengah	295	8	209
Sulawesi Selatan ²⁾	515	30	62
Sulawesi Tenggara	139	10	50
Gorontalo	188	28	26
Maluku	79	18	24
Maluku Utara	18	-	27
Papua ²⁾	553	22	164
INDONESIA	7 926	650	39 171

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	675	648	55	3
Sumatera Utara	2 068	3 009	56	2
Sumatera Barat	1 077	980	30	375
Riau	418	654	45	-
Jambi	896	866	28	351
Sumatera Selatan	1 296	1 493	39	300
Bengkulu	441	379	44	24
Lampung	797	779	38	-
Kep. Bangka Belitung	115	96	15	-
Kepulauan Riau	420	371	26	-
Metro Jaya ¹⁾	5 969	2 432	52	313
Jawa Barat	3 123	1 475	70	407
Jawa Tengah	1 090	1 022	60	275
DI Yogyakarta	881	417	19	91
Jawa Timur	1 693	666	112	55
Banten	422	190	25	3
Bali	178	267	32	2
Nusa Tenggara Barat	311	277	28	-
Nusa Tenggara Timur	324	223	39	926
Kalimantan Barat	282	590	43	4
Kalimantan Tengah	81	166	45	4
Kalimantan Selatan	207	273	35	-
Kalimantan Timur	384	686	58	4
Sulawesi Utara	689	383	27	7
Sulawesi Tengah	617	564	27	3
Sulawesi Selatan ²⁾	1 574	760	61	-
Sulawesi Tenggara	207	121	36	-
Gorontalo	436	290	26	7
Maluku	123	71	24	243
Maluku Utara	36	16	35	-
Papua ²⁾	353	188	68	523
INDONESIA	27 421	20 459	1 318	4 297

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

**Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah,
Tahun 2017**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa Pembunuhan	Kejahatan terhadap Fisik			KDRT
		Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	27	226	1 208	330	
Sumatera Utara	92	2 791	2 842	-	
Sumatera Barat	14	329	1 744	298	
Riau	28	185	405	201	
Jambi	24	293	467	255	
Sumatera Selatan	147	1 239	282	522	
Bengkulu	37	186	63	146	
Lampung	50	152	124	125	
Kep. Bangka Belitung	9	50	3	42	
Kepulauan Riau	6	154	345	142	
Metro Jaya ¹⁾	76	990	251	754	
Jawa Barat	89	862	1 009	676	
Jawa Tengah	30	187	369	174	
DI Yogyakarta	1	93	144	124	
Jawa Timur	60	1 026	693	723	
Banten	31	106	208	37	
Bali	11	6	418	158	
Nusa Tenggara Barat	7	50	99	335	
Nusa Tenggara Timur	34	484	1 533	474	
Kalimantan Barat	13	79	-	175	
Kalimantan Tengah	30	50	133	39	
Kalimantan Selatan	30	221	112	54	
Kalimantan Timur	22	454	245	198	
Sulawesi Utara	103	585	-	359	
Sulawesi Tengah	15	32	1 487	439	
Sulawesi Selatan	65	228	3 964	1 348	
Sulawesi Tenggara	17	9	744	171	
Gorontalo	10	34	1 250	161	
Sulawesi Barat	15	15	451	98	
Maluku	7	576	121	124	
Maluku Utara	7	107	38	39	
Papua Barat	6	233	164	53	
Papua	37	373	413	175	
INDONESIA	1 150	12 405	21 329	8 949	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusastraan Perkosaan	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan		
		Pencabulan	Penculikan	Memperkerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
A c e h	51	260	19	19
Sumatera Utara	216	8	19	-
Sumatera Barat	56	287	-	158
Riau	87	10	3	8
Jambi	107	6	3	222
Sumatera Selatan	90	130	12	104
Bengkulu	13	81	-	5
Lampung	91	72	2	6
Kep. Bangka Belitung	10	33	-	38
Kepulauan Riau	12	119	5	-
Metro Jaya ¹⁾	42	134	41	3
Jawa Barat	63	286	28	124
Jawa Tengah	21	249	3	219
DI Yogyakarta	7	31	6	18
Jawa Timur	38	220	7	203
Banten	3	89	2	109
Bali	6	71	1	21
Nusa Tenggara Barat	36	28	2	74
Nusa Tenggara Timur	47	168	7	33
Kalimantan Barat	35	191	1	103
Kalimantan Tengah	8	86	-	2
Kalimantan Selatan	18	50	-	-
Kalimantan Timur	23	125	3	-
Sulawesi Utara	56	328	24	1
Sulawesi Tengah	38	207	24	-
Sulawesi Selatan	70	252	7	398
Sulawesi Tenggara	28	114	2	27
Gorontalo	23	143	-	46
Sulawesi Barat	18	44	6	27
Maluku	26	97	8	134
Maluku Utara	3	152	1	13
Papua Barat	19	15	3	99
Papua	33	33	2	181
INDONESIA	1 394	4 119	241	2 395

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah (1)	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan (10)	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi) (11)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam) (12)
A c e h	208	3	8
Sumatera Utara	900	8	-
Sumatera Barat	446	2	15
Riau	222	24	17
Jambi	265	9	-
Sumatera Selatan	989	31	44
Bengkulu	198	4	1
Lampung	718	31	25
Kep. Bangka Belitung	25	-	-
Kepulauan Riau	163	-	12
Metro Jaya ¹⁾	483	28	124
Jawa Barat	947	30	26
Jawa Tengah	198	15	43
DI Yogyakarta	117	-	-
Jawa Timur	611	3	13
Banten	124	4	-
Bali	63	2	20
Nusa Tenggara Barat	400	3	-
Nusa Tenggara Timur	124	1	-
Kalimantan Barat	180	-	-
Kalimantan Tengah	20	-	112
Kalimantan Selatan	109	1	365
Kalimantan Timur	121	5	106
Sulawesi Utara	133	-	7
Sulawesi Tengah	210	4	-
Sulawesi Selatan	1 094	2	41
Sulawesi Tenggara	27	-	2
Gorontalo	8	-	-
Sulawesi Barat	11	-	25
Maluku	7	-	-
Maluku Utara	3	-	13
Papua Barat	89	-	3
Papua	246	1	-
INDONESIA	9 459	211	1 022

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catahan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1 351	664	968	34
Sumatera Utara	2 282	5 066	4 030	22
Sumatera Barat	1 604	2 521	2 910	2
Riau	541	1 078	676	20
Jambi	995	1 683	1 048	-
Sumatera Selatan	508	2 771	1 050	5
Bengkulu	466	810	665	28
Lampung	455	1 504	271	11
Kep. Bangka Belitung	128	479	126	3
Kepulauan Riau	715	271	416	9
Metro Jaya ¹⁾	1 324	2 180	1 796	151
Jawa Barat	960	3 727	5 414	40
Jawa Tengah	821	2 035	1 665	25
DI Yogyakarta	521	604	573	1
Jawa Timur	1 366	2 822	2 072	59
Banten	153	580	810	9
Bali	447	405	328	10
Nusa Tenggara Barat	649	930	281	5
Nusa Tenggara Timur	1 069	276	349	24
Kalimantan Barat	970	684	560	16
Kalimantan Tengah	136	288	170	12
Kalimantan Selatan	393	594	494	26
Kalimantan Timur	584	767	1 059	7
Sulawesi Utara	809	70	250	20
Sulawesi Tengah	2 378	778	2 357	4
Sulawesi Selatan	3 440	1 633	2 192	46
Sulawesi Tenggara	440	167	279	2
Gorontalo	711	15	134	-
Sulawesi Barat	359	106	133	-
Maluku	413	99	145	4
Maluku Utara	76	8	11	-
Papua Barat	568	224	74	-
Papua	681	628	1 920	19
INDONESIA	28 313	36 467	35 226	614

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	186	35	1 544
Sumatera Utara	876	85	5 907
Sumatera Barat	451	23	592
Riau	61	13	1 173
Jambi	163	24	712
Sumatera Selatan	192	31	1 768
Bengkulu	80	1	192
Lampung	145	1	1 744
Kep. Bangka Belitung	20	3	224
Kepulauan Riau	54	-	400
Metro Jaya ¹⁾	173	-	7 214
Jawa Barat	251	10	1 090
Jawa Tengah	63	12	1 243
DI Yogyakarta	61	-	290
Jawa Timur	216	29	3 405
Banten	33	-	389
Bali	53	2	665
Nusa Tenggara Barat	210	7	227
Nusa Tenggara Timur	359	40	2
Kalimantan Barat	48	3	490
Kalimantan Tengah	12	23	474
Kalimantan Selatan	27	6	1 211
Kalimantan Timur	73	2	2 928
Sulawesi Utara	402	6	111
Sulawesi Tengah	234	5	259
Sulawesi Selatan	765	17	717
Sulawesi Tenggara	86	9	65
Gorontalo	138	18	38
Sulawesi Barat	48	4	120
Maluku	92	19	73
Maluku Utara	23	-	63
Papua Barat	79	-	41
Papua	280	40	41
INDONESIA	5 954	468	35 412

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

Lanjutan Tabel 2.1.11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	674	643	21	9
Sumatera Utara	2 434	2 831	32	-
Sumatera Barat	967	910	4	360
Riau	323	624	19	2
Jambi	942	905	18	312
Sumatera Selatan	1 127	1 237	12	282
Bengkulu	365	342	21	35
Lampung	710	707	27	1
Kep. Bangka Belitung	108	80	2	-
Kepulauan Riau	404	288	11	-
Metro Jaya ¹⁾	4 236	1 921	12	227
Jawa Barat	3 345	1 429	19	398
Jawa Tengah	785	726	29	293
DI Yogyakarta	510	296	2	76
Jawa Timur	2 602	981	56	133
Banten	421	193	11	-
Bali	203	235	13	1
Nusa Tenggara Barat	385	316	19	2
Nusa Tenggara Timur	486	274	6	892
Kalimantan Barat	223	446	16	1
Kalimantan Tengah	73	160	21	-
Kalimantan Selatan	261	275	18	-
Kalimantan Timur	357	491	28	178
Sulawesi Utara	691	576	8	8
Sulawesi Tengah	667	662	10	4
Sulawesi Selatan	2 831	1 241	26	3
Sulawesi Tenggara	149	70	12	1
Gorontalo	302	239	4	15
Sulawesi Barat	173	134	3	-
Maluku	219	98	6	298
Maluku Utara	18	22	7	4
Papua Barat	154	103	3	143
Papua	273	216	9	406
INDONESIA	27 418	19 671	505	4 084

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3² Polda Sulsel pada tahun 2016 meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat³ Polda Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018

**Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah,
Tahun 2018**

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan	KDRT	
			Ringan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	22	310	881	284	
Sumatera Utara	107	2 524	2 716	-	
Sumatera Barat	14	291	1 558	304	
Riau	30	234	439	179	
Jambi	23	169	219	183	
Sumatera Selatan	111	1 006	279	468	
Bengkulu	26	222	65	137	
Lampung	11	113	54	142	
Kep. Bangka Belitung	9	62	-	34	
Kepulauan Riau	6	165	304	117	
Metro Jaya ¹⁾	75	830	139	1 037	
Jawa Barat	35	617	656	373	
Jawa Tengah	34	212	303	116	
DI Yogyakarta	2	50	164	120	
Jawa Timur	72	921	739	685	
Banten	5	152	187	40	
Bali	10	5	383	159	
Nusa Tenggara Barat	3	72	-	308	
Nusa Tenggara Timur	45	15	1 970	382	
Kalimantan Barat	26	112	-	139	
Kalimantan Tengah	14	41	154	36	
Kalimantan Selatan	43	187	135	50	
Kalimantan Timur	16	288	163	101	
Kalimantan Utara	4	22	9	8	
Sulawesi Utara	68	959	1 139	277	
Sulawesi Tengah	13	54	1 190	329	
Sulawesi Selatan	72	203	3 378	1 119	
Sulawesi Tenggara	7	3	378	106	
Gorontalo	15	8	1 175	223	
Sulawesi Barat	12	6	457	74	
Maluku	15	355	138	173	
Maluku Utara	23	79	72	59	
Papua Barat	13	441	169	94	
Papua	43	463	696	211	
INDONESIA	1 024	11 191	20 309	8 067	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Lanjutan Tabel 2.1.12

Kepolisian Daerah (1)	Kejahatan terhadap Kesusilaan Perkosaan (6)	Pencabulan (7)	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan (8)		Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (9)
			Penculikan (8)	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (9)	
A c e h	39	223	29	12	
Sumatera Utara	264	57	15	73	
Sumatera Barat	31	361	1	131	
Riau	95	3	1	15	
Jambi	33	57	4	49	
Sumatera Selatan	82	93	3	129	
Bengkulu	14	63	2	4	
Lampung	39	26	5	2	
Kep. Bangka Belitung	6	46	-	33	
Kepulauan Riau	11	114	2	-	
Metro Jaya ¹⁾	33	103	34	4	
Jawa Barat	46	466	12	21	
Jawa Tengah	18	208	7	192	
DI Yogyakarta	9	40	1	13	
Jawa Timur	68	224	12	149	
Banten	6	82	-	136	
Bali	16	83	3	26	
Nusa Tenggara Barat	36	-	2	52	
Nusa Tenggara Timur	65	150	6	72	
Kalimantan Barat	20	100	1	128	
Kalimantan Tengah	12	75	-	3	
Kalimantan Selatan	15	44	-	2	
Kalimantan Timur	14	85	-	-	
Kalimantan Utara	3	23	-	1	
Sulawesi Utara	50	271	51	-	
Sulawesi Tengah	35	170	-	15	
Sulawesi Selatan	66	250	6	434	
Sulawesi Tenggara	11	79	1	11	
Gorontalo	24	196	6	32	
Sulawesi Barat	10	36	-	10	
Maluku	22	97	12	193	
Maluku Utara	18	80	2	18	
Papua Barat	28	11	-	129	
Papua	49	54	4	234	
INDONESIA	1 288	3 970	222	2 323	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Lanjutan Tabel 2.1.12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
A c e h	150	1	5
Sumatera Utara	696	6	-
Sumatera Barat	379	1	7
Riau	282	11	8
Jambi	106	10	3
Sumatera Selatan	628	30	36
Bengkulu	114	-	2
Lampung	460	26	13
Kep. Bangka Belitung	35	1	2
Kepulauan Riau	103	1	5
Metro Jaya ¹⁾	335	17	53
Jawa Barat	327	12	26
Jawa Tengah	152	8	43
DI Yogyakarta	132	2	4
Jawa Timur	663	2	3
Banten	119	4	5
Bali	50	4	9
Nusa Tenggara Barat	256	3	2
Nusa Tenggara Timur	66	-	-
Kalimantan Barat	97	1	-
Kalimantan Tengah	47	1	63
Kalimantan Selatan	79	4	417
Kalimantan Timur	78	1	83
Kalimantan Utara	4	-	-
Sulawesi Utara	87	-	12
Sulawesi Tengah	243	2	2
Sulawesi Selatan	1 173	2	26
Sulawesi Tenggara	18	-	19
Gorontalo	11	-	-
Sulawesi Bara	17	-	7
Maluku	25	-	-
Maluku Utara	1	-	1
Papua Barat	170	-	1
Papua	307	1	5
INDONESIA	7 410	151	862

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Lanjutan Tabel 2.1.12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	1 259	620	892	116
Sumatera Utara	2 692	4 683	2 956	323
Sumatera Barat	1 951	2 471	2 379	408
Riau	501	1 047	606	99
Jambi	676	972	490	122
Sumatera Selatan	450	2 264	928	148
Bengkulu	220	575	282	33
Lampung	414	1 247	127	84
Kep. Bangka Belitung	145	369	128	18
Kepulauan Riau	575	268	557	56
Metro Jaya ¹⁾	987	1 668	1 269	209
Jawa Barat	675	1 429	2 588	131
Jawa Tengah	663	1 667	1 305	59
DI Yogyakarta	646	520	393	81
Jawa Timur	1 612	2 677	2 384	306
Banten	139	527	876	13
Bali	503	372	306	47
Nusa Tenggara Barat	442	841	0	163
Nusa Tenggara Timur	1 117	364	264	323
Kalimantan Barat	771	948	509	55
Kalimantan Tengah	122	360	324	16
Kalimantan Selatan	418	553	395	37
Kalimantan Timur	379	582	516	50
Kalimantan Utara	33	104	18	1
Sulawesi Utara	1 117	458	478	331
Sulawesi Tengah	2 180	904	1 730	225
Sulawesi Selatan	4 151	1 794	2 047	697
Sulawesi Tenggara	208	53	105	31
Gorontalo	602	10	125	130
Sulawesi Barat	446	144	137	80
Maluku	437	89	124	85
Maluku Utara	86	11	9	18
Papua Barat	466	397	377	121
Papua	886	583	2 107	294
INDONESIA	27 969	31 571	27 731	4 910

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Lanjutan Tabel 2.1.12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	37	35	1 625
Sumatera Utara	110	54	6 262
Sumatera Barat	21	-	806
Riau	26	54	1 717
Jambi	20	3	439
Sumatera Selatan	18	4	2 001
Bengkulu	1	14	165
Lampung	3	7	2 511
Kep. Bangka Belitung	3	3	377
Kepulauan Riau	-	6	410
Metro Jaya ¹⁾	-	216	8 715
Jawa Barat	5	13	1 604
Jawa Tengah	4	29	991
DI Yogyakarta	1	2	250
Jawa Timur	28	83	2 712
Banten	-	11	339
Bali	1	4	746
Nusa Tenggara Barat	6	7	193
Nusa Tenggara Timur	28	8	6
Kalimantan Barat	5	17	720
Kalimantan Tengah	50	36	640
Kalimantan Selatan	5	29	1 650
Kalimantan Timur	3	2	2 108
Kalimantan Utara	2	-	77
Sulawesi Utara	20	70	888
Sulawesi Tengah	19	1	311
Sulawesi Selatan	20	19	707
Sulawesi Tenggara	6	4	83
Gorontalo	9	-	43
Sulawesi Barat	14	-	185
Maluku	15	1	113
Maluku Utara	-	1	84
Papua Barat	1	3	81
Papua	40	19	29
INDONESIA	521	755	39 588

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

Lanjutan Tabel 2.1.12

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	867	589	15	6
Sumatera Utara	2 067	2 584	29	-
Sumatera Barat	974	861	12	101
Riau	454	585	21	-
Jambi	424	516	19	126
Sumatera Selatan	1 064	1 022	22	214
Bengkulu	196	175	24	15
Lampung	612	519	4	-
Kep. Bangka Belitung	70	69	4	1
Kepulauan Riau	391	251	7	1
Metro Jaya ¹⁾	3 546	1 971	9	223
Jawa Barat	2 808	1 234	28	65
Jawa Tengah	623	648	29	207
DI Yogyakarta	758	350	3	44
Jawa Timur	2 906	1 271	35	125
Banten	371	138	5	-
Bali	268	197	21	5
Nusa Tenggara Barat	344	240	5	-
Nusa Tenggara Timur	499	301	18	962
Kalimantan Barat	202	397	29	17
Kalimantan Tengah	70	143	38	3
Kalimantan Selatan	141	228	23	-
Kalimantan Timur	290	344	35	468
Kalimantan Utara	19	30	1	-
Sulawesi Utara	862	672	5	19
Sulawesi Tengah	704	593	8	1
Sulawesi Selatan	2 615	1 118	14	1
Sulawesi Tenggara	64	38	3	-
Gorontalo	269	219	5	14
Sulawesi Barat	188	96	1	2
Maluku	219	76	4	212
Maluku Utara	29	16	-	1
Papua Barat	274	151	6	277
Papua	355	171	14	490
INDONESIA	25 543	17 813	496	3 600

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

https://www.bps.go.id

**DATA POTENSI DESA
(KEJADIAN KEJAHATAN)**

Tabel 2.2.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6 483	6 512	6 508
Sumatera Utara	5 797	6 104	6 132
Sumatera Barat	1 033	1 145	1 275
Riau	1 655	1 835	1 875
Jambi	1 372	1 551	1 562
Sumatera Selatan	3 186	3 237	3 262
Bengkulu	1 509	1 532	1 514
Lampung	2 464	2 632	2 654
Kep. Bangka Belitung	361	381	391
Kepulauan Riau	353	415	416
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5 905	5 962	5 957
Jawa Tengah	8 577	8 578	8 559
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8 502	8 502	8 496
Banten	1 535	1 551	1 552
Bali	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	1 084	1 141	1 143
Nusa Tenggara Timur	2 966	327	3 353
Kalimantan Barat	1 967	2 109	2 137
Kalimantan Tengah	1 528	1 569	1 576
Kalimantan Selatan	2	2 008	2 008
Kalimantan Timur	1 465	1 026	1 038
Kalimantan Utara*	-	479	482
Sulawesi Utara	1 693	1 836	1 838
Sulawesi Tengah	1 815	1 986	2 020
Sulawesi Selatan	2 982	303	3 049
Sulawesi Tenggara	2 121	2 272	2 354
Gorontalo	731	736	734
Sulawesi Barat	638	648	650
Maluku	1 024	1 088	1 240
Maluku Utara	1 079	1 196	1 196
Papua Barat	1 439	1 567	1 987
Papua	3 924	4 871	5 552
INDONESIA	78 609	82 190	83 931

Catatan: Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Sumber : Statistik Podes 2011, 2014, dan Podes 2018

Tabel 2.2.2 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Jenis Kejahatan (1)	Jumlah			Percentase		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
Pembunuhan	1 585	1 739	1 799	2,02	2,12	2,14
Penganiayaan	4 171	4 047	5 092	5,31	4,92	6,07
Perkosaan	2 122	2 050	2 851	2,70	2,49	3,40
Pencurian dengan Kekerasan	233	2 963	2 821	2,96	3,61	3,36
Pencurian	28 912	33 739	37 778	36,78	41,05	45,01
Penipuan/Penggelapan	5 603	7 244	8 620	7,13	8,81	10,27
Pembakaran	518	874	1 050	0,66	1,06	1,25
Perdagangan Orang	119	122	124	0,15	0,15	0,15
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	4 103	5 931	12 579	5,22	7,22	14,99
Perjudian	7 984	11 079	12 842	10,16	13,48	15,30

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Tabel 2.2.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	30	26	33
Sumatera Utara	118	130	122
Sumatera Barat	29	39	43
Riau	57	56	72
Jambi	26	30	33
Sumatera Selatan	98	140	114
Bengkulu	24	27	21
Lampung	59	50	66
Kep. Bangka Belitung	19	14	8
Kepulauan Riau	14	14	5
DKI Jakarta	17	29	14
Jawa Barat	124	142	130
Jawa Tengah	103	86	93
DI Yogyakarta	7	16	13
Jawa Timur	138	163	150
Banten	31	32	38
Bali	11	17	9
Nusa Tenggara Barat	32	37	37
Nusa Tenggara Timur	93	80	82
Kalimantan Barat	39	41	29
Kalimantan Tengah	27	51	41
Kalimantan Selatan	57	64	58
Kalimantan Timur	32	31	32
Kalimantan Utara*	-	8	4
Sulawesi Utara	47	61	57
Sulawesi Tengah	34	41	41
Sulawesi Selatan	87	99	95
Sulawesi Tenggara	31	26	39
Gorontalo	16	17	25
Sulawesi Barat	13	8	8
Maluku	25	17	15
Maluku Utara	11	13	21
Papua Barat	18	22	27
Papua	118	112	224
INDONESIA	1 585	1 739	1 799

Sumber : Statistik Podes 20011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : * Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	97	99	141
Sumatera Utara	267	264	295
Sumatera Barat	79	107	112
Riau	58	74	139
Jambi	49	50	81
Sumatera Selatan	169	168	173
Bengkulu	59	46	57
Lampung	116	110	157
Kep. Bangka Belitung	54	50	47
Kepulauan Riau	16	20	30
DKI Jakarta	22	66	30
Jawa Barat	452	425	598
Jawa Tengah	321	274	328
DI Yogyakarta	57	54	61
Jawa Timur	439	429	519
Banten	100	84	123
Bali	47	54	64
Nusa Tenggara Barat	131	107	134
Nusa Tenggara Timur	239	166	209
Kalimantan Barat	56	85	78
Kalimantan Tengah	59	68	66
Kalimantan Selatan	95	110	105
Kalimantan Timur	52	52	71
Kalimantan Utara*	-	11	18
Sulawesi Utara	201	161	181
Sulawesi Tengah	100	102	138
Sulawesi Selatan	261	261	263
Sulawesi Tenggara	118	158	140
Gorontalo	73	64	105
Sulawesi Barat	22	17	22
Maluku	64	50	60
Maluku Utara	26	48	46
Papua Barat	41	21	62
Papua	231	192	439
INDONESIA	4 171	4 047	5 092

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
Aceh	57	91	93
Sumatera Utara	131	115	178
Sumatera Barat	60	66	106
Riau	44	59	95
Jambi	27	35	54
Sumatera Selatan	66	78	72
Bengkulu	47	57	39
Lampung	63	57	96
Kep. Bangka Belitung	25	16	19
Kepulauan Riau	15	19	13
DKI Jakarta	4	25	9
Jawa Barat	208	175	206
Jawa Tengah	187	148	159
DI Yogyakarta	22	11	15
Jawa Timur	257	215	210
Banten	30	39	52
Bali	12	9	9
Nusa Tenggara Barat	39	39	54
Nusa Tenggara Timur	113	104	111
Kalimantan Barat	48	63	65
Kalimantan Tengah	29	32	30
Kalimantan Selatan	25	25	44
Kalimantan Timur	40	23	45
Kalimantan Utara*	-	9	14
Sulawesi Utara	73	54	95
Sulawesi Tengah	47	56	67
Sulawesi Selatan	42	47	90
Sulawesi Tenggara	26	40	51
Gorontalo	29	36	58
Sulawesi Barat	9	5	15
Maluku	37	27	40
Maluku Utara	38	26	35
Papua Barat	19	23	41
Papua	253	226	571
INDONESIA	2 122	2 050	2 851

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.6 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	63	47	59
Sumatera Utara	93	141	182
Sumatera Barat	55	71	53
Riau	79	101	103
Jambi	57	76	85
Sumatera Selatan	221	430	323
Bengkulu	33	40	52
Lampung	186	255	233
Kep. Bangka Belitung	16	15	8
Kepulauan Riau	13	17	20
DKI Jakarta	35	73	38
Jawa Barat	287	344	342
Jawa Tengah	146	176	155
DI Yogyakarta	28	20	17
Jawa Timur	290	419	295
Banten	54	49	76
Bali	13	23	22
Nusa Tenggara Barat	107	146	76
Nusa Tenggara Timur	54	67	68
Kalimantan Barat	33	37	34
Kalimantan Tengah	41	27	20
Kalimantan Selatan	85	73	48
Kalimantan Timur	25	37	32
Kalimantan Utara*	-	9	8
Sulawesi Utara	27	21	30
Sulawesi Tengah	24	23	24
Sulawesi Selatan	54	47	73
Sulawesi Tenggara	23	16	18
Gorontalo	4	3	9
Sulawesi Barat	7	7	4
Maluku	9	20	12
Maluku Utara	2	7	9
Papua Barat	13	13	34
Papua	153	113	259
INDONESIA	233	2 963	2 821

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
Aceh	1 101	1 744	2 225
Sumatera Utara	1 713	2 116	2 776
Sumatera Barat	420	574	779
Riau	726	942	1 169
Jambi	534	661	915
Sumatera Selatan	1 473	1 939	2 016
Bengkulu	599	635	743
Lampung	1 402	1 621	1 875
Kep. Bangka Belitung	174	203	206
Kepulauan Riau	115	133	159
DKI Jakarta	199	229	184
Jawa Barat	4 157	439	4 394
Jawa Tengah	3 628	4 064	4 068
DI Yogyakarta	275	283	294
Jawa Timur	3 767	4 122	3 919
Banten	978	1 079	1 104
Bali	200	202	254
Nusa Tenggara Barat	641	782	730
Nusa Tenggara Timur	612	724	863
Kalimantan Barat	517	648	808
Kalimantan Tengah	374	409	562
Kalimantan Selatan	820	889	926
Kalimantan Timur	348	354	456
Kalimantan Utara*	-	62	134
Sulawesi Utara	554	676	705
Sulawesi Tengah	407	578	777
Sulawesi Selatan	111	1 206	1 309
Sulawesi Tenggara	361	489	733
Gorontalo	114	179	253
Sulawesi Barat	150	171	195
Maluku	148	225	266
Maluku Utara	176	297	352
Papua Barat	113	149	227
Papua	1 006	964	1 402
INDONESIA	28 912	33 739	37 778

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	147	229	356
Sumatera Utara	227	378	512
Sumatera Barat	84	138	204
Riau	123	204	235
Jambi	72	109	180
Sumatera Selatan	150	334	287
Bengkulu	74	77	106
Lampung	216	284	422
Kep. Bangka Belitung	77	62	55
Kepulauan Riau	25	39	45
DKI Jakarta	30	100	62
Jawa Barat	925	1 111	1 187
Jawa Tengah	817	952	986
DI Yogyakarta	112	96	121
Jawa Timur	766	1 001	1 100
Banten	228	227	292
Bali	37	42	54
Nusa Tenggara Barat	134	136	178
Nusa Tenggara Timur	86	163	154
Kalimantan Barat	84	141	153
Kalimantan Tengah	41	95	72
Kalimantan Selatan	126	150	172
Kalimantan Timur	58	84	91
Kalimantan Utara*	-	10	28
Sulawesi Utara	92	89	138
Sulawesi Tengah	95	107	143
Sulawesi Selatan	219	305	458
Sulawesi Tenggara	43	87	157
Gorontalo	31	35	56
Sulawesi Barat	27	27	62
Maluku	41	52	49
Maluku Utara	22	49	52
Papua Barat	26	37	55
Papua	368	294	398
INDONESIA	5 603	7 244	8 620

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.9 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
Aceh	16	48	32
Sumatera Utara	53	53	61
Sumatera Barat	24	18	27
Riau	17	78	60
Jambi	9	26	28
Sumatera Selatan	22	30	54
Bengkulu	12	15	8
Lampung	9	11	20
Kep. Bangka Belitung	8	6	2
Kepulauan Riau	4	10	13
DKI Jakarta	6	10	3
Jawa Barat	26	54	57
Jawa Tengah	20	39	37
DI Yogyakarta	-	5	5
Jawa Timur	27	68	65
Banten	5	13	6
Bali	2	7	9
Nusa Tenggara Barat	12	14	13
Nusa Tenggara Timur	56	98	100
Kalimantan Barat	14	23	38
Kalimantan Tengah	3	34	34
Kalimantan Selatan	13	18	32
Kalimantan Timur	8	11	12
Kalimantan Utara*	-	10	10
Sulawesi Utara	11	17	11
Sulawesi Tengah	15	21	16
Sulawesi Selatan	20	32	28
Sulawesi Tenggara	2	9	15
Gorontalo	3	5	9
Sulawesi Barat	2	6	5
Maluku	7	9	19
Maluku Utara	5	7	22
Papua Barat	5	8	17
Papua	82	61	182
INDONESIA	518	874	1 050

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
Aceh	1	2	3
Sumatera Utara	7	11	5
Sumatera Barat	-	-	1
Riau	6	2	6
Jambi	-	-	3
Sumatera Selatan	1	5	6
Bengkulu	1	2	1
Lampung	2	1	6
Kep. Bangka Belitung	2	2	4
Kepulauan Riau	4	2	2
DKI Jakarta	-	2	-
Jawa Barat	33	25	17
Jawa Tengah	12	11	3
DI Yogyakarta	1	-	-
Jawa Timur	16	11	14
Banten	1	2	6
Bali	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	2	2	3
Nusa Tenggara Timur	7	14	27
Kalimantan Barat	3	7	-
Kalimantan Tengah	-	3	1
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	3	-	1
Kalimantan Utara*	-	1	-
Sulawesi Utara	8	6	6
Sulawesi Tengah	-	1	-
Sulawesi Selatan	1	4	2
Sulawesi Tenggara	-	1	-
Gorontalo	-	1	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1	1	1
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	6	2	5
INDONESIA	119	122	124

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	465	508	1 212
Sumatera Utara	543	1 033	1 795
Sumatera Barat	172	168	481
Riau	170	315	683
Jambi	67	167	387
Sumatera Selatan	220	409	783
Bengkulu	39	74	115
Lampung	124	186	466
Kep. Bangka Belitung	40	58	112
Kepulauan Riau	24	27	63
DKI Jakarta	74	126	92
Jawa Barat	507	558	952
Jawa Tengah	246	263	495
DI Yogyakarta	59	37	73
Jawa Timur	545	639	1 480
Banten	126	155	259
Bali	19	34	65
Nusa Tenggara Barat	50	93	216
Nusa Tenggara Timur	13	18	9
Kalimantan Barat	60	61	241
Kalimantan Tengah	38	81	229
Kalimantan Selatan	191	312	675
Kalimantan Timur	88	148	301
Kalimantan Utara*	-	32	94
Sulawesi Utara	9	25	56
Sulawesi Tengah	54	144	316
Sulawesi Selatan	84	128	506
Sulawesi Tenggara	8	25	84
Gorontalo	11	21	43
Sulawesi Barat	8	20	60
Maluku	16	15	28
Maluku Utara	12	21	28
Papua Barat	2	8	34
Papua	19	22	146
INDONESIA	4 103	5 931	12 579

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	242	401	598
Sumatera Utara	1 423	1 665	1 947
Sumatera Barat	239	267	458
Riau	236	329	510
Jambi	122	157	297
Sumatera Selatan	325	683	662
Bengkulu	52	67	107
Lampung	229	393	546
Kep. Bangka Belitung	57	71	60
Kepulauan Riau	21	31	48
DKI Jakarta	34	83	35
Jawa Barat	498	692	776
Jawa Tengah	644	770	1 153
DI Yogyakarta	70	59	74
Jawa Timur	1 227	1 502	1 295
Banten	169	180	231
Bali	154	81	67
Nusa Tenggara Barat	135	198	205
Nusa Tenggara Timur	176	293	389
Kalimantan Barat	210	303	416
Kalimantan Tengah	114	250	217
Kalimantan Selatan	209	283	230
Kalimantan Timur	112	129	145
Kalimantan Utara*	-	39	44
Sulawesi Utara	171	377	300
Sulawesi Tengah	240	337	297
Sulawesi Selatan	260	377	458
Sulawesi Tenggara	109	126	235
Gorontalo	60	116	115
Sulawesi Barat	36	95	60
Maluku	105	165	125
Maluku Utara	70	147	93
Papua Barat	32	57	61
Papua	203	356	588
INDONESIA	7 984	11 079	12 842

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.13 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	0,46	0,40	0,51
Sumatera Utara	2,04	2,13	1,99
Sumatera Barat	2,81	3,41	3,37
Riau	3,44	3,05	3,84
Jambi	1,90	1,93	2,11
Sumatera Selatan	3,08	4,32	3,49
Bengkulu	1,59	1,76	1,39
Lampung	2,39	1,90	2,49
Kep. Bangka Belitung	5,26	3,67	2,05
Kepulauan Riau	3,97	3,37	1,20
DKI Jakarta	6,37	10,86	5,24
Jawa Barat	2,10	2,38	2,18
Jawa Tengah	1,20	1,00	1,09
DI Yogyakarta	1,60	3,65	2,97
Jawa Timur	1,62	1,92	1,77
Banten	2,02	2,06	2,45
Bali	1,54	2,37	1,26
Nusa Tenggara Barat	2,95	3,24	3,24
Nusa Tenggara Timur	3,14	2,45	2,45
Kalimantan Barat	1,98	1,94	1,36
Kalimantan Tengah	1,77	3,25	2,60
Kalimantan Selatan	2,85	3,19	2,89
Kalimantan Timur	2,18	3,02	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,67	0,83
Sulawesi Utara	2,78	3,32	3,10
Sulawesi Tengah	1,87	2,06	2,03
Sulawesi Selatan	2,92	3,27	3,12
Sulawesi Tenggara	1,46	1,14	1,66
Gorontalo	2,19	2,31	3,41
Sulawesi Barat	2,04	1,23	1,23
Maluku	2,44	1,56	1,21
Maluku Utara	1,02	1,09	1,76
Papua Barat	1,25	1,40	1,36
Papua	3,01	2,30	4,03
INDONESIA	2,02	2,12	2,14

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.14 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
Aceh	1,50	1,52	2,17
Sumatera Utara	4,61	4,33	4,81
Sumatera Barat	7,65	9,34	8,78
Riau	3,50	4,03	7,41
Jambi	3,57	3,22	5,19
Sumatera Selatan	5,30	5,19	5,30
Bengkulu	3,91	3,00	3,76
Lampung	4,71	4,18	5,92
Kep. Bangka Belitung	14,96	13,12	12,02
Kepulauan Riau	4,53	4,82	7,21
DKI Jakarta	8,24	24,72	11,24
Jawa Barat	7,65	7,13	10,04
Jawa Tengah	3,74	3,19	3,83
DI Yogyakarta	13,01	12,33	13,93
Jawa Timur	5,16	5,05	6,11
Banten	6,51	5,42	7,93
Bali	6,56	7,54	8,94
Nusa Tenggara Barat	12,08	9,38	11,72
Nusa Tenggara Timur	8,06	5,08	6,23
Kalimantan Barat	2,85	4,03	3,65
Kalimantan Tengah	3,86	4,33	4,19
Kalimantan Selatan	4,75	5,48	5,23
Kalimantan Timur	3,55	5,07	6,84
Kalimantan Utara*	-	2,30	3,73
Sulawesi Utara	11,87	8,77	9,85
Sulawesi Tengah	5,51	5,14	6,83
Sulawesi Selatan	8,75	8,61	8,63
Sulawesi Tenggara	5,56	6,95	5,95
Gorontalo	9,99	8,70	14,31
Sulawesi Barat	3,45	2,62	3,38
Maluku	6,25	4,60	4,84
Maluku Utara	2,41	4,01	3,85
Papua Barat	2,85	1,34	3,12
Papua	5,89	3,94	7,91
INDONESIA	5,31	4,92	6,07

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	0,88	1,40	1,43
Sumatera Utara	2,26	1,88	2,90
Sumatera Barat	5,81	5,76	8,31
Riau	2,66	3,22	5,07
Jambi	1,97	2,26	3,46
Sumatera Selatan	2,07	2,41	2,21
Bengkulu	3,11	3,72	2,58
Lampung	2,56	2,17	3,62
Kep. Bangka Belitung	6,93	4,20	4,86
Kepulauan Riau	4,25	4,58	3,13
DKI Jakarta	1,50	9,36	3,37
Jawa Barat	3,52	2,94	3,46
Jawa Tengah	2,18	1,73	1,86
DI Yogyakarta	5,02	2,51	3,42
Jawa Timur	3,02	2,53	2,47
Banten	1,95	2,51	3,35
Bali	1,68	1,26	1,26
Nusa Tenggara Barat	3,60	3,42	4,72
Nusa Tenggara Timur	3,81	3,18	3,31
Kalimantan Barat	2,44	2,99	3,04
Kalimantan Tengah	1,90	2,04	1,90
Kalimantan Selatan	1,25	1,25	2,19
Kalimantan Timur	2,73	2,24	4,34
Kalimantan Utara*	-	1,88	2,90
Sulawesi Utara	4,31	2,94	5,17
Sulawesi Tengah	2,59	2,82	3,32
Sulawesi Selatan	1,41	1,55	2,95
Sulawesi Tenggara	1,23	1,76	2,17
Gorontalo	3,97	4,89	7,90
Sulawesi Barat	1,41	0,77	2,31
Maluku	3,61	2,48	3,23
Maluku Utara	3,52	2,17	2,93
Papua Barat	1,32	1,47	2,06
Papua	6,45	4,64	10,28
INDONESIA	2,70	2,49	3,40

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
Aceh	0,97	0,72	0,91
Sumatera Utara	1,60	2,31	2,97
Sumatera Barat	5,32	6,20	4,16
Riau	4,77	5,50	5,49
Jambi	4,15	4,90	5,44
Sumatera Selatan	6,94	13,28	9,90
Bengkulu	2,19	2,61	3,43
Lampung	7,55	9,69	8,78
Kep. Bangka Belitung	4,43	3,94	2,05
Kepulauan Riau	3,68	4,10	4,81
DKI Jakarta	13,11	27,34	14,23
Jawa Barat	4,86	5,77	5,74
Jawa Tengah	1,70	2,05	1,81
DI Yogyakarta	6,39	4,57	3,88
Jawa Timur	3,41	4,93	3,47
Banten	3,52	3,16	4,90
Bali	1,82	3,21	3,07
Nusa Tenggara Barat	9,87	12,80	6,65
Nusa Tenggara Timur	1,82	2,05	2,03
Kalimantan Barat	1,68	1,75	1,59
Kalimantan Tengah	2,68	1,72	1,27
Kalimantan Selatan	4,25	3,64	2,39
Kalimantan Timur	1,71	3,61	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,88	1,66
Sulawesi Utara	1,59	1,14	1,63
Sulawesi Tengah	1,32	1,16	1,19
Sulawesi Selatan	1,81	1,55	2,39
Sulawesi Tenggara	1,08	0,70	0,76
Gorontalo	0,55	0,41	1,23
Sulawesi Barat	1,10	1,08	0,62
Maluku	0,88	1,84	0,97
Maluku Utara	0,19	0,59	0,75
Papua Barat	0,90	0,83	1,71
Papua	3,90	2,32	4,66
INDONESIA	2,96	3,61	3,36

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.17 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	16,98	26,78	34,19
Sumatera Utara	29,55	34,67	45,27
Sumatera Barat	40,66	50,13	61,10
Riau	43,87	51,34	62,35
Jambi	38,92	42,62	58,58
Sumatera Selatan	46,23	59,90	61,80
Bengkulu	39,70	41,45	49,08
Lampung	56,90	61,59	70,65
Kep. Bangka Belitung	48,20	53,28	52,69
Kepulauan Riau	32,58	32,05	38,22
DKI Jakarta	74,53	85,77	68,91
Jawa Barat	70,40	73,63	73,76
Jawa Tengah	42,30	47,38	47,53
DI Yogyakarta	62,79	64,61	67,12
Jawa Timur	44,31	48,48	46,13
Banten	63,71	69,57	71,13
Bali	27,93	28,21	35,47
Nusa Tenggara Barat	59,13	68,54	63,87
Nusa Tenggara Timur	20,63	22,14	25,74
Kalimantan Barat	26,28	30,73	37,81
Kalimantan Tengah	24,48	26,07	35,66
Kalimantan Selatan	41,00	44,27	46,12
Kalimantan Timur	23,75	34,50	43,93
Kalimantan Utara*	-	12,94	27,80
Sulawesi Utara	32,72	36,82	38,36
Sulawesi Tengah	22,42	29,10	38,47
Sulawesi Selatan	37,22	39,80	42,93
Sulawesi Tenggara	17,02	21,52	31,14
Gorontalo	15,60	24,32	34,47
Sulawesi Barat	23,51	26,39	30,00
Maluku	14,45	20,68	21,45
Maluku Utara	16,31	24,83	29,43
Papua Barat	7,85	9,51	11,42
Papua	25,64	19,79	25,25
INDONESIA	36,78	41,05	45,01

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.18 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
Aceh	2,27	3,52	5,47
Sumatera Utara	3,92	6,19	8,35
Sumatera Barat	8,13	12,05	16,00
Riau	7,43	11,12	12,53
Jambi	5,25	7,03	11,52
Sumatera Selatan	4,71	10,32	8,80
Bengkulu	4,90	5,03	7,00
Lampung	8,77	10,79	15,90
Kep. Bangka Belitung	21,33	16,27	14,07
Kepulauan Riau	7,08	9,40	10,82
DKI Jakarta	11,24	37,45	23,22
Jawa Barat	15,66	18,63	19,93
Jawa Tengah	9,53	11,10	11,52
DI Yogyakarta	25,57	21,92	27,63
Jawa Timur	9,01	11,77	12,95
Banten	14,85	14,64	18,81
Bali	5,17	5,87	7,54
Nusa Tenggara Barat	12,36	11,92	15,57
Nusa Tenggara Timur	2,90	4,98	4,59
Kalimantan Barat	4,27	6,69	7,16
Kalimantan Tengah	2,68	6,05	4,57
Kalimantan Selatan	6,30	7,47	8,57
Kalimantan Timur	3,96	8,19	8,77
Kalimantan Utara*	-	2,09	5,81
Sulawesi Utara	5,43	4,85	7,51
Sulawesi Tengah	5,23	5,39	7,08
Sulawesi Selatan	7,34	10,07	15,02
Sulawesi Tenggara	2,03	3,83	6,67
Gorontalo	4,24	4,76	7,63
Sulawesi Barat	4,23	4,17	9,54
Maluku	4,00	4,78	3,95
Maluku Utara	2,04	4,10	4,35
Papua Barat	1,81	2,36	2,77
Papua	9,38	6,04	7,17
INDONESIA	7,13	8,81	10,27

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.19 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	0,25	0,74	0,49
Sumatera Utara	0,91	0,87	0,99
Sumatera Barat	2,32	1,57	2,12
Riau	1,03	4,25	3,20
Jambi	0,66	1,68	1,79
Sumatera Selatan	0,69	0,93	1,66
Bengkulu	0,80	0,98	0,53
Lampung	0,37	0,42	0,75
Kep. Bangka Belitung	2,22	1,57	0,51
Kepulauan Riau	1,13	2,41	3,13
DKI Jakarta	2,25	3,75	1,12
Jawa Barat	0,44	0,91	0,96
Jawa Tengah	0,23	0,45	0,43
DI Yogyakarta	-	1,14	1,14
Jawa Timur	0,32	0,80	0,77
Banten	0,33	0,84	0,39
Bali	0,28	0,98	1,26
Nusa Tenggara Barat	1,11	1,23	1,14
Nusa Tenggara Timur	1,89	3,00	2,98
Kalimantan Barat	0,71	1,09	1,78
Kalimantan Tengah	0,20	2,17	2,16
Kalimantan Selatan	0,65	0,90	1,59
Kalimantan Timur	0,55	1,07	1,16
Kalimantan Utara*	-	2,09	2,07
Sulawesi Utara	0,65	0,93	0,60
Sulawesi Tengah	0,83	1,06	0,79
Sulawesi Selatan	0,67	1,06	0,92
Sulawesi Tenggara	0,09	0,40	0,64
Gorontalo	0,41	0,68	1,23
Sulawesi Barat	0,31	0,93	0,77
Maluku	0,68	0,83	1,53
Maluku Utara	0,46	0,59	1,84
Papua Barat	0,35	0,51	0,86
Papua	2,09	1,25	3,28
INDONESIA	0,66	1,06	1,25

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.20 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (4)
A c e h	0,02	0,03	0,05
Sumatera Utara	0,12	0,18	0,08
Sumatera Barat	-	-	0,08
Riau	0,36	0,11	0,32
Jambi	-	-	0,19
Sumatera Selatan	0,03	0,15	0,18
Bengkulu	0,07	0,13	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,23
Kep. Bangka Belitung	0,55	0,52	1,02
Kepulauan Riau	1,13	0,48	0,48
DKI Jakarta	-	0,75	0,00
Jawa Barat	0,56	0,42	0,29
Jawa Tengah	0,14	0,13	0,04
DI Yogyakarta	0,23	-	0,00
Jawa Timur	0,19	0,13	0,16
Banten	0,07	0,13	0,39
Bali	-	0,14	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,18	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,24	0,43	0,81
Kalimantan Barat	0,15	0,33	0,00
Kalimantan Tengah	-	0,19	0,06
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,20	-	0,10
Kalimantan Utara*	-	0,21	0,00
Sulawesi Utara	0,47	0,33	0,33
Sulawesi Tengah	-	0,05	0,00
Sulawesi Selatan	0,03	0,13	0,07
Sulawesi Tenggara	-	0,04	0,00
Gorontalo	-	0,14	0,00
Sulawesi Barat	-	-	0,00
Maluku	0,10	0,09	0,08
Maluku Utara	-	-	0,00
Papua Barat	-	-	0,00
Papua	0,15	0,04	0,09
INDONESIA	0,15	0,15	0,15

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi (1)	Tahun		
	2011 (2)	2014 (3)	2018 (4)
A c e h	7,17	7,80	18,62
Sumatera Utara	9,37	16,92	29,27
Sumatera Barat	16,65	14,67	37,73
Riau	10,27	17,17	36,43
Jambi	4,88	10,77	24,78
Sumatera Selatan	6,91	12,64	24,00
Bengkulu	2,58	4,83	7,60
Lampung	5,03	7,07	17,56
Kep. Bangka Belitung	11,08	15,22	28,64
Kepulauan Riau	6,80	6,51	15,14
DKI Jakarta	27,72	47,19	34,46
Jawa Barat	8,59	9,36	15,98
Jawa Tengah	2,87	3,07	5,78
DI Yogyakarta	13,47	8,45	16,67
Jawa Timur	6,41	7,52	17,42
Banten	8,21	9,99	16,69
Bali	2,65	4,75	9,08
Nusa Tenggara Barat	4,61	8,15	18,90
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,55	0,27
Kalimantan Barat	3,05	2,89	11,28
Kalimantan Tengah	2,49	5,16	14,53
Kalimantan Selatan	9,55	15,54	33,62
Kalimantan Timur	6,01	14,42	29,00
Kalimantan Utara*	-	6,68	19,50
Sulawesi Utara	0,53	1,36	3,05
Sulawesi Tengah	2,98	7,25	15,64
Sulawesi Selatan	2,82	4,22	16,60
Sulawesi Tenggara	0,38	1,10	3,57
Gorontalo	1,50	2,85	5,86
Sulawesi Barat	1,25	3,09	9,23
Maluku	1,56	1,38	2,26
Maluku Utara	1,11	1,76	2,34
Papua Barat	0,14	0,51	1,71
Papua	0,48	0,45	2,63
INDONESIA	5,22	7,22	14,99

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.2.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)
A c e h	3,73	6,16	9,19
Sumatera Utara	24,55	27,28	31,75
Sumatera Barat	23,14	23,32	35,92
Riau	14,26	17,93	27,20
Jambi	8,89	10,12	19,01
Sumatera Selatan	10,20	21,10	20,29
Bengkulu	3,45	4,37	7,07
Lampung	9,29	14,93	20,57
Kep. Bangka Belitung	15,79	18,64	15,35
Kepulauan Riau	5,95	7,47	11,54
DKI Jakarta	12,73	31,09	13,11
Jawa Barat	8,43	11,61	13,03
Jawa Tengah	7,51	8,98	13,47
DI Yogyakarta	15,98	13,47	16,89
Jawa Timur	14,43	17,67	15,24
Banten	11,01	11,61	14,88
Bali	21,51	11,31	9,36
Nusa Tenggara Barat	12,45	17,35	17,94
Nusa Tenggara Timur	5,93	8,96	11,60
Kalimantan Barat	10,68	14,37	19,47
Kalimantan Tengah	7,46	15,93	13,77
Kalimantan Selatan	10,45	14,09	11,45
Kalimantan Timur	7,65	12,57	13,97
Kalimantan Utara	-	8,14	9,13
Sulawesi Utara	10,10	20,53	16,32
Sulawesi Tengah	13,22	16,97	14,70
Sulawesi Selatan	8,72	12,44	15,02
Sulawesi Tenggara	5,14	5,55	9,98
Gorontalo	8,21	15,76	15,67
Sulawesi Barat	5,64	14,66	9,23
Maluku	10,25	15,17	10,08
Maluku Utara	6,49	12,29	7,78
Papua Barat	2,22	3,64	3,07
Papua	5,17	7,31	10,59
INDONESIA	10,16	13,48	15,30

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

https://www.bps.go.id

**DATA POTENSI DESA
(KONFLIK MASSAL)**

Tabel 2.3.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal	2011		2014		2018	
	N (1)	% (2)	N (4)	% (5)	N (6)	% (7)
A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal						
1. Ada kejadian	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75
2. Tidak ada kejadian	76 047	96,74	79 411	96,47	80 784	96,25
Total Desa/Kelurahan	78 609	100,00	82 190	100,00	83 931	100,00
B. Jenis Perkelahian Massal						
1. Antar Kelompok Warga	1 348	1,71	1 404	1,71	1 674	1,99
2. Warga Antar Desa/ Kelurahan	1 054	1,34	1 128	1,37	1 078	1,28
3. Warga dengan Aparat Keamanan	120	0,15	108	0,13	91	0,11
4. Warga dengan Aparat Pemerintah	102	0,13	99	0,12	132	0,16
5. Antar Pelajar/Mahasiswa	210	0,27	327	0,40	548	0,65
6. Antar Suku	102	0,13	70	0,09	112	0,13
7. Lainnya	149	0,19	160	0,19	171	0,20
C. Penyelesaian Perkelahian Massal						
1. Diselesaikan secara damai	2 314	90,32	2 564	92,26	2 961	94,09
2. Tidak dapat diselesaikan	248	9,68	215	7,74	186	5,91
Total Desa/Kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	2 562	100,00	2 779	100,00	3 147	100,00

Sumber: Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Tabel 2.3.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	2011		2014		2018	
	N (1) (4)	% (5)	N (4)	% (5)	N (6)	% (7)
A c e h	69	1,06	61	0,94	90	1,38
Sumatera Utara	119	2,05	118	1,93	176	2,87
Sumatera Barat	50	4,84	45	3,93	80	6,27
Riau	47	2,84	38	2,07	51	2,72
Jambi	47	3,43	40	2,58	41	2,62
Sumatera Selatan	51	1,60	67	2,07	37	1,13
Bengkulu	24	1,59	27	1,76	28	1,85
Lampung	40	1,62	34	1,29	44	1,66
Kep. Bangka Belitung	28	7,76	24	6,30	3	0,77
Kepulauan Riau	7	1,98	3	0,72	4	0,96
DKI Jakarta	61	22,85	72	26,97	55	20,60
Jawa Barat	195	3,30	259	4,34	291	4,89
Jawa Tengah	194	2,26	252	2,94	233	2,72
DI Yogyakarta	13	2,97	12	2,74	14	3,20
Jawa Timur	162	1,91	132	1,55	185	2,18
Banten	80	5,21	40	2,58	58	3,74
Bali	12	1,68	6	0,84	5	0,70
Nusa Tenggara Barat	68	6,27	76	6,66	81	7,09
Nusa Tenggara Timur	183	6,17	174	5,32	205	6,11
Kalimantan Barat	27	1,37	39	1,85	30	1,40
Kalimantan Tengah	25	1,64	36	2,29	13	0,83
Kalimantan Selatan	13	0,65	26	1,29	21	1,05
Kalimantan Timur	43	2,94	20	1,95	17	1,64
Kalimantan Utara *)	-	-	6	1,25	5	1,04
Sulawesi Utara	101	5,97	165	8,99	111	6,04
Sulawesi Tengah	65	3,58	149	7,50	98	4,85
Sulawesi Selatan	113	3,79	145	4,79	130	4,26
Sulawesi Tenggara	54	2,55	73	3,21	84	3,57
Gorontalo	21	2,87	24	3,26	18	2,45
Sulawesi Barat	9	1,41	14	2,16	15	2,31
Maluku	146	14,26	160	14,71	199	16,05
Maluku Utara	110	10,19	186	15,55	164	13,71
Papua Barat	79	5,49	59	3,77	114	5,74
Papua	306	7,80	197	4,04	447	8,05
INDONESIA	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : * Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	34	29	4	2
Sumatera Utara	69	39	10	3
Sumatera Barat	21	24	-	1
Riau	23	15	5	4
Jambi	14	29	3	1
Sumatera Selatan	25	25	5	7
Bengkulu	9	11	4	1
Lampung	12	19	5	1
Kep. Bangka Belitung	11	14	2	-
Kepulauan Riau	2	3	1	2
DKI Jakarta	27	16	2	1
Jawa Barat	102	56	5	6
Jawa Tengah	97	99	2	3
DI Yogyakarta	4	-	-	-
Jawa Timur	88	66	4	4
Banten	42	21	2	-
Bali	9	3	-	-
Nusa Tenggara Barat	40	31	2	4
Nusa Tenggara Timur	79	93	7	3
Kalimantan Barat	13	6	3	1
Kalimantan Tengah	18	4	-	-
Kalimantan Selatan	1	8	-	1
Kalimantan Timur	22	11	1	4
Sulawesi Utara	47	65	3	2
Sulawesi Tengah	22	40	6	1
Sulawesi Selatan	53	58	4	3
Sulawesi Tenggara	25	25	1	2
Gorontalo	7	5	4	3
Sulawesi Barat	6	-	1	1
Maluku	94	55	5	10
Maluku Utara	52	64	5	7
Papua Barat	56	27	3	5
Papua	224	93	21	19
INDONESIA	1 348	1 054	120	102

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Lanjutan Tabel 2.3.3

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	4	1	3
Sumatera Utara	4	2	13
Sumatera Barat	9	-	2
Riau	1	3	3
Jambi	6	2	2
Sumatera Selatan	5	2	3
Bengkulu	4	1	1
Lampung	2	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	1
Kepulauan Riau	-	-	1
DKI Jakarta	23	-	5
Jawa Barat	44	3	22
Jawa Tengah	4	1	8
DI Yogyakarta	8	1	-
Jawa Timur	8	-	10
Banten	12	1	13
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2	3	4
Nusa Tenggara Timur	10	6	11
Kalimantan Barat	1	3	6
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	-	1	2
Kalimantan Timur	2	3	4
Sulawesi Utara	2	-	-
Sulawesi Tengah	3	2	2
Sulawesi Selatan	16	3	3
Sulawesi Tenggara	1	1	2
Gorontalo	2	1	6
Sulawesi Barat	1	-	3
Maluku	11	2	-
Maluku Utara	4	1	4
Papua Barat	2	1	2
Papua	18	57	9
INDONESIA	210	102	149

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Tabel 2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	-
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	-	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	-	-
Lampung	11	20	1	1
Kep. Bangka Belitung	12	11	-	1
Kepulauan Riau	2	-	-	-
DKI Jakarta	34	7	-	-
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	-	-
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	-
Kalimantan Tengah	27	1	1	-
Kalimantan Selatan	9	11	-	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	-	-
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	-
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	-	-
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
INDONESIA	1 404	1 128	108	99

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Tabel 2.3.4

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Kep. Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
INDONESIA	327	70	160

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	-
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	-	2
Sumatera Selatan	16	11	2	-
Bengkulu	8	8	-	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-
DKI Jakarta	32	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	-	-
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	-	1
Kalimantan Tengah	8	4	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	-	-
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	-
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
INDONESIA	1 674	1 078	91	132

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lanjutan Tabel 2.3.5

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10	2	6
Sumatera Utara	25	-	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	-	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	-	4
Bengkulu	10	-	2
Lampung	6	-	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kepulauan Riau	1	-	-
DKI Jakarta	18	-	-
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	-	3
Kalimantan Tengah	1	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	2
Sulawesi Utara	9	-	5
Sulawesi Tengah	13	-	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	-	4
Gorontalo	3	-	-
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
INDONESIA	548	112	171

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,52	0,45	0,06	0,03
Sumatera Utara	1,19	0,67	0,17	0,05
Sumatera Barat	2,03	2,32	-	0,10
Riau	1,39	0,91	0,30	0,24
Jambi	1,02	2,11	0,22	0,07
Sumatera Selatan	0,78	0,78	0,16	0,22
Bengkulu	0,60	0,73	0,27	0,07
Lampung	0,49	0,77	0,20	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,05	3,88	0,55	-
Kepulauan Riau	0,57	0,85	0,28	0,57
DKI Jakarta	10,11	5,99	0,75	0,37
Jawa Barat	1,73	0,95	0,08	0,10
Jawa Tengah	1,13	1,15	0,02	0,03
DI Yogyakarta	0,91	-	-	-
Jawa Timur	1,04	0,78	0,05	0,05
Banten	2,74	1,37	0,13	-
Bali	1,26	0,42	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,69	2,86	0,18	0,37
Nusa Tenggara Timur	2,66	3,14	0,24	0,10
Kalimantan Barat	0,66	0,31	0,15	0,05
Kalimantan Tengah	1,18	0,26	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	0,40	-	0,05
Kalimantan Timur	1,50	0,75	0,07	0,27
Sulawesi Utara	2,78	3,84	0,18	0,12
Sulawesi Tengah	1,21	2,20	0,33	0,06
Sulawesi Selatan	1,78	1,95	0,13	0,10
Sulawesi Tenggara	1,18	1,18	0,05	0,09
Gorontalo	0,96	0,68	0,55	0,41
Sulawesi Barat	0,94	-	0,16	0,16
Maluku	9,18	5,37	0,49	0,98
Maluku Utara	4,82	5,93	0,46	0,65
Papua Barat	3,89	1,88	0,21	0,35
Papua	5,71	2,37	0,54	0,48
INDONESIA	1,71	1,34	0,15	0,13

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Lanjutan Tabel 2.3.6

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,06	0,02	0,05
Sumatera Utara	0,07	0,03	0,22
Sumatera Barat	0,87	-	0,19
Riau	0,06	0,18	0,18
Jambi	0,44	0,15	0,15
Sumatera Selatan	0,16	0,06	0,09
Bengkulu	0,27	0,07	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,28	-	0,28
Kepulauan Riau	-	-	0,28
DKI Jakarta	8,61	-	1,87
Jawa Barat	0,75	0,05	0,37
Jawa Tengah	0,05	0,01	0,09
DI Yogyakarta	1,83	0,23	-
Jawa Timur	0,09	-	0,12
Banten	0,78	0,07	0,85
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,28	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,20	0,37
Kalimantan Barat	0,05	0,15	0,31
Kalimantan Tengah	-	-	0,20
Kalimantan Selatan	-	0,05	0,10
Kalimantan Timur	0,14	0,20	0,27
Sulawesi Utara	0,12	-	-
Sulawesi Tengah	0,17	0,11	0,11
Sulawesi Selatan	0,54	0,10	0,10
Sulawesi Tenggara	0,05	0,05	0,09
Gorontalo	0,27	0,14	0,82
Sulawesi Barat	0,16	-	0,47
Maluku	1,07	0,20	-
Maluku Utara	0,37	0,09	0,37
Papua Barat	0,14	0,07	0,14
Papua	0,46	1,45	0,23
INDONESIA	0,27	0,13	0,19

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Tabel 2.3.7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
INDONESIA	1,71	1,37	0,13	0,12

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Tabel 2.3.7

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
INDONESIA	0,40	0,09	0,19

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 2.3.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
INDONESIA	1,99	1,28	0,11	0,16

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Lanjutan Tabel 2.3.8

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,15	0,03	0,09	-
Sumatera Utara	0,41	-	0,20	-
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39	-
Riau	0,96	-	0,11	-
Jambi	0,70	0,06	0,26	-
Sumatera Selatan	0,28	-	0,12	-
Bengkulu	0,66	-	0,13	-
Lampung	0,23	-	0,15	-
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,26	-	-
Kepulauan Riau	0,24	-	-	-
DKI Jakarta	6,74	-	-	-
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35	-
Jawa Tengah	0,42	-	0,18	-
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46	-
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33	-
Banten	0,90	0,06	0,26	-
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,05	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1,10	0,15	0,30	-
Kalimantan Barat	0,14	-	0,14	-
Kalimantan Tengah	0,06	-	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05	-
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19	-
Kalimantan Utara	-	-	0,41	-
Sulawesi Utara	0,49	-	0,27	-
Sulawesi Tengah	0,64	-	0,10	-
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13	-
Sulawesi Tenggara	0,64	-	0,17	-
Gorontalo	0,41	-	-	-
Sulawesi Barat	0,31	-	-	-
Maluku	2,34	0,08	0,24	-
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17	-
Papua Barat	0,40	0,60	0,20	-
Papua	0,16	1,37	0,36	-
INDONESIA	0,65	0,13	0,20	-

Sumber: Diolah dari Podes 2018

Tabel 2.3.9 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	66	95,65	54	88,52	70	77,78
Sumatera Utara	101	84,87	103	87,29	170	96,59
Sumatera Barat	31	62,00	44	97,78	72	90,00
Riau	40	85,11	32	84,21	44	86,27
Jambi	42	89,36	39	97,50	38	92,68
Sumatera Selatan	47	92,16	62	92,54	33	89,19
Bengkulu	18	75,00	24	88,89	28	100,00
Lampung	27	67,50	30	88,24	41	93,18
Kep. Bangka Belitung	27	96,43	24	100,00	3	100,00
Kepulauan Riau	5	71,43	2	66,67	4	100,00
DKI Jakarta	57	93,44	69	95,83	52	94,55
Jawa Barat	180	92,31	246	94,98	280	96,22
Jawa Tengah	183	94,33	237	94,05	226	96,58
DI Yogyakarta	11	84,62	12	100,00	14	100,00
Jawa Timur	150	92,59	121	91,67	179	96,76
Banten	73	91,25	36	90,00	56	96,55
Bali	10	83,33	5	83,33	4	80,00
Nusa Tenggara Barat	64	94,12	73	96,05	78	96,30
Nusa Tenggara Timur	152	83,06	143	82,18	184	89,76
Kalimantan Barat	21	77,78	38	97,44	28	93,33
Kalimantan Tengah	23	92,00	33	91,67	14	100,00
Kalimantan Selatan	11	84,62	24	92,31	18	85,71
Kalimantan Timur	38	88,37	15	75,00	18	105,88
Kalimantan Utara *)	-	-	6	100,00	4	80,00
Sulawesi Utara	94	93,07	151	91,52	106	95,50
Sulawesi Tengah	64	98,46	142	95,30	96	97,96
Sulawesi Selatan	107	94,69	140	96,55	118	90,77
Sulawesi Tenggara	49	90,74	68	93,15	80	95,24
Gorontalo	19	90,48	19	79,17	18	100,00
Sulawesi Barat	7	77,78	10	71,43	14	93,33
Maluku	126	86,30	147	91,88	185	92,96
Maluku Utara	103	93,64	178	95,70	157	95,73
Papua Barat	73	92,41	56	94,92	106	92,98
Papua	295	96,41	181	91,88	426	95,30
INDONESIA	2 314	90,32	2 564	92,26	2 964	94,13

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan :* Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

**Tabel 3.1.1 Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami,
Tahun 2017 dan 2018**

Kategori Jenis Kejahatan (1)	2017		2018
	(2)	(3)	
1. Pencurian	84,47	84,48	
2. Penganiayaan	5,12	4,05	
3. Pencurian dengan kekerasan	3,31	3,30	
4. Pelecehan Seksual	1,76	2,03	
5. Lainnya	14,99	14,09	
6. Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan	9,66	7,95	

Sumber: Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

Tabel 3.1.2 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A c e h	0,99	0,83
Sumatera Utara	1,09	1,21
Sumatera Barat	1,01	1,17
Riau	1,29	1,35
Jambi	1,14	1,05
Sumatera Selatan	1,52	1,26
Bengkulu	1,29	1,45
Lampung	1,48	1,58
Kep. Bangka Belitung	0,86	0,78
Kepulauan Riau	1,20	1,43
DKI Jakarta	1,10	1,33
Jawa Barat	1,29	1,18
Jawa Tengah	1,04	0,84
DI Yogyakarta	1,50	1,48
Jawa Timur	1,02	0,87
Banten	0,98	1,13
Bali	0,63	0,45
Nusa Tenggara Barat	2,14	1,94
Nusa Tenggara Timur	1,14	0,96
Kalimantan Barat	0,80	0,69
Kalimantan Tengah	0,76	0,83
Kalimantan Selatan	0,96	1,11
Kalimantan Timur	1,29	1,27
Kalimantan Utara	2,19	1,82
Sulawesi Utara	1,23	0,94
Sulawesi Tengah	1,84	1,52
Sulawesi Selatan	1,31	1,17
Sulawesi Tenggara	1,66	1,16
Gorontalo	1,20	1,04
Sulawesi Barat	0,72	0,86
Maluku	1,30	1,16
Maluku Utara	1,47	1,21
Papua Barat	1,88	2,02
Papua	1,55	1,65
INDONESIA	1,08	1,11

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

Tabel 3.1.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017-2018

Provinsi	2017		2018	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	64,88	35,12	65,01	34,99
Sumatera Utara	63,07	36,93	66,11	33,89
Sumatera Barat	52,94	47,06	55,73	44,27
Riau	65,57	34,43	68,88	31,12
Jambi	67,03	32,97	66,08	33,92
Sumatera Selatan	70,48	29,52	70,19	29,81
Bengkulu	74,32	25,68	71,19	28,81
Lampung	72,57	27,43	73,37	26,63
Kep. Bangka Belitung	76,70	23,30	77,45	22,55
Kepulauan Riau	64,85	35,15	63,28	36,72
DKI, Jakarta	57,15	42,85	61,84	38,16
Jawa Barat	65,68	34,32	62,01	37,99
Jawa Tengah	56,32	43,68	57,86	42,14
DI,Yogyakarta	56,14	43,86	58,10	41,90
Jawa Timur	63,59	36,41	59,98	40,02
Banten	66,37	33,63	66,03	33,97
Bali	65,14	34,86	60,34	39,66
Nusa Tenggara Barat	56,19	43,81	65,77	34,23
Nusa Tenggara Timur	70,09	29,91	72,60	27,40
Kalimantan Barat	64,09	35,91	65,30	34,70
Kalimantan Tengah	66,57	33,43	66,50	33,50
Kalimantan Selatan	61,90	38,10	61,93	38,07
Kalimantan Timur	73,37	26,63	52,92	47,08
Kalimantan Utara	68,16	31,84	74,63	25,37
Sulawesi Utara	66,47	33,53	64,92	35,08
Sulawesi Tengah	57,65	42,35	66,93	33,07
Sulawesi Selatan	55,05	44,95	51,06	48,94
Sulawesi Tenggara	61,57	38,43	61,73	38,27
Gorontalo	53,40	46,60	60,33	39,67
Sulawesi Barat	62,58	37,42	67,03	32,97
Maluku	57,10	42,90	63,69	36,31
Maluku Utara	66,19	33,81	72,85	27,15
Papua Barat	67,20	32,80	64,74	35,26
Papua	67,73	32,27	67,62	32,38
INDONESIA	63,25	36,75	63,07	36,93

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

Keterangan : L=Laki-laki; P=Perempuan

**Tabel 3.1.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur,
Tahun 2017-2018**

Provinsi	2017		2018	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	6,21	93,79	8,01	91,99
Sumatera Utara	7,98	92,02	6,84	93,16
Sumatera Barat	9,89	90,11	8,21	91,79
Riau	7,84	92,16	7,15	92,85
Jambi	6,81	93,19	5,04	94,96
Sumatera Selatan	8,38	91,62	6,61	93,39
Bengkulu	5,10	94,90	7,62	92,38
Lampung	8,33	91,67	7,16	92,84
Kep. Bangka Belitung	3,65	96,35	1,75	98,25
Kepulauan Riau	3,11	96,89	9,74	90,26
DKI Jakarta	6,36	93,64	3,64	96,36
Jawa Barat	6,65	93,35	5,87	94,13
Jawa Tengah	6,88	93,12	6,18	93,82
DI Yogyakarta	6,22	93,78	5,41	94,59
Jawa Timur	8,02	91,98	5,56	94,44
Banten	4,18	95,82	9,50	90,50
Bali	2,54	97,46	1,50	98,50
Nusa Tenggara Barat	5,29	94,71	7,54	92,46
Nusa Tenggara Timur	9,62	90,38	3,46	96,54
Kalimantan Barat	8,53	91,47	7,13	92,87
Kalimantan Tengah	8,15	91,85	7,37	92,63
Kalimantan Selatan	8,25	91,75	8,95	91,05
Kalimantan Timur	1,51	98,49	3,89	96,11
Kalimantan Utara	5,97	94,03	3,79	96,21
Sulawesi Utara	6,69	93,31	5,60	94,40
Sulawesi Tengah	8,29	91,71	6,49	93,51
Sulawesi Selatan	8,89	91,11	9,27	90,73
Sulawesi Tenggara	11,13	88,87	4,25	95,75
Gorontalo	3,95	96,05	3,00	97,00
Sulawesi Barat	7,65	92,35	12,00	88,00
Maluku	10,47	89,53	10,06	89,94
Maluku Utara	8,79	91,21	8,25	91,75
Papua Barat	8,01	91,99	10,45	89,55
Papua	5,04	94,96	12,96	87,04
INDONESIA	7,11	92,89	6,57	93,43

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

**Tabel 3.1.5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi,
Tahun 2017-2018**

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
Aceh	90,00	87,90
Sumatera Utara	89,59	86,78
Sumatera Barat	86,86	85,20
Riau	91,79	89,23
Jambi	90,51	88,44
Sumatera Selatan	87,96	90,26
Bengkulu	93,13	93,49
Lampung	86,64	89,95
Kep. Bangka Belitung	87,43	92,84
Kepulauan Riau	82,00	94,60
DKI Jakarta	82,04	88,95
Jawa Barat	85,14	87,25
Jawa Tengah	79,08	76,64
DI Yogyakarta	71,25	62,14
Jawa Timur	80,20	76,48
Banten	92,91	88,13
Bali	80,75	76,29
Nusa Tenggara Barat	86,93	87,91
Nusa Tenggara Timur	85,96	81,36
Kalimantan Barat	86,61	83,84
Kalimantan Tengah	85,76	86,28
Kalimantan Selatan	82,42	79,50
Kalimantan Timur	85,89	79,06
Kalimantan Utara	89,57	94,11
Sulawesi Utara	86,93	84,93
Sulawesi Tengah	87,24	87,49
Sulawesi Selatan	84,45	89,08
Sulawesi Tenggara	77,57	91,13
Gorontalo	86,88	89,23
Sulawesi Barat	78,16	82,95
Maluku	90,45	82,14
Maluku Utara	85,01	92,32
Papua Barat	85,25	83,40
Papua	78,78	79,97
INDONESIA	84,47	84,48

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
Aceh	4,65	4,25
Sumatera Utara	4,81	3,75
Sumatera Barat	6,25	7,29
Riau	3,08	6,23
Jambi	4,55	2,80
Sumatera Selatan	2,14	5,16
Bengkulu	2,10	2,96
Lampung	5,01	1,45
Kep. Bangka Belitung	2,55	7,28
Kepulauan Riau	5,05	3,95
DKI Jakarta	4,45	5,32
Jawa Barat	3,86	2,58
Jawa Tengah	5,65	3,20
DI Yogyakarta	7,22	8,45
Jawa Timur	3,65	3,75
Banten	5,09	3,82
Bali	3,45	11,38
Nusa Tenggara Barat	7,67	2,59
Nusa Tenggara Timur	10,39	11,20
Kalimantan Barat	3,89	2,02
Kalimantan Tengah	4,54	3,21
Kalimantan Selatan	4,29	3,09
Kalimantan Timur	0,93	3,46
Kalimantan Utara*	2,47	0,67
Sulawesi Utara	11,89	8,69
Sulawesi Tengah	10,57	5,89
Sulawesi Selatan	5,55	4,20
Sulawesi Tenggara	13,09	3,39
Gorontalo	8,34	4,32
Sulawesi Barat	5,01	4,48
Maluku	6,99	11,24
Maluku Utara	11,42	2,56
Papua Barat	13,82	6,45
Papua	12,71	7,00
INDONESIA	5,12	4,05

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.7 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
A c e h	0,76	1,08
Sumatera Utara	3,98	5,88
Sumatera Barat	3,78	2,10
Riau	0,65	2,86
Jambi	3,21	6,79
Sumatera Selatan	3,86	6,96
Bengkulu	2,36	3,64
Lampung	4,04	4,57
Kep. Bangka Belitung	-	0,86
Kepulauan Riau	2,63	2,09
DKI Jakarta	3,83	5,10
Jawa Barat	4,85	3,04
Jawa Tengah	2,10	1,61
DI Yogyakarta	4,98	0,88
Jawa Timur	3,67	2,84
Banten	1,30	4,12
Bali	2,37	-
Nusa Tenggara Barat	3,70	1,56
Nusa Tenggara Timur	0,63	2,14
Kalimantan Barat	1,80	3,73
Kalimantan Tengah	3,76	0,39
Kalimantan Selatan	3,69	6,17
Kalimantan Timur	-	2,19
Kalimantan Utara*	0,79	-
Sulawesi Utara	1,00	1,02
Sulawesi Tengah	2,34	2,14
Sulawesi Selatan	4,24	4,47
Sulawesi Tenggara	0,77	1,34
Gorontalo	1,65	0,64
Sulawesi Barat	1,18	1,79
Maluku	1,33	1,92
Maluku Utara	1,39	0,59
Papua Barat	1,92	4,86
Papua	8,23	5,75
INDONESIA	3,31	3,30

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
A c e h	0,35	0,67
Sumatera Utara	0,93	3,09
Sumatera Barat	2,09	2,32
Riau	0,57	1,47
Jambi	3,85	2,19
Sumatera Selatan	0,44	2,28
Bengkulu	3,00	1,90
Lampung	0,99	0,61
Kep. Bangka Belitung	1,47	0,43
Kepulauan Riau	0,98	2,46
DKI Jakarta	0,55	4,73
Jawa Barat	2,32	2,00
Jawa Tengah	1,68	1,30
DI Yogyakarta	4,36	2,95
Jawa Timur	2,56	3,17
Banten	1,08	2,83
Bali	-	1,71
Nusa Tenggara Barat	2,21	0,14
Nusa Tenggara Timur	1,54	1,85
Kalimantan Barat	1,21	0,81
Kalimantan Tengah	2,77	-
Kalimantan Selatan	2,17	0,44
Kalimantan Timur	-	0,81
Kalimantan Utara*	1,08	0,05
Sulawesi Utara	1,59	3,73
Sulawesi Tengah	2,15	1,94
Sulawesi Selatan	2,11	0,92
Sulawesi Tenggara	1,45	1,38
Gorontalo	2,45	1,31
Sulawesi Barat	1,67	-
Maluku	0,74	2,25
Maluku Utara	1,25	1,42
Papua Barat	0,39	1,69
Papua	1,87	1,34
INDONESIA	1,76	2,03

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejadian, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
A c e h	9,83	8,09
Sumatera Utara	5,36	10,83
Sumatera Barat	11,17	11,13
Riau	6,83	9,69
Jambi	13,88	9,60
Sumatera Selatan	12,32	8,26
Bengkulu	6,12	8,24
Lampung	10,62	7,08
Kep. Bangka Belitung	11,86	3,34
Kepulauan Riau	12,66	13,26
DKI Jakarta	20,78	17,75
Jawa Barat	16,47	12,53
Jawa Tengah	18,84	22,22
DI Yogyakarta	24,98	31,10
Jawa Timur	21,63	22,64
Banten	15,60	13,90
Bali	16,12	19,48
Nusa Tenggara Barat	12,14	10,27
Nusa Tenggara Timur	10,09	10,06
Kalimantan Barat	14,95	15,68
Kalimantan Tengah	16,89	13,33
Kalimantan Selatan	16,71	13,10
Kalimantan Timur	14,74	17,34
Kalimantan Utara	14,78	6,14
Sulawesi Utara	4,13	9,05
Sulawesi Tengah	6,20	8,63
Sulawesi Selatan	14,21	5,62
Sulawesi Tenggara	9,64	5,47
Gorontalo	11,42	7,07
Sulawesi Barat	17,22	12,68
Maluku	5,13	5,90
Maluku Utara	7,33	8,49
Papua Barat	7,81	8,62
Papua	11,11	14,69
INDONESIA	14,99	14,09

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.10 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
A c e h	15,21	19,39
Sumatera Utara	21,94	27,87
Sumatera Barat	25,70	24,79
Riau	19,34	22,74
Jambi	20,30	21,44
Sumatera Selatan	22,37	25,59
Bengkulu	20,44	16,70
Lampung	20,23	21,07
Kep. Bangka Belitung	19,18	30,96
Kepulauan Riau	15,28	27,23
DKI Jakarta	33,73	35,93
Jawa Barat	26,07	24,94
Jawa Tengah	19,42	19,84
DI Yogyakarta	25,67	14,53
Jawa Timur	23,86	23,46
Banten	30,45	28,66
Bali	19,38	25,46
Nusa Tenggara Barat	17,19	19,39
Nusa Tenggara Timur	13,05	20,07
Kalimantan Barat	26,42	29,57
Kalimantan Tengah	26,19	16,55
Kalimantan Selatan	28,44	20,01
Kalimantan Timur	30,53	28,13
Kalimantan Utara	18,56	22,36
Sulawesi Utara	27,66	26,41
Sulawesi Tengah	20,91	18,07
Sulawesi Selatan	25,66	26,00
Sulawesi Tenggara	20,19	19,89
Gorontalo	20,45	13,26
Sulawesi Barat	20,27	10,95
Maluku	14,16	20,93
Maluku Utara	20,93	13,78
Papua Barat	35,66	32,77
Papua	26,26	21,15
INDONESIA	23,44	23,92

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.11 Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapat Penanganan Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2017-2018

Provinsi (1)	2017 (2)	2018 (3)
A c e h	84,87	84,98
Sumatera Utara	76,38	75,62
Sumatera Barat	78,80	82,58
Riau	81,94	74,20
Jambi	87,46	72,92
Sumatera Selatan	77,19	86,70
Bengkulu	83,09	91,66
Lampung	77,16	87,96
Kep. Bangka Belitung	91,89	84,45
Kepulauan Riau	82,24	82,72
DKI Jakarta	79,85	73,21
Jawa Barat	77,29	72,57
Jawa Tengah	81,44	80,89
DI Yogyakarta	77,66	54,99
Jawa Timur	77,60	83,94
Banten	74,54	81,81
Bali	87,86	88,68
Nusa Tenggara Barat	83,51	83,09
Nusa Tenggara Timur	82,65	96,62
Kalimantan Barat	86,60	84,88
Kalimantan Tengah	84,40	89,18
Kalimantan Selatan	78,66	88,79
Kalimantan Timur	83,49	76,47
Kalimantan Utara	85,20	96,80
Sulawesi Utara	79,98	91,43
Sulawesi Tengah	80,73	71,10
Sulawesi Selatan	77,36	72,02
Sulawesi Tenggara	77,73	85,73
Gorontalo	92,68	61,52
Sulawesi Barat	88,94	64,74
Maluku	82,58	90,28
Maluku Utara	69,17	74,22
Papua Barat	75,95	86,43
Papua	82,85	85,60
INDONESIA	79,03	79,11

Sumber : Diolah dari Susenas 2018 dan 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.12 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, Tahun 2018

Provinsi	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan Kekerasan	Pelecehan Seksual	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	14,26	1,93	1,08	0,39	3,28
Sumatera Utara	21,76	2,57	4,08	1,86	5,27
Sumatera Barat	20,49	3,74	2,00	1,89	2,62
Riau	20,17	1,52	1,13	0,99	3,04
Jambi	17,30	1,60	4,84	1,60	2,93
Sumatera Selatan	20,26	3,37	3,60	1,21	1,83
Bengkulu	12,39	1,84	2,51	0,78	3,57
Lampung	17,38	0,77	1,41	0,41	2,62
Kep. Bangka Belitung	26,02	7,28	-	-	0,60
Kepulauan Riau	22,83	3,66	2,03	2,46	7,81
DKI Jakarta	30,24	4,30	4,16	3,02	8,54
Jawa Barat	21,51	1,17	1,93	0,57	2,38
Jawa Tengah	14,18	1,40	0,32	0,38	4,49
DI Yogyakarta	12,12	2,59	0,88	0,88	1,23
Jawa Timur	18,21	1,97	1,53	1,61	4,58
Banten	24,08	1,42	2,50	1,59	4,92
Bali	21,41	-	-	-	4,80
Nusa Tenggara Barat	15,83	0,35	0,89	-	2,92
Nusa Tenggara Timur	8,07	7,66	1,38	0,96	5,92
Kalimantan Barat	24,02	1,43	2,49	0,81	5,80
Kalimantan Tengah	11,50	1,93	-	-	4,13
Kalimantan Selatan	13,69	1,56	3,10	0,44	2,03
Kalimantan Timur	23,64	1,63	1,07	-	3,45
Kalimantan Utara	21,56	0,21	-	0,05	0,75
Sulawesi Utara	17,09	5,93	0,25	2,42	2,25
Sulawesi Tengah	13,87	2,77	1,74	1,94	1,95
Sulawesi Selatan	22,94	2,01	0,77	0,39	2,01
Sulawesi Tenggara	15,63	1,29	0,68	1,11	2,36
Gorontalo	7,24	1,65	-	0,67	3,71
Sulawesi Barat	7,69	2,19	-	-	1,07
Maluku	8,63	9,07	-	2,24	2,41
Maluku Utara	10,89	1,47	0,59	-	1,17
Papua Barat	21,47	2,85	3,99	0,76	5,38
Papua	15,25	2,45	0,66	0,98	2,50
INDONESIA	19,15	2,05	1,82	1,03	3,66

Sumber : Diolah dari Susenas 2019

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

https://www.bps.go.id

DATA MODUL KETAHANAN SOSIAL

Tabel 4.1.1 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, Tahun 2017

Provinsi	2017
(1)	(2)
A c e h	50,93
Sumatera Utara	50,62
Sumatera Barat	43,32
Riau	51,15
Jambi	54,90
Sumatera Selatan	52,35
Bengkulu	66,47
Lampung	58,75
Kep. Bangka Belitung	47,80
Kepulauan Riau	71,43
DKI Jakarta	50,57
Jawa Barat	43,72
Jawa Tengah	63,50
DI Yogyakarta	64,62
Jawa Timur	58,18
Banten	42,24
Bali	73,43
Nusa Tenggara Barat	52,71
Nusa Tenggara Timur	46,47
Kalimantan Barat	54,74
Kalimantan Tengah	46,04
Kalimantan Selatan	59,02
Kalimantan Timur	55,42
Kalimantan Utara*	56,58
Sulawesi Utara	52,05
Sulawesi Tengah	50,43
Sulawesi Selatan	48,28
Sulawesi Tenggara	58,24
Gorontalo	34,28
Sulawesi Barat	66,10
Maluku	55,08
Maluku Utara	58,92
Papua Barat	46,95
Papua	58,69
INDONESIA	53,32

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

Tabel 4.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, Tahun 2017

Provinsi (1)	Khawatir (2)	Tidak Khawatir (3)
A c e h	19,12	80,88
Sumatera Utara	23,66	76,34
Sumatera Barat	22,37	77,63
Riau	18,25	81,75
Jambi	24,43	75,57
Sumatera Selatan	25,23	74,77
Bengkulu	13,89	86,11
Lampung	24,14	75,86
Kep. Bangka Belitung	31,57	68,43
Kepulauan Riau	19,95	80,05
DKI Jakarta	34,36	65,64
Jawa Barat	29,88	70,12
Jawa Tengah	16,16	83,84
DI Yogyakarta	16,58	83,42
Jawa Timur	18,66	81,34
Banten	37,64	62,36
Bali	10,24	89,76
Nusa Tenggara Barat	18,96	81,04
Nusa Tenggara Timur	23,64	76,36
Kalimantan Barat	19,16	80,84
Kalimantan Tengah	26,13	73,87
Kalimantan Selatan	10,69	89,31
Kalimantan Timur	23,15	76,85
Kalimantan Utara	17,84	82,16
Sulawesi Utara	28,68	71,32
Sulawesi Tengah	28,88	71,12
Sulawesi Selatan	30,30	69,70
Sulawesi Tenggara	25,02	74,98
Gorontalo	36,61	63,39
Sulawesi Barat	16,24	83,76
Maluku	25,29	74,71
Maluku Utara	22,72	77,28
Papua Barat	31,89	68,11
Papua	15,51	84,49
INDONESIA	23,45	76,55

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

Tabel 4.1.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, Tahun 2017

Provinsi (1)	Khawatir (2)	Tidak Khawatir (3)
A c e h	64,21	35,79
Sumatera Utara	63,12	36,88
Sumatera Barat	56,52	43,48
Riau	59,33	40,67
Jambi	67,79	32,21
Sumatera Selatan	64,94	35,06
Bengkulu	53,44	46,56
Lampung	65,83	34,17
Kep. Bangka Belitung	61,39	38,61
Kepulauan Riau	43,04	56,96
DKI Jakarta	69,89	30,11
Jawa Barat	65,41	34,59
Jawa Tengah	50,89	49,11
DI Yogyakarta	39,88	60,12
Jawa Timur	54,06	45,94
Banten	65,82	34,18
Bali	33,74	66,26
Nusa Tenggara Barat	49,94	50,06
Nusa Tenggara Timur	64,21	35,79
Kalimantan Barat	61,03	38,97
Kalimantan Tengah	64,31	35,69
Kalimantan Selatan	48,81	51,19
Kalimantan Timur	59,59	40,41
Kalimantan Utara	48,28	51,72
Sulawesi Utara	61,47	38,53
Sulawesi Tengah	64,26	35,74
Sulawesi Selatan	61,77	38,23
Sulawesi Tenggara	61,91	38,09
Gorontalo	79,47	20,53
Sulawesi Barat	53,42	46,58
Maluku	50,73	49,27
Maluku Utara	54,14	45,86
Papua Barat	58,76	41,24
Papua	47,18	52,82
INDONESIA	58,85	41,15

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

Tabel 4.1.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, Tahun 2017

Provinsi	Portal	Penerangan Jalan	Hansip/Satpam
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1,76	69,98	2,47
Sumatera Utara	6,97	63,32	5,54
Sumatera Barat	2,85	48,62	1,84
Riau	10,28	58,00	6,08
Jambi	4,86	48,60	3,81
Sumatera Selatan	5,79	55,18	14,56
Bengkulu	3,84	31,38	14,76
Lampung	3,90	62,21	19,10
Kep. Bangka Belitung	1,73	39,69	5,33
Kepulauan Riau	28,01	60,49	28,72
DKI Jakarta	42,64	86,42	61,16
Jawa Barat	12,70	66,67	30,81
Jawa Tengah	4,84	83,69	8,57
DI Yogyakarta	10,93	93,84	3,76
Jawa Timur	7,47	81,83	9,77
Banten	11,30	68,59	20,38
Bali	1,01	69,44	5,32
Nusa Tenggara Barat	2,13	50,12	2,49
Nusa Tenggara Timur	0,22	11,84	3,78
Kalimantan Barat	3,46	41,28	1,00
Kalimantan Tengah	5,75	43,60	8,52
Kalimantan Selatan	3,33	61,80	4,59
Kalimantan Timur	8,41	62,10	11,17
Kalimantan Utara	1,73	47,55	1,47
Sulawesi Utara	6,85	66,13	20,97
Sulawesi Tengah	0,70	42,12	11,26
Sulawesi Selatan	6,50	53,16	5,98
Sulawesi Tenggara	0,40	22,28	1,51
Gorontalo	0,72	47,81	0,39
Sulawesi Barat	0,34	27,77	2,94
Maluku	1,20	40,77	3,19
Maluku Utara	0,57	46,72	4,62
Papua Barat	0,69	34,10	5,00
Papua	0,70	21,66	5,77
INDONESIA	8,67	66,62	15,26

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

Lanjutan Tabel 4.1.4

Provinsi	Penerapan Wajib Lapor Bagi Pendatang	Siskamling/ Ronda	Sarana/Tata Cara Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)
A c e h	64,11	7,99	0,26
Sumatera Utara	38,15	18,44	0,30
Sumatera Barat	35,90	16,57	0,08
Riau	61,79	24,43	0,06
Jambi	61,43	33,37	0,00
Sumatera Selatan	54,34	34,70	0,49
Bengkulu	59,37	21,82	0,00
Lampung	73,62	67,80	0,05
Kep. Bangka Belitung	73,05	15,58	0,12
Kepulauan Riau	81,59	18,73	0,11
DKI Jakarta	90,79	52,99	0,33
Jawa Barat	75,58	61,99	0,78
Jawa Tengah	74,37	36,95	0,27
DI Yogyakarta	83,04	79,14	3,04
Jawa Timur	67,01	23,67	0,38
Banten	66,12	54,21	0,81
Bali	55,24	7,75	0,09
Nusa Tenggara Barat	21,95	18,63	0,05
Nusa Tenggara Timur	23,11	1,55	0,99
Kalimantan Barat	42,04	8,77	0,65
Kalimantan Tengah	59,87	12,22	0,47
Kalimantan Selatan	64,65	17,63	0,22
Kalimantan Timur	85,93	34,73	0,22
Kalimantan Utara	82,44	10,56	0,00
Sulawesi Utara	76,97	27,28	2,48
Sulawesi Tengah	32,22	11,54	0,08
Sulawesi Selatan	20,04	11,31	0,33
Sulawesi Tenggara	21,78	4,83	0,57
Gorontalo	36,13	0,42	0,01
Sulawesi Barat	13,24	14,99	0,00
Maluku	17,03	2,78	0,12
Maluku Utara	25,70	2,95	0,08
Papua Barat	16,75	6,88	0,00
Papua	7,72	10,34	1,16
INDONESIA	62,67	35,16	0,48

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

Tabel 4.1.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Pengamanan yang Digunakan di Tempat Tinggal/Rumah, Tahun 2017

Provinsi	Gembok/Kunci/ Palang Pintu yang Berlapis	Teralis Pintu/Jendela	Pagar yang Tinggi (minimal 2 Meter)	Kawat berduri/Paku/ Pecahan Kaca di Atas Pagar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	51,96	20,33	3,81	1,29
Sumatera Utara	72,93	44,85	4,86	1,21
Sumatera Barat	61,30	25,35	4,97	0,89
Riau	80,87	36,18	6,32	1,32
Jambi	81,99	29,40	5,40	1,08
Sumatera Selatan	80,52	35,50	6,83	1,14
Bengkulu	69,47	30,81	4,78	1,98
Lampung	74,04	28,50	7,39	0,77
Kep. Bangka Belitung	65,38	29,18	6,11	1,53
Kepulauan Riau	77,50	40,07	9,53	0,61
DKI Jakarta	63,82	29,03	14,16	1,97
Jawa Barat	62,60	17,33	8,76	0,48
Jawa Tengah	56,13	12,19	4,51	0,40
DI Yogyakarta	58,20	21,32	7,01	0,43
Jawa Timur	59,54	15,65	8,01	0,82
Banten	57,63	22,77	6,03	0,54
Bali	12,06	12,07	20,29	0,64
Nusa Tenggara Barat	47,03	21,99	6,30	1,79
Nusa Tenggara Timur	38,33	10,39	3,74	0,41
Kalimantan Barat	56,54	14,38	2,96	0,21
Kalimantan Tengah	85,85	18,87	3,86	0,53
Kalimantan Selatan	61,34	14,25	2,90	0,46
Kalimantan Timur	81,65	32,36	8,44	0,99
Kalimantan Utara	71,46	20,99	3,39	0,00
Sulawesi Utara	55,89	19,10	9,60	0,56
Sulawesi Tengah	59,43	22,50	8,57	0,96
Sulawesi Selatan	60,23	27,35	12,10	2,15
Sulawesi Tenggara	46,35	17,38	3,87	0,94
Gorontalo	38,61	22,26	6,53	1,86
Sulawesi Barat	68,43	15,95	3,13	0,54
Maluku	37,85	10,52	0,88	0,26
Maluku Utara	48,37	13,99	4,06	0,66
Papua Barat	52,31	14,26	6,99	2,23
Papua	53,94	17,00	10,96	1,27
INDONESIA	61,21	20,92	7,32	0,83

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

Lanjutan Tabel 4.1.5

Provinsi	Alarm	Kamera CCTV	Hewan Penjaga (Anjing/Angsa)	Petugas Keamanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,02	0,27	1,08	0,06
Sumatera Utara	0,46	1,29	5,79	1,27
Sumatera Barat	0,11	0,16	6,89	0,29
Riau	0,29	0,93	3,11	0,55
Jambi	0,05	0,57	2,76	0,42
Sumatera Selatan	0,15	0,88	4,58	1,02
Bengkulu	1,26	0,46	5,20	1,98
Lampung	0,07	0,32	1,20	1,25
Kep. Bangka Belitung	0,15	0,59	4,60	0,32
Kepulauan Riau	1,61	4,03	2,32	14,83
DKI Jakarta	1,54	3,27	2,41	3,96
Jawa Barat	0,52	0,61	0,57	0,16
Jawa Tengah	0,09	0,45	0,59	0,64
DI Yogyakarta	0,00	0,96	2,01	0,58
Jawa Timur	0,26	0,39	0,75	0,58
Banten	0,34	0,86	0,53	5,57
Bali	0,21	0,68	31,79	0,53
Nusa Tenggara Barat	0,09	0,04	3,32	0,89
Nusa Tenggara Timur	0,03	0,43	29,23	0,12
Kalimantan Barat	0,22	0,80	7,27	0,18
Kalimantan Tengah	0,04	0,23	4,56	0,00
Kalimantan Selatan	0,20	0,88	1,40	0,87
Kalimantan Timur	0,14	2,10	2,25	2,20
Kalimantan Utara	0,00	0,40	6,02	0,22
Sulawesi Utara	0,04	0,39	21,33	0,69
Sulawesi Tengah	0,00	0,33	10,15	0,63
Sulawesi Selatan	1,26	1,96	9,89	1,81
Sulawesi Tenggara	0,07	0,35	2,85	0,14
Gorontalo	0,00	0,30	6,34	0,21
Sulawesi Barat	0,00	0,18	7,05	1,60
Maluku	0,02	0,02	7,98	0,09
Maluku Utara	0,08	0,16	4,98	0,00
Papua Barat	0,18	0,71	17,09	0,12
Papua	0,12	0,38	23,97	0,65
INDONESIA	0,35	0,76	3,67	1,09

Sumber : Diolah dari Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017

DATA POTENSI DESA

Tabel 4.2.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2011		2014		2018	
	Jumlah (1)	% (2)	Jumlah (4)	% (5)	Jumlah (6)	% (7)
1. Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	31 145	39,62	41 611	50,63	46 752	55,70
2. Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	31 288	39,80	35 629	43,35	39 585	47,16
3. Menambah Jumlah Anggota Hansip	1 262	16,05	19 299	23,48	20 869	24,86
4. Memeriksa Setiap Orang Asing	34 982	44,50	-	-	-	-
5. Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan *)	-	-	48 357	58,84	52 240	62,24

Sumber : Diolah dari Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Keterangan : *) Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Tabel 4.2.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga keamanan Tahun 2011

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2 797	2 154	657	3 587
Sumatera Utara	1 561	1 785	363	1 907
Sumatera Barat	624	491	128	527
Riau	842	784	365	814
Jambi	625	469	130	486
Sumatera Selatan	1 536	1 478	533	1 426
Bengkulu	667	663	231	623
Lampung	1 359	1 591	572	1 263
Kep. Bangka Belitung	142	170	57	154
Kepulauan Riau	141	181	102	182
DKI Jakarta	186	232	171	181
Jawa Barat	3 833	3 829	1 889	4 041
Jawa Tengah	2 574	3 395	1 297	4 467
DI Yogyakarta	272	257	114	167
Jawa Timur	3 119	3 602	145	4 611
Banten	977	971	380	880
Bali	189	164	84	484
Nusa Tenggara Barat	605	587	129	415
Nusa Tenggara Timur	955	916	545	858
Kalimantan Barat	470	503	195	623
Kalimantan Tengah	775	545	231	564
Kalimantan Selatan	664	419	151	537
Kalimantan Timur	738	620	300	525
Sulawesi Utara	803	857	490	129
Sulawesi Tengah	780	816	394	806
Sulawesi Selatan	1 685	1 353	440	1 303
Sulawesi Tenggara	978	923	283	790
Gorontalo	181	288	168	328
Sulawesi Barat	358	271	86	193
Maluku	185	259	110	268
Maluku Utara	175	217	161	250
Papua Barat	99	146	104	121
Papua	250	352	310	311
INDONESIA	31 145	31 288	1 262	34 982

Sumber : Diolah dari Podes 2011

Tabel 4.2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
	(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2 819	1 927	656	5 375
Sumatera Utara	1 368	1 056	324	2 248
Sumatera Barat	813	563	236	770
Riau	1 083	915	357	1 118
Jambi	101	750	328	1 002
Sumatera Selatan	1 902	1 636	738	2 044
Bengkulu	1 118	1 019	402	1 003
Lampung	2 032	1 933	1 118	1 982
Kep. Bangka Belitung	210	157	113	272
Kepulauan Riau	193	176	165	294
DKI Jakarta	227	223	138	245
Jawa Barat	4 976	461	2 445	5 029
Jawa Tengah	5 098	4 595	2 269	6 218
DI Yogyakarta	365	310	195	329
Jawa Timur	5 171	4 469	289	6 268
Banten	1 181	906	497	1 044
Bali	374	445	97	499
Nusa Tenggara Barat	826	677	324	597
Nusa Tenggara Timur	772	858	622	746
Kalimantan Barat	548	488	433	952
Kalimantan Tengah	991	734	467	1 035
Kalimantan Selatan	1 167	640	368	1 124
Kalimantan Timur	758	664	351	796
Kalimantan Utara	177	134	73	250
Sulawesi Utara	109	1 166	611	1 517
Sulawesi Tengah	1 105	1 129	612	1 296
Sulawesi Selatan	1 941	1 256	792	1 322
Sulawesi Tenggara	104	802	403	885
Gorontalo	253	401	254	483
Sulawesi Barat	342	227	173	258
Maluku	183	200	188	470
Maluku Utara	159	197	183	450
Papua Barat	132	145	143	213
Papua	187	221	334	223
INDONESIA	41 611	35 629	19 299	48 357

Sumber : Diolah dari Podes 2014

Tabel 4.2.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2 329	1 404	614	5 083
Sumatera Utara	1 903	1 396	594	2 516
Sumatera Barat	971	723	351	962
Riau	1 196	985	416	1 292
Jambi	1 112	749	426	1 029
Sumatera Selatan	2 243	2 003	917	2 201
Bengkulu	1 051	888	323	1 089
Lampung	2 198	2 071	863	2 114
Kep. Bangka Belitung	245	209	128	304
Kepulauan Riau	194	181	108	309
DKI Jakarta	190	199	125	242
Jawa Barat	5 409	4 709	2 375	5 134
Jawa Tengah	5 999	5 140	2 511	6 437
DI Yogyakarta	392	347	222	376
Jawa Timur	6 321	5 245	3 086	6 614
Banten	1 280	1 035	602	1 258
Bali	395	380	123	556
Nusa Tenggara Barat	916	724	400	634
Nusa Tenggara Timur	1 085	1 244	867	979
Kalimantan Barat	963	838	521	1 208
Kalimantan Tengah	1 042	911	464	1 028
Kalimantan Selatan	1 243	799	425	1 240
Kalimantan Timur	744	594	267	742
Kalimantan Utara	241	177	101	286
Sulawesi Utara	1 167	1 136	429	1 636
Sulawesi Tengah	1 168	1 155	518	1 347
Sulawesi Selatan	1 896	1 325	825	1 623
Sulawesi Tenggara	1 055	901	522	947
Gorontalo	254	281	255	500
Sulawesi Barat	358	230	168	314
Maluku	252	316	226	647
Maluku Utara	248	348	317	723
Papua Barat	251	295	185	239
Papua	441	647	595	631
INDONESIA	46 752	39 585	20 869	52 240

Sumber : Diolah dari Podes 2018

Tabel 4.2.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2011

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan				
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	43,14	33,23	10,13	55,33	
Sumatera Utara	26,93	30,79	6,26	32,90	
Sumatera Barat	60,41	47,53	12,39	51,02	
Riau	50,88	47,37	22,05	49,18	
Jambi	45,55	34,18	9,48	35,42	
Sumatera Selatan	48,21	46,39	16,73	44,76	
Bengkulu	44,20	43,94	15,31	41,29	
Lampung	55,15	64,57	23,21	51,26	
Kep. Bangka Belitung	39,34	47,09	15,79	42,66	
Kepulauan Riau	39,94	51,27	28,90	51,56	
DKI Jakarta	69,66	86,89	64,04	67,79	
Jawa Barat	64,91	64,84	31,99	68,43	
Jawa Tengah	30,01	39,58	15,12	52,08	
DI Yogyakarta	62,10	58,68	26,03	38,13	
Jawa Timur	36,69	42,37	17,05	54,23	
Banten	63,65	63,26	24,76	57,33	
Bali	26,40	22,91	11,73	67,60	
Nusa Tenggara Barat	55,81	54,15	11,90	38,28	
Nusa Tenggara Timur	32,20	30,88	18,37	28,93	
Kalimantan Barat	23,89	25,57	9,91	31,67	
Kalimantan Tengah	50,72	35,67	15,12	36,91	
Kalimantan Selatan	33,20	20,95	7,55	26,85	
Kalimantan Timur	50,38	42,32	20,48	35,84	
Sulawesi Utara	47,43	50,62	28,94	76,20	
Sulawesi Tengah	42,98	44,96	21,71	44,41	
Sulawesi Selatan	56,51	45,37	14,76	43,70	
Sulawesi Tenggara	46,11	43,52	13,34	37,25	
Gorontalo	24,76	39,40	22,98	44,87	
Sulawesi Barat	56,11	42,48	13,48	30,25	
Maluku	18,07	25,29	10,74	26,17	
Maluku Utara	16,22	20,11	14,92	23,17	
Papua Barat	6,88	10,15	7,23	8,41	
Papua	6,37	8,97	7,90	7,93	
INDONESIA	39,62	39,80	16,05	44,50	

Sumber : Diolah dari Podes 2011

Tabel 4.2.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan				
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	43,29	29,59	10,07	82,54	
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83	
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25	
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93	
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60	
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14	
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47	
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30	
Kep. Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39	
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84	
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76	
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35	
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49	
DI Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11	
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72	
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31	
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69	
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32	
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81	
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14	
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97	
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98	
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58	
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19	
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63	
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26	
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63	
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95	
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63	
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81	
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20	
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63	
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59	
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58	
INDONESIA	50,63	43,35	23,48	58,84	

Sumber : Diolah dari Podes 2014

Tabel 4.2.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2018

Provinsi (1)	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling (2)	Membentuk Regu Kamling (3)	Menambah Anggota Hansip (4)	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam) (5)
A c e h	35,79	21,57	9,43	78,10
Sumatera Utara	31,03	22,77	9,69	41,03
Sumatera Barat	76,16	56,71	27,53	75,45
Riau	63,79	52,53	22,19	68,91
Jambi	71,19	47,95	27,27	65,88
Sumatera Selatan	68,76	61,40	28,11	67,47
Bengkulu	69,42	58,65	21,33	71,93
Lampung	82,82	78,03	32,52	79,65
Kep. Bangka Belitung	62,66	53,45	32,74	77,75
Kepulauan Riau	46,63	43,51	25,96	74,28
DKI Jakarta	71,16	74,53	46,82	90,64
Jawa Barat	90,80	79,05	39,87	86,18
Jawa Tengah	70,09	60,05	29,34	75,21
DI Yogyakarta	89,50	79,22	50,68	85,84
Jawa Timur	74,40	61,73	36,32	77,85
Banten	82,47	66,69	38,79	81,06
Bali	55,17	53,07	17,18	77,65
Nusa Tenggara Barat	80,14	63,34	35,00	55,47
Nusa Tenggara Timur	32,36	37,10	25,86	29,20
Kalimantan Barat	45,06	39,21	24,38	56,53
Kalimantan Tengah	66,12	57,80	29,44	65,23
Kalimantan Selatan	61,90	39,79	21,17	61,75
Kalimantan Timur	71,68	57,23	25,72	71,48
Kalimantan Utara	50,00	36,72	20,95	59,34
Sulawesi Utara	63,49	61,81	23,34	89,01
Sulawesi Tengah	57,82	57,18	25,64	66,68
Sulawesi Selatan	62,18	43,46	27,06	53,23
Sulawesi Tenggara	44,82	38,28	22,18	40,23
Gorontalo	34,60	38,28	34,74	68,12
Sulawesi Barat	55,08	35,38	25,85	48,31
Maluku	20,32	25,48	18,23	52,18
Maluku Utara	20,74	29,10	26,51	60,45
Papua Barat	12,63	14,85	9,31	12,03
Papua	7,94	11,65	10,72	11,37
INDONESIA	55,70	47,16	24,86	62,24

Sumber : Diolah dari Podes 2014

Tabel 4.2.8 Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, Tahun 2011,2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Percentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	2 797	2 819	2 329	10,13	43,29	35,79
Sumatera Utara	1 561	1 368	1 903	6,26	22,41	31,03
Sumatera Barat	624	813	971	12,39	71,00	76,16
Riau	842	1 083	1 196	22,05	59,02	63,79
Jambi	625	101	1 112	9,48	65,12	71,19
Sumatera Selatan	1 536	1 902	2 243	16,73	58,76	68,76
Bengkulu	667	1 118	1 051	15,31	72,98	69,42
Lampung	1 359	2 032	2 198	23,21	77,20	82,82
Kep. Bangka Belitung	142	210	245	15,79	55,12	62,66
Kepulauan Riau	141	193	194	28,90	46,51	46,63
DKI Jakarta	186	227	190	64,04	85,02	71,16
Jawa Barat	3 833	4 976	5 409	31,99	83,46	90,80
Jawa Tengah	2 574	5 098	5 999	15,12	59,43	70,09
DI Yogyakarta	272	365	392	26,03	83,33	89,50
Jawa Timur	3 119	5 171	6 321	17,05	60,82	74,40
Banten	977	1 181	1 280	24,76	76,14	82,47
Bali	189	374	395	11,73	52,23	55,17
Nusa Tenggara Barat	605	826	916	11,90	72,39	80,14
Nusa Tenggara Timur	955	772	1 085	18,37	23,61	32,36
Kalimantan Barat	470	548	963	9,91	25,98	45,06
Kalimantan Tengah	775	991	1 042	15,12	63,16	66,12
Kalimantan Selatan	664	1 167	1 243	7,55	58,12	61,90
Kalimantan Timur	738	758	744	20,48	73,88	71,68
Kalimantan Utara	-	177	241	-	36,95	50,00
Sulawesi Utara	803	109	1 167	47,43	59,37	63,49
Sulawesi Tengah	780	1 105	1 168	42,98	55,64	57,82
Sulawesi Selatan	1 685	1 941	1 896	56,51	64,06	62,18
Sulawesi Tenggara	978	104	1 055	46,11	45,77	44,82
Gorontalo	181	253	254	24,76	34,38	34,60
Sulawesi Barat	358	342	358	56,11	52,78	55,08
Maluku	185	183	252	18,07	16,82	20,32
Maluku Utara	175	159	248	16,22	13,29	20,74
Papua Barat	99	132	251	6,88	8,42	12,63
Papua	250	187	441	6,37	3,84	7,94
INDONESIA	31 145	41 611	46 752	39,62	50,63	55,70

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : * Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 4.2.9 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (4)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	2 154	2 819	1 404	33,23	29,59	21,57
Sumatera Utara	1 785	1 368	1 396	30,79	17,30	22,77
Sumatera Barat	491	813	723	47,53	49,17	56,71
Riau	784	1 083	985	47,37	49,86	52,53
Jambi	469	101	749	34,18	48,36	47,95
Sumatera Selatan	1 478	1 902	2 003	46,39	50,54	61,40
Bengkulu	663	1 118	888	43,94	66,51	58,65
Lampung	1 591	2 032	2 071	64,57	73,44	78,03
Kep. Bangka Belitung	170	210	209	47,09	41,21	53,45
Kepulauan Riau	181	193	181	51,27	42,41	43,51
DKI Jakarta	232	227	199	86,89	83,52	74,53
Jawa Barat	3 829	4 976	4 709	64,84	77,32	79,05
Jawa Tengah	3 395	5 098	5 140	39,58	53,57	60,05
DI Yogyakarta	257	365	347	58,68	70,78	79,22
Jawa Timur	3 602	5 171	5 245	42,37	52,56	61,73
Banten	971	1 181	1 035	63,26	58,41	66,69
Bali	164	374	380	22,91	62,15	53,07
Nusa Tenggara Barat	587	826	724	54,15	59,33	63,34
Nusa Tenggara Timur	916	772	1 244	30,88	26,24	37,10
Kalimantan Barat	503	548	838	25,57	23,14	39,21
Kalimantan Tengah	545	991	911	35,67	46,78	57,80
Kalimantan Selatan	419	1 167	799	20,95	31,87	39,79
Kalimantan Timur	620	758	594	42,32	64,72	57,23
Kalimantan Utara	-	177	177	-	27,97	36,72
Sulawesi Utara	857	109	1 136	50,62	63,51	61,81
Sulawesi Tengah	816	1 105	1 155	44,96	56,85	57,18
Sulawesi Selatan	1 353	1 941	1 325	45,37	41,45	43,46
Sulawesi Tenggara	923	104	901	43,52	35,30	38,28
Gorontalo	288	253	281	39,40	54,48	38,28
Sulawesi Barat	271	342	230	42,48	35,03	35,38
Maluku	259	183	316	25,29	18,38	25,48
Maluku Utara	217	159	348	20,11	16,47	29,10
Papua Barat	146	132	295	10,15	9,25	14,85
Papua	352	187	647	8,97	4,54	11,65
INDONESIA	31 288	41 611	39 585	39,80	43,35	47,16

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : * Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 4.2.10 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	657	656	656	10,13	10,07	9,43
Sumatera Utara	363	324	324	6,26	5,31	9,69
Sumatera Barat	128	236	236	12,39	20,61	27,53
Riau	365	357	357	22,05	19,46	22,19
Jambi	130	328	328	9,48	21,15	27,27
Sumatera Selatan	533	738	738	16,73	22,80	28,11
Bengkulu	231	402	402	15,31	26,24	21,33
Lampung	572	1 118	1 118	23,21	42,48	32,52
Kep. Bangka Belitung	57	113	113	15,79	29,66	32,74
Kepulauan Riau	102	165	165	28,90	39,76	25,96
DKI Jakarta	171	138	138	64,04	51,69	46,82
Jawa Barat	1 889	2 445	2 445	31,99	41,01	39,87
Jawa Tengah	1 297	2 269	2 269	15,12	26,45	29,34
DI Yogyakarta	114	195	195	26,03	44,52	50,68
Jawa Timur	145	289	289	17,05	33,99	36,32
Banten	380	497	497	24,76	32,04	38,79
Bali	84	97	97	11,73	13,55	17,18
Nusa Tenggara Barat	129	324	324	11,90	28,40	35,00
Nusa Tenggara Timur	545	622	622	18,37	19,02	25,86
Kalimantan Barat	195	433	433	9,91	20,53	24,38
Kalimantan Tengah	231	467	467	15,12	29,76	29,44
Kalimantan Selatan	151	368	368	7,55	18,33	21,17
Kalimantan Timur	300	351	351	20,48	34,21	25,72
Kalimantan Utara	-	73	73	-	15,24	20,95
Sulawesi Utara	490	611	611	28,94	33,28	23,34
Sulawesi Tengah	394	612	612	21,71	30,82	25,64
Sulawesi Selatan	440	792	792	14,76	26,14	27,06
Sulawesi Tenggara	283	403	403	13,34	17,74	22,18
Gorontalo	168	254	254	22,98	34,51	34,74
Sulawesi Barat	86	173	173	13,48	26,70	25,85
Maluku	110	188	188	10,74	17,28	18,23
Maluku Utara	161	183	183	14,92	15,30	26,51
Papua Barat	104	143	143	7,23	9,13	9,31
Papua	310	334	334	7,90	6,86	10,72
INDONESIA	1 262	19 299	19 299	16,05	23,48	24,86

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : * Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 4.2.11 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011 (1)	2014 (2)	2018 (3)	2011 (5)	2014 (6)	2018 (7)
A c e h	3 587	5 375	5 083	55,33	82,54	78,10
Sumatera Utara	1 907	2 248	2 516	32,90	36,83	41,03
Sumatera Barat	527	770	962	51,02	67,25	75,45
Riau	814	1 118	1 292	49,18	60,93	68,91
Jambi	486	1 002	1 029	35,42	64,60	65,88
Sumatera Selatan	1 426	2 044	2 201	44,76	63,14	67,47
Bengkulu	623	1 003	1 089	41,29	65,47	71,93
Lampung	1 263	1 982	2 114	51,26	75,30	79,65
Kep. Bangka Belitung	154	272	304	42,66	71,39	77,75
Kepulauan Riau	182	294	309	51,56	70,84	74,28
DKI Jakarta	181	245	242	67,79	91,76	90,64
Jawa Barat	4 041	5 029	5 134	68,43	84,35	86,18
Jawa Tengah	4 467	6 218	6 437	52,08	72,49	75,21
DI Yogyakarta	167	329	376	38,13	75,11	85,84
Jawa Timur	4 611	6 268	6 614	54,23	73,72	77,85
Banten	880	1 044	1 258	57,33	67,31	81,06
Bali	484	499	556	67,60	69,69	77,65
Nusa Tenggara Barat	415	597	634	38,28	52,32	55,47
Nusa Tenggara Timur	858	746	979	28,93	22,81	29,20
Kalimantan Barat	623	952	1 208	31,67	45,14	56,53
Kalimantan Tengah	564	1 035	1 028	36,91	65,97	65,23
Kalimantan Selatan	537	1 124	1 240	26,85	55,98	61,75
Kalimantan Timur	525	796	742	35,84	77,58	71,48
Kalimantan Utara	-	250	286	-	52,19	59,34
Sulawesi Utara	129	1 517	1 636	76,20	82,63	89,01
Sulawesi Tengah	806	1 296	1 347	44,41	65,26	66,68
Sulawesi Selatan	1 303	1 322	1 623	43,70	43,63	53,23
Sulawesi Tenggara	790	885	947	37,25	38,95	40,23
Gorontalo	328	483	500	44,87	65,63	68,12
Sulawesi Barat	193	258	314	30,25	39,81	48,31
Maluku	268	470	647	26,17	43,20	52,18
Maluku Utara	250	450	723	23,17	37,63	60,45
Papua Barat	121	213	239	8,41	13,59	12,03
Papua	311	223	631	7,93	4,58	11,37
INDONESIA	34 982	48 357	52 240	44,50	58,84	62,24

Sumber : Statistik Podes 2011, Podes 2014, dan Podes 2018

Catatan : * Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 4.2.12 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	355	6 157	1 118	4 353	582	104
Sumatera Utara	432	5 672	786	3 485	1 114	287
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18
Riau	380	1 455	295	891	243	26
Jambi	202	1 349	287	894	145	23
Sumatera Selatan	313	2 924	393	2 162	329	40
Bengkulu	105	1 427	290	940	175	22
Lampung	269	2 363	386	1 649	282	46
Kep. Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-
Jawa Barat	813	5 149	1 163	3 583	365	38
Jawa Tengah	755	7 823	1 949	5 641	213	20
DI Yogyakarta	117	321	125	196	-	-
Jawa Timur	949	7 553	2 472	4 835	220	26
Banten	201	135	295	887	150	18
Bali	144	572	230	342	-	-
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23
Nusa Tenggara Timur	310	296	350	1 487	900	223
Kalimantan Barat	294	1 815	176	884	577	178
Kalimantan Tengah	187	1 382	115	692	457	118
Kalimantan Selatan	217	1 791	350	1 193	210	38
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71
Sulawesi Utara	168	1 668	463	1 007	165	33
Sulawesi Tengah	277	1 709	350	975	275	109
Sulawesi Selatan	360	267	632	1 566	361	111
Sulawesi Tenggara	167	2 105	404	1 298	324	79
Gorontalo	59	677	226	365	68	18
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66
Maluku	125	963	118	392	328	125
Maluku Utara	107	1 089	212	481	292	104
Papua Barat	108	1 459	127	416	648	268
Papua	280	4 591	247	966	1 602	1 776
INDONESIA	8 712	73 478	14 567	44 052	10 769	409

Sumber : Statistik Podes 2014

Tabel 4.2.13 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	353	6 155	940	4 769	399	47
Sumatera Utara	481	5 651	621	3 629	1 215	186
Sumatera Barat	226	1 049	259	729	53	8
Riau	550	1 325	232	888	190	15
Jambi	207	1 355	270	906	159	20
Sumatera Selatan	381	2 881	320	2 135	391	35
Bengkulu	130	1 384	299	918	151	16
Lampung	280	2 374	402	1 698	244	30
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-
Jawa Barat	910	5 047	1 085	3 666	294	2
Jawa Tengah	930	7 629	1 994	5 511	120	4
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-
Jawa Timur	1 127	7 369	2 250	4 941	168	10
Banten	209	1 343	258	939	135	11
Bali	140	576	236	340	-	-
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14
Nusa Tenggara Timur	327	3 026	250	1 734	949	93
Kalimantan Barat	283	1 854	189	906	600	159
Kalimantan Tengah	201	1 375	121	748	421	85
Kalimantan Selatan	235	1 773	388	1 206	145	34
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90
Sulawesi Utara	174	1 664	445	1 082	126	11
Sulawesi Tengah	293	1 727	316	1 087	265	59
Sulawesi Selatan	381	2 668	660	1 628	319	61
Sulawesi Tenggara	205	2 149	391	1 406	315	37
Gorontalo	77	657	183	381	88	5
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51
Maluku	135	1 105	115	493	350	147
Maluku Utara	121	1 075	161	549	298	67
Papua Barat	113	1 874	127	619	752	376
Papua	243	5 309	205	1 323	1 960	1 821
INDONESIA	9 759	74 172	13 521	46 375	10 757	3 519

Sumber : Diolah dari Podes 2018

Tabel 4.2.14 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak ada Pos Polisi)				
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A c e h	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60	
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70	
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57	
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42	
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48	
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24	
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44	
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75	
Kep. Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26	
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37	
DKI Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	-	-	
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64	
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23	
DI Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	-	-	
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31	
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16	
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	-	-	
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02	
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82	
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44	
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52	
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89	
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53	
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82	
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80	
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49	
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66	
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48	
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45	
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19	
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49	
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70	
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10	
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46	
INDONESIA	10,60	89,40	17,72	53,60	13,10	4,98	

Sumber : Diolah dari Podes 2014

Tabel 4.2.15 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
			(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)				
A c e h	5,42	94,58	15,27	77,48	6,48	0,76
Sumatera Utara	7,84	92,16	10,99	64,22	21,50	3,29
Sumatera Barat	17,73	82,27	24,69	69,49	5,05	0,76
Riau	29,33	70,67	17,51	67,02	14,34	1,13
Jambi	13,25	86,75	19,93	66,86	11,73	1,48
Sumatera Selatan	11,68	88,32	11,11	74,11	13,57	1,21
Bengkulu	8,59	91,41	21,60	66,33	10,91	1,16
Lampung	10,55	89,45	16,93	71,52	10,28	1,26
Kep. Bangka Belitung	23,27	76,73	37,33	61,00	1,67	0,00
Kepulauan Riau	27,16	72,84	16,17	60,07	20,79	2,97
DKI Jakarta	83,15	16,85	66,67	33,33	0,00	0,00
Jawa Barat	15,28	84,72	21,50	72,64	5,83	0,04
Jawa Tengah	10,87	89,13	26,14	72,24	1,57	0,05
DI Yogyakarta	26,03	73,97	32,41	67,59	0,00	0,00
Jawa Timur	13,27	86,73	30,53	67,05	2,28	0,14
Banten	13,47	86,53	19,21	69,92	10,05	0,82
Bali	19,55	80,45	40,97	59,03	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	15,40	84,60	24,92	68,15	5,48	1,45
Nusa Tenggara Timur	9,75	90,25	8,26	57,30	31,36	3,07
Kalimantan Barat	13,24	86,76	10,19	48,87	32,36	8,58
Kalimantan Tengah	12,75	87,25	8,80	54,40	30,62	6,18
Kalimantan Selatan	11,70	88,30	21,88	68,02	8,18	1,92
Kalimantan Timur	19,56	80,44	16,05	51,74	30,30	1,92
Kalimantan Utara	13,69	86,31	11,30	37,26	29,81	21,63
Sulawesi Utara	9,47	90,53	26,74	65,02	7,57	0,66
Sulawesi Tengah	14,50	85,50	18,30	62,94	15,34	3,42
Sulawesi Selatan	12,50	87,50	24,74	61,02	11,96	2,29
Sulawesi Tenggara	8,71	91,29	18,19	65,43	14,66	1,72
Gorontalo	10,49	89,51	27,85	57,99	13,39	0,76
Sulawesi Barat	9,54	90,46	14,63	50,85	25,85	8,67
Maluku	10,89	89,11	10,41	44,62	31,67	13,30
Maluku Utara	10,12	89,88	14,98	51,07	27,72	6,23
Papua Barat	5,69	94,31	6,78	33,03	40,13	20,06
Papua	4,38	95,62	3,86	24,92	36,92	34,30
INDONESIA	11,63	88,37	18,23	62,52	14,50	4,74

Sumber : Diolah dari Podes 2018

DATA MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



9 772089529000